

# LAPORAN

# SDGs

Tahun 2024



Badan Perencanaan Pembangunan,  
Riset dan Inovasi Daerah  
Kabupaten Sikka

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kita haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas berkat dan tuntunanNya, Laporan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2023 / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2023 dapat disusun dengan baik.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara eksplisit berupaya menurunkan angka kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara, memperbaiki manajemen air dan energi, dan mengambil langkah urgen untuk mengatasi perubahan iklim. TPB menegaskan pentingnya upaya mengakhiri kemiskinan agar dilakukan bersama dengan upaya strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menerapkan langkah kebijakan sosial untuk memenuhi berragam kebutuhan sosial dan Langkah-langkah kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim dan proteksi lingkungan.

Dalam kerangka inilah, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka Pemerintah Kabupaten Sikka menyusun Laporan sesuai pelaksanaan aksi-aksi pembangunan tahun 2023.

Dalam laporan ini, pemerintah memilah pencapaian indikator-indikator dari TPB menjadi 2 (dua) kelompok yaitu indikator-indikator yang mengalami kemajuan dan indikator-indikator yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu indikator yang belum mencapai target karena terdapat tantangan yang kuat. Pemerintah Kabupaten Sikka tetap mengelolah tujuan-tujuan dalam TPB dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada dalam konteks pengelolaan pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan maupun pilar tata Kelola. Beberapa praktek baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah merupakan kekayaan pengelolaan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan. Kendati demikian, terdapat beberapa aspek pengukuran yang tidak tersedia karena tidak dapat dilaksanakan melalui implementasi program. Secara garis besar, laporan ini telah memberikan informasi yang signifikan terkait besaran capaian untuk masing-masing tujuan. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada :

Penjabat Bupati Sikka dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sikka yang telah memberikan dukungan penganggaran demi pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersusunnya laporan ini. Tim koordinasi yang telah berkontribusi dalam memberikan arahan maupun perbaikan demi penyempurnaan laporan ini. Tim Sekretariat yang telah mengorganisir pengelompokan tujuan-tujuan sesuai tingkatan kemajuan serta data-data pelengkap dalam penyempurnaan laporan ini serta mereformulasi pelaksanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah kedalam rumusan laporan sehingga laporan ini dapat disajikan dengan presisi tinggi.

Akhirnya, kami menyampaikan bahwa laporan ini belum sempurna tetapi informasi dan data yang ditampilkan akan memberikan nilai tambah bagi setiap kita yang membutuhkannya. Semoga bermanfaat.

Maumere, November 2024  
Plt. Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab.  
Sikka



Paulus Hilarius Bangkur, S.Pi., M.Pi  
NIP. 19660628 199703 1 005



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	II
DAFTAR ISI.....	IV
SAMBUTAN BUPATI SIKKA.....	VI
RINGKASAN EXECUTIF.....	VIII
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>21</b>
1.1 Latar Belakang.....	21
1.2 Tujuan.....	23
1.3 Lingkup Materi.....	23
1.4. Sistematika Penulisan .....	23
1.5 Proses Penyusunan Laporan.....	23
1.6 Permasalahan.....	23
<b>KABUPATEN SIKKA DALAM PERSPEKTIF SDGs .....</b>	<b>25</b>
2.1 Isu Strategis Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sikka: .....	25
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan.....	26
2.3 Strategi Pembangunan Kabupaten Sikka berdasarkan perubahan RPJMD Tahun 2018 - 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :.....	26
2.4 Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sikka berdasarkan urusan dapat diuraikan sebagai berikut : .....	27
2.5 Sasaran dan Target Pembangunan Kabupaten Sikka 2018-2023.....	31
2.6 Kebijakan Umum Belanja Daerah .....	33
<b>BAB III SDGs DAN TARGET CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN</b>	
<b>KABUPATEN SIKKA TAHUN 2023.....</b>	<b>37</b>
3.1 Hubungan antara Dokumen RPJMD Kabupaten Sikka dan SDGs Tahun 2023.....	37
<b>T U J U A N 1 Tanpa Kemiskinan.....</b>	<b>38</b>
<b>T U J U A N 2 TANPA KELAPARAN.....</b>	<b>48</b>
<b>T U J U A N 3 KEHIDUPAN SEHAT &amp; SEJAHTERA .....</b>	<b>57</b>
<b>T U J U A N 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS .....</b>	<b>73</b>
<b>T U J U A N 5 KESETARAAN GENDER.....</b>	<b>82</b>
<b>T U J U A N 6 AIR BERSIH &amp; SANITASI LAYAK .....</b>	<b>89</b>
<b>T U J U A N 8 PEKERJAAN LAYAK &amp; PERTUMBUHAN EKONOMI PEKERJAAN LAYAK.....</b>	<b>102</b>

T U J U A N 9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR.....	109
T U J U A N 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN.....	116
T U J U A N 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN.....	122
T U J U A N 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB .....	130
T U J U A N 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM .....	134
T U J U A N 14 EKOSISTEM LAUTAN.....	138
T U J U A N 15 EKOSISTEM DARATAN.....	143
T U J U A N 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH.....	148
T U J U A N 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN.....	153
BAB IV PENUTUP .....	157
A KESIMPULAN .....	157
B TINDAK LANJUT.....	157





## SAMBUTAN BUPATI SIKKA

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa Indonesia berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030*.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan kesepakatan global oleh seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dirumuskan melalui Sidang Majelis Umum PBB dan diratifikasi Pemerintah Indonesia sebagai wujud komitmen terhadap kesepakatan dimaksud.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) digagas dalam sebuah Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadakan di Rio de Janeiro (Brasil) pada Juni 2012 dibahas agenda pembangunan berkelanjutan yang disebut *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Pada pertemuan tingkat tinggi di markas PBB pada September 2015, sebanyak 193 negara anggota PBB sepakat untuk menjadikan SDGs sebagai kerangka agenda pembangunan dan kebijakan politis selama 15 tahun mulai 2016 hingga 2030. Pemerintah disetiap negara anggota PBB, baik negara kaya, menengah, maupun miskin, baik negara maju maupun berkembang, memiliki tanggungjawab untuk mengimplementasikan SDGs dimaksud. Negara adalah pihak yang memiliki tanggungjawab utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi, pembuatan kebijakan nasional, menentukan strategi pembangunan, yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah semua negara diharapkan menerapkan agenda dan kebijakan politik pembangunan ekonomi nasional, untuk meningkatkan kemakmuran dan sekaligus melindungi planet bumi.

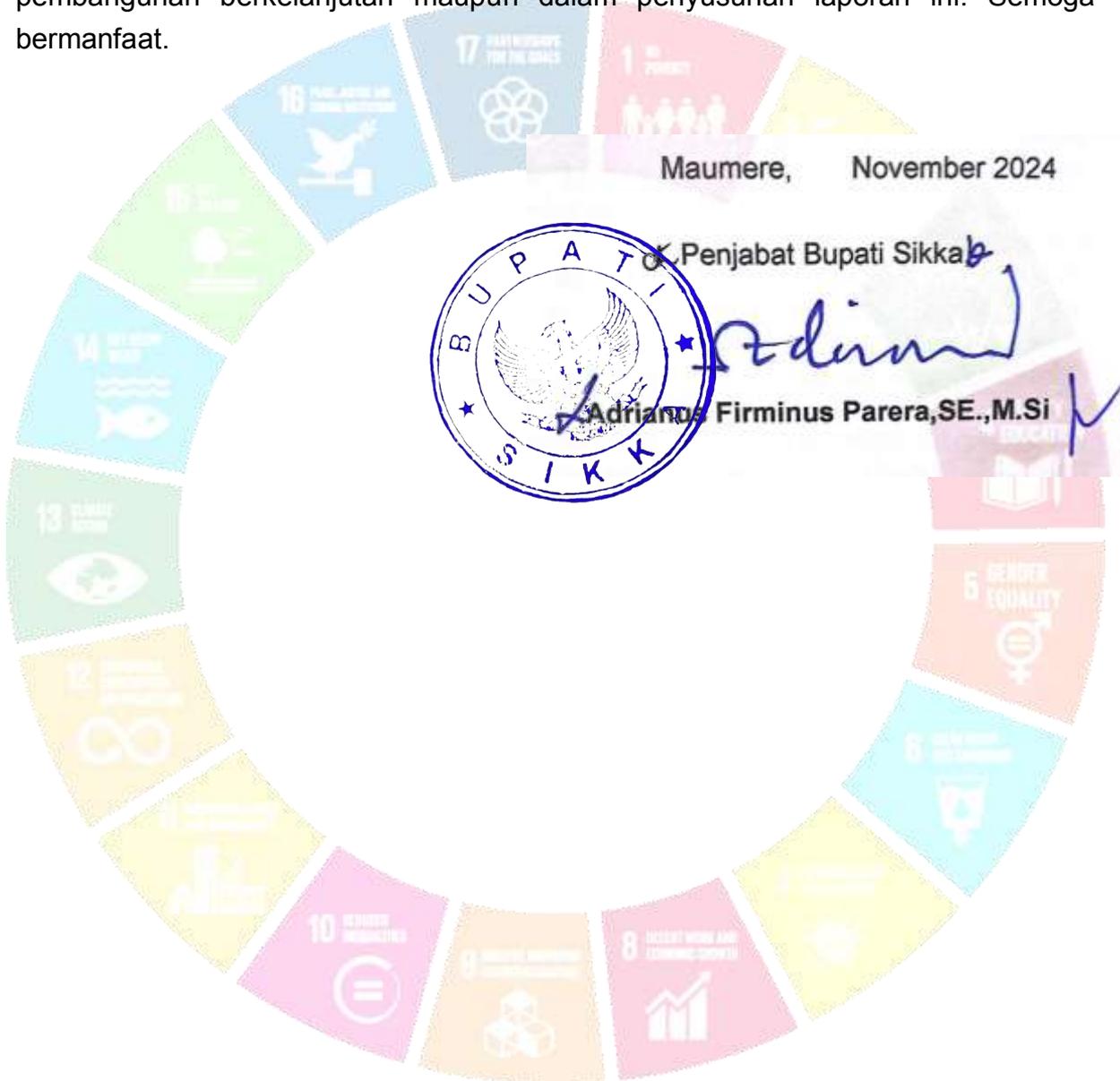
SDGs merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat universal. SDGs merupakan kelanjutan dan perluasan dari *Millennium Development Goals (MDGs)* yang telah dilakukan oleh negara-negara sejak 2001 hingga akhir 2015. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dikelompokkan dalam empat elemen : (1) Pertumbuhan dan keadilan ekonomi; (2) Pembangunan sosial; (3) Konservasi sumberdaya alam (perlindungan lingkungan); (4) Pemerintahan yang baik (*good governance*). Keempat elemen tersebut saling mendukung satu dengan lainnya, menciptakan tujuan pembangunan yang berkaitan dan berkelanjutan.

Dalam perspektif dan paradigma pembangunan baru, salah satu prinsip dari TPB adalah *“no one left behind”* yakni memastikan semua aspek berperan dan tak ada satupun yang tertinggal dalam kerangka pembangunan yang inklusi. Untuk

itulah semua elemen baik pemerintah, swasta dan masyarakat harus bersinergi memberikan peran nyata dan kuat untuk mengimplementasikan kesepakatan global dimaksud.

Pada sisi yang berbeda, tantangan global terkait virus Covid-19 turut menyumbang terhadap lambatnya upaya pembangunan berkelanjutan namun demikian Pemerintah Kabupaten Sikka tetap berupaya melalui beberapa kerangka pendanaan melalui kolaborasi dan sinergisitas multi sector dan multi pihak.

Akhirnya, saya memberi apresiasi kepada segenap masyarakat, stakeholders serta para pihak yang telah terlibat aktif baik dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan maupun dalam penyusunan laporan ini. Semoga bermanfaat.



## RINGKASAN EXECUTIF

### Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan



Angka Kemiskinan Kabupaten Sikka pada Desember 2023 sebesar 12,56% artinya mengalami penurunan sebesar 0,05 poin dibandingkan pada tahun 2022.

Upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan melalui strategi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, penguatan penghidupan yang berkelanjutan; serta penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dengan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan melalui peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan masyarakat, akses air minum dan sanitasi, konsumsi pangan serta penurunan pengangguran.

Pada sisi yang lain, strategi penguatan penghidupan yang berkelanjutan, dalam upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pendekatan perlindungan maupun pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan, serta meningkatkan daya tahan usaha mikro dan kecil. Namun demikian, tantangan dalam upaya pengentasan kemiskinan tetap ada antara lain: keterbatasan dalam pengelolaan sumber daya alam dan potensi lokal belum optimalnya kerjasama kemitraan; manajemen data kemiskinan, sinergitas dan harmonisasi antar program dan antar sektor yang mendukung penurunan kemiskinan.

### Tujuan 2. Tanpa Kelaparan



Data e-PPBGM memperlihatkan Perkembangan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah 2 tahun/balita yang negatif, ditunjukkan dengan kenaikan angka prevalensi stunting 13,8% pada tahun 2022 menjadi 15,3% pada tahun 2023, perolehan data bersumber dari e-PPBGM. Pencegahan stunting dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dengan sasaran kelompok prioritas di lokasi prioritas.

Beberapa upaya dalam rangka menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Sikka antara lain melalui perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, dan Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi untuk anak-anak pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Selain sasaran prioritas pencegahan

stunting bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak 0-23 bulan, terdapat kategori sasaran penting yaitu anak usia 24-59 bulan, Wanita Usia Subur (WUS), dan remaja putri.

Tantangan yang dihadapi adalah masih kurangnya ketersediaan akses air minum layak, air bersih, dan sanitasi; kurangnya pengetahuan tentang pola pangan beragam, bergizi, berimbang, sehat, dan aman; pola asuh orang tua; serta pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan risiko akibat pernikahan anak. Arah kebijakan dan strategi ke depan dan masih terus dilakukan adalah meningkatkan upaya promotif, dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif, dan rehabilitatif melalui upaya penerapan paradigma sehat dengan optimalisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); intervensi pencegahan dan penanganan stunting; peningkatan peran posyandu dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak; pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kesehatan di lingkungan masyarakat; dan mendorong pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) termasuk penuntasan Open Defecation Free (ODF); serta peningkatan peran dan keaktifan dalam pembinaan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia).

### Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera



Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Sikka tahun 2021–2023 cenderung menurun dari 179 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2021 menjadi 166 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2022 kemudian menurun kembali menjadi 69 per 100.000 Kelahiran Hidup. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya perbaikan dan penurunan AKI mengalami perubahan dalam sistem rujukan layanan baik di fasilitas kesehatan (faskes) pertama yaitu puskesmas maupun setelahnya yaitu fasilitas rujukan di rumah sakit.

Upaya yang telah dilakukan antara lain: pelayanan persalinan dan rujukan ibu hamil di masa pandemic covid-19 sesuai protokol kesehatan; pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang mumpuni; serta memberikan Program Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI), JKN Non PBI APBN, Sikka Sehat, atau Asuransi pada Perusahaan/Kantor.

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi antara lain kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; pengetahuan ibu tentang perawatan antenatal dan pengasuhan anak; penguatan usaha kesehatan seperti Posyandu; partisipasi pendidikan perempuan untuk mencegah pernikahan dini; serta penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk mengatur kelahiran.

#### Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas



Perkembangan kinerja pendidikan relatif baik yang ditunjukkan capaian Angka Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal pada tahun 2021. Penduduk usia yang telah menempuh pendidikan selama 15 tahun sebesar 8,24, kemudian naik menjadi 8,67 tahun rata-rata menyelesaikan jenjang pendidikan dan naik kembali menjadi 9,28 pada tahun 2023.

Kondisi ini menunjukkan tingkat pendidikan penduduk kabupaten Sikka semakin baik atau meningkat setiap tahunnya. Peningkatan Indeks Pendidikan tahun 2021 sebesar 0,7%. Hal ini disebabkan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengakses pendidikan semakin baik.

#### Tujuan 5. Kesetaraan Gender



Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat perempuan dan laki-laki untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Pembangunan ekonomi membuka banyak jalan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam jangka panjang.

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki makna yang penting karena setelah diadopsi maka akan dijadikan acuan secara global dan nasional sehingga agenda pembangunan menjadi lebih fokus. Setiap butir tujuan tersebut menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, baik tua mau-pun muda. Korelasi antara AKI dengan tingginya angka unmet need. "Unmet need adalah kebutuhan KB yang belum terpenuhi. Tingginya angka unmet need di Indonesia berpeluang terhadap tingginya angka kematian ibu, hal itu dikarenakan akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Reproduksi seksual maka pelayanan KB menjadi hal penting untuk diperhatikan. Unmet Need KB di Kabupaten Sikka secara tren mengalami penurunan hal ini menunjukkan kinerja positif, artinya bahwa kebutuhan KB yang tidak terpenuhi semakin berkurang. Namun demikian jika dibandingkan target 2021 sebesar 17% maka unmet need KB tidak tercapai mengingat realisasi 2021 sebesar 18%. Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian kesetaraan gender antara lain masih dihadapkan pada tantangan budaya patriarki, yang menempatkan sektor publik dominan ranah laki-laki; Belum optimalnya sistem

layanan terpadu yang komprehensif dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan; serta masih diperlukan peningkatan peran pembinaan keluarga dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera guna mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Upaya strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pencapaian Tujuan 5 antara lain meningkatkan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak, serta kualitas hidup perempuan dan anak melalui:

- a) pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b) penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban kekerasan sesuai standar dan terintegrasi dengan layanan dasar;
- c) pemberdayaan perempuan; serta
- d) pemenuhan hak anak termasuk edukasi pencegahan perkawinan anak.

### **Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak**



Secara umum persentase rumah tangga di Kabupaten Sikka yang memiliki layanan air minum layak mengalami peningkatan. Namun jika dilihat secara agregat (perkotaan dan perdesaan), maka cakupan pelayanan air minum perkotaan lebih baik dibandingkan perdesaan. Demikian pula dengan akses terhadap layanan sanitasi layak yang mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2023.

Selain itu, akses layanan sanitasi layak ditingkatkan melalui pelaksanaan program pusat Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang terfasilitasi serta kegiatan peningkatan sarana prasarana penyehatan lingkungan dalam bentuk pendampingan, kelembagaan, dan administrasi sarana prasarana air limbah domestik. Peningkatan derajat kesehatan dan lingkungan salah satunya ditandai dengan perwujudan perilaku hidup bersih dan sehat. Pelaksanaan perilaku masyarakat desa/kelurahan yang higienis secara mandiri khususnya dalam praktek buang air besar dapat ditunjukkan melalui indikator jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Pemerintah Kabupaten Sikka berupaya meningkatkan jumlah desa/kelurahan agar terverifikasi sebagai ODF melalui pemberian jamban kepada kepala keluarga. Tercatat desa/kelurahan ODF tahun 2023 sebanyak 160 desa/kelurahan. Tantangan yang masih dihadapi antara lain:

- a) Kuantitas maupun Kualitas air minum di wilayah perkotaan dan perdesaan serta sumber daya pengelolanya masih terbatas;
- b) Sistem pengolahan air limbah domestik komunal yang belum tersedia.

## Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau



Pemenuhan kebutuhan energi Kabupaten Sikka masih didominasi penggunaan energi fosil yaitu minyak bumi kendati demikian, secara bertahap seiring tersedianya sumber energi baru terbarukan terutama melalui penyediaan listrik yang bersumber dari penggunaan energi ramah lingkungan yaitu energi baru terbarukan (EBT) yang berasal dari PLTU Ropa dan PLTG Wairita. Kabupaten Sikka memiliki potensi EBT antara lain: energi surya, air, biogas, dan tenaga bayu.

Penyediaan energi listrik, terutama pemenuhan listrik untuk rumah tangga miskin belum mencapai target 100%, baru mencapai 4,4% pada tahun 2023. Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian Tujuan 7 yaitu akses pada energi bersih dan terjangkau masih terbatas, pendanaan yang besar dalam penyediaan energi bersih, serta dukungan riset dan teknologi. Selain itu, dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui upaya pemenuhan akses pemenuhan hak dasar masyarakat maka penyediaan listrik murah bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) tetap terus dilakukan.

## Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi



Selama rentang waktu tahun 2021 hingga 2023 terjadi peningkatan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 4,54% menjadi 2,62%. Mayoritas penduduk Kabupaten Sikka bekerja di kegiatan informal. Kurun waktu 2021 hingga 2023 masyarakat Kabupaten Sikka yang bekerja di sektor informal meningkat dari 96,00% menjadi 96,55%. Dari aspek gender, dapat kita cermati melalui serapan tenaga kerja oleh banyaknya perempuan yang bekerja di sektor informal dibandingkan laki-laki.

Kemajuan-kemajuan teknologi informasi turut serta mendorong terciptanya lapangan pekerjaan di sektor informal yang menciptakan peluang kerja di sektor perdagangan jasa melalui e-commerce.

Kecenderungan statistical memperlihatkan sebagian lapangan pekerjaan yang tercipta selama 5 tahun terakhir bukan di sektor formal melainkan informal yang memiliki kualitas dan tingkat upah yang rendah, hal ini sekaligus menjadi tantangan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Tantangan lain yaitu: belum optimalnya penempatan tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja serta jaminan sosial bagi tenaga kerja dan pekerja bukan penerima upah.

## Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur



Pada bidang infrastruktur, kondisi kualitas jalan strategis nasional di Kabupaten Sikka mengalami peningkatan signifikan dari 7.557,98 km pada tahun 2021 kemudian naik menjadi 9.401,65 km pada tahun 2022 lalu menurun di tahun 2023 menjadi 8.983,12 km. Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Sikka telah terhubung melalui jalan kabupaten yang berpotensi meningkatnya penggunaan moda transportasi untuk melayani pergerakan orang dan barang. Jika distribusi barang dapat tersedia dengan kontinu maka dapat menurunkan biaya logistik sehingga daya saing daerah akan meningkat.

Total panjang negara sepanjang 2.043,76 km dengan kondisi baik. Jalan Provinsi sepanjang 1.901,84 km dalam kondisi baik. Sedangkan jalan Kabupaten sepanjang 8.983,12 km dalam kondisi baik. Untuk sector transportasi udara, terus mengalami perbaikan. Bandara Frans Seda Maumere saat ini telah memiliki panjang run way 2.250 meter yang mampu didarati pesawat – pesawat yang berbadan lebar. Secara reguler telah dilayani maskapai NAM Air serta Wings Air. Prasarana perhubungan laut juga terus mengalami pembenahan. Terdapat pula 1 dermaga utama PT. Pelindo serta 1 dermaga penyeberangan serta 1 dermaga Pelabuhan rakyat di Wuring. Dalam bidang industri, Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur di Kabupaten Sikka mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2022 hingga 2023. Jenis lapangan usaha yang berkontribusi besar dalam PDRB yaitu pada sektor transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; industri pengolahan; serta pertanian, kehutanan dan perikanan. Tantangan yang masih dihadapi antara lain: pengembangan pelayanan angkutan yang mendukung aksesibilitas dan aglomerasi wilayah perkotaan, kawasan perbatasan dan kawasan strategis lainnya; kontribusi sektor industri terhadap PDRB belum optimal; masih minimnya pertumbuhan industri skala kecil dan menengah; serta pengembangan klaster industri belum optimal.

## Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan



Kesenjangan dapat dilihat dari perkembangan perkotaan dan perdesaan dalam aktivitas pembangunan. Di Kabupaten Sikka, jumlah desa dengan status sangat tertinggal dan tertinggal pada tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan tahun 2022. Jumlah desa sangat tertinggal sebanyak 26 desa. Desa tertinggal sebanyak 95 desa, Desa berkembang sebanyak 47 desa, Desa Maju sebanyak 10 desa dan 3 desa dengan status IDM Desa Mandiri.

Meningkatnya desa maju pada umumnya dipengaruhi oleh intervensi yang serius melalui upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sinergis dengan intervensi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Sikka adalah melalui penguatan Kelembagaan ekonomi masyarakat desa meliputi BUMDes, Pasar Desa, UED-SP, UP2K-PKK dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada. Tolok ukur untuk mengetahui kesenjangan dengan menggunakan indikator Indeks Gini. Selama tahun 2021-2023 perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sikka menunjukkan angka yang fluktuatif dan cenderung menunjukkan ketimpangan yang rendah. Tantangan yang dihadapi dalam menurunkan kesenjangan yaitu perubahan paradigma dalam pembangunan desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan bertujuan agar desa mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai kearifan setempat seperti ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial, dan lingkungan hidup. Upaya strategi yang dilakukan antara lain menurunkan kemiskinan secara merata; meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan; mempercepat proses persebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; serta meningkatkan ecosociotourism berbasis masyarakat (community based tourism) dengan mempertimbangkan keunggulan spesifik.

### **Tujuan 11. Kota dan Pemukiman Berkelanjutan**



Persentase rumah tangga kumuh perkotaan pada tahun 2023 sebesar 24,37%. Adanya angkutan umum baik dalam kota maupun pedesaan secara nyata berkontribusi terhadap indikator SDGs yaitu mendukung peningkatan pengguna moda transportasi umum. Dalam rangka mewujudkan ketahanan kota, desa/kelurahan maka perlu adanya kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri

dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh bencana menjadi bagian penting dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK). Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Kabupaten Sikka sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 8 desa. Pada sisi lainnya, Jumlah korban meninggal karena bencana pada tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 435 jiwa jika dibandingkan pada tahun 2022 hanya sebesar 1.718 jiwa. Tantangan lain adalah masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khususnya masyarakat dengan pra kesejahteraan; belum optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh pada kawasan kota; serta belum tersedianya kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang terintegrasi.

## Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab



Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2006 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 2021. Pengelolaan sama selama ini masih terpusat pada kawasan perkotaan sehingga jika dilihat jangkauan pelayanan sampah kawasan perkotaan saja yang terlayani dengan luasan yang relatif kecil dibandingkan dengan total wilayah pedesaan.

Ini diakibatkan karena masih rendahnya penerapan prinsip pengurangan sampah dan terbatasnya infrastruktur yang mengolah sampah di pedesaan. Tantangan yang dihadapi adalah pelaksanaan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan belum diterapkan pada kehidupan sehari-hari baik dalam dunia usaha dan industri, proses bisnis, maupun masyarakat. Selain itu, belum ada insentif dan disinsentif yang mendorong pelaksanaan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan; serta perubahan pola konsumsi masyarakat ditengarai menyebabkan meningkatnya sampah seperti kemasan plastik, tas belanja dan kotak nasi.

Upaya strategi yang ditempuh dalam pencapaian Tujuan 12 yaitu: Pembentukan karakter masyarakat melalui sosialisasi, diseminasi dan pemberdayaan masyarakat untuk mencintai lingkungan melalui pendidikan lingkungan bagi masyarakat mulai usia dini, termasuk pengembangan budaya hemat energi dan hemat air; pemulihan kembali lingkungan melalui penanganan limbah industri UMKM dan rumah tangga; peningkatan perijinan dan pemantauan lingkungan; serta Penegakan hukum, serta mendorong penerapan standar industri hijau untuk pengelolaan risiko lingkungan.

## Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim



Sesuai kondisi geografisnya maka Kabupaten Sikka pada sisi utara akan mengalami ancaman berupa kenaikan muka air laut dan potensi meningkatnya genangan dan rob. Kawasan dataran rendah berpotensi terjadinya peningkatan banjir dan dataran tinggi terutama yang memiliki lereng curam dan jenis tanah yang mudah longsor akan meningkat ancaman bencana longsor. Sedangkan untuk pesisir selatan peningkatan cuaca ekstrem pada perairan laut akan meningkatkan ancaman nelayan dan masyarakat yang tinggal di pesisir terhadap terjangan gelombang laut.

Tantangan lain yang dihadapi adalah Wilayah Kabupaten Sikka merupakan bagian dari jalur sabuk vulkanik (volcani carc) yang memanjang dari Pulau Sumatera–Jawa–Nusa Tenggara hingga Sulawesi. Kondisi ini sangat berpotensi sekaligus menyebabkan rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Arah kebijakan dan strategi ke depan dalam rangka penguatan upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah maka dilakukan melalui upaya peningkatan prasarana sarana mitigasi dan pengurangan risiko bencana, penguatan sistem kesiapsiagaan bencana, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering), peningkatan kerjasama dan kemitraan antar daerah dan antar lembaga dalam upaya pengurangan risiko bencana, serta mendorong optimalisasi pelaksanaan standar pelayanan minimal.

#### Tujuan 14. Ekosistem Lautan



Sebagai upaya Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan nasional ekosistem lautan pada tahun 2030, ditetapkan 10 target yang diukur melalui 15 indikator. Target-target tersebut terdiri dari tata ruang laut dan pengelolaan wilayah laut berkelanjutan, penangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman dan pemberantasan ilegal fishing, peningkatan kawasan konservasi perairan dan pemanfaatan berkelanjutan, serta dukungan dan perlindungan nelayan kecil.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah. Ekosistem Lautan difokuskan pada dua arah kebijakan utama, yaitu: (1) pengelolaan pesisir serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan, (2) pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Arah kebijakan tersebut, dilaksanakan melalui upaya-upaya, meningkatkan tata kelola sumber daya kelautan, meningkatkan konservasi, rehabilitasi dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana di pesisir dan laut, termasuk penambahan luasan kawasan konservasi perairan dan penguatan kelembagaan serta efektivitas pengelolaannya, mengendalikan ilegal fishing dan kegiatan lainnya yang merusak di laut, meningkatkan produktivitas, optimalisasi kapasitas dan kontinuitas produksi perikanan, termasuk alokasi yang proporsional antara stok sumber daya ikan, serta penyediaan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan yang efisien dan ramah lingkungan; Pemantauan jumlah kepatuhan pelaku usaha perikanan kelautan terhadap peraturan perundangan yang berlaku perlu dilakukan sehingga kegiatan IUU Fishing

(penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan legal yang tidak dilaporkan dan tidak diatur) dapat dicegah. Tantangan yang dihadapi dalam bidang kelautan dan perikanan yaitu: Belum optimalnya produksi perikanan dan pembudidayaan ikan dan jaminan terhadap risiko usaha penangkapan ikan; Tingginya kerusakan ekosistem pesisir; Belum optimalnya penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran; Pengelolaan kelembagaan dan usaha perikanan dan kelautan masih bersifat konvensional belum berbasis korporasi.

### Tujuan15. Ekosistem Daratan



Luas hutan di Kabupaten Sikka tahun 2023 seluas ±38.442,43 Ha. Kawasan hutan di Kabupaten Sikka terbagi menjadi 4 kawasan, yaitu Hutan Lindung, Kawasan Perlindungan, Kawasan untuk Produksi, dan Kawasan untuk Penggunaan Lain. Luas Kawasan hutan Hutan lindung seluas ±19.854 Ha dan Hutan produksi seluas ±18.588,43 Ha. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya dari tahun 2022 menurun menjadi 15 ha tahun 2023.

Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan di Kabupaten Sikka mengalami peningkatan di tahun 2023 sebesar 75,52%. Tantangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, antara lain: pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang belum sepenuhnya berkelanjutan; menurunnya daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga mengakibatkan bencana banjir, erosi, longsor, dan kekeringan; belum optimalnya penanganan lahan kritis; masih perlunya peningkatan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Tantangan lain adalah Tingkat kerusakan dan degradasi hutan dan lahan yang masih cukup tinggi, sehingga hutan dan lahan belum dapat berfungsi dengan optimal baik sebagai unsur produksi, unsur penyangga dan pengatur kondisi hidrologis wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Upaya strategi dalam menjaga ekosistem daratan secara berkelanjutan antara lain dalam bentuk konservasi lingkungan melalui peningkatan daya dukung DAS dan rehabilitasi hutan dan lahan; peningkatan konservasi sumberdaya air, peningkatan pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air tanah, pengembangan dan perbaikan kualitas air; pengendalian banjir dan rob; rehabilitasi kawasan mangrove dan terumbu karang; serta konservasi.

## Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh



Perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan merupakan implementasi negara hadir dalam melindungi segenap warga negara termasuk perempuan dan anak. Kondisi yang ada saat ini tahun 2023 prevalensi jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami penurunan dari 0,61% menjadi 0,12%. Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka pada periode 2019-2024 mencapai 14,28% atau total 5 anggota perempuan dari 35 anggota DPRD Kabupaten Sikka meningkat dari periode sebelumnya.

Pada lembaga eksekutif, jumlah keterlibatan perempuan pada jabatan eselon II di Kabupaten Sikka Tahun 2023 sebanyak 7 orang dari total 30 jabatan terisi. Selain itu, jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir berjumlah 0 kasus.

Kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Sikka dalam rangka mencapai Tujuan 16 antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services), membangun pemerintahan yang terbuka (open government); meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan; serta mewujudkan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik.

## Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan



Dalam rangka menguatkan sarana pelaksanaan dan revitalisasi kemitraan global maka salah satu tolok ukur yang digunakan adalah penerimaan daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Sikka kurun waktu Tahun 2021-2023 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan kontribusi terbesar pada komponen PAD.

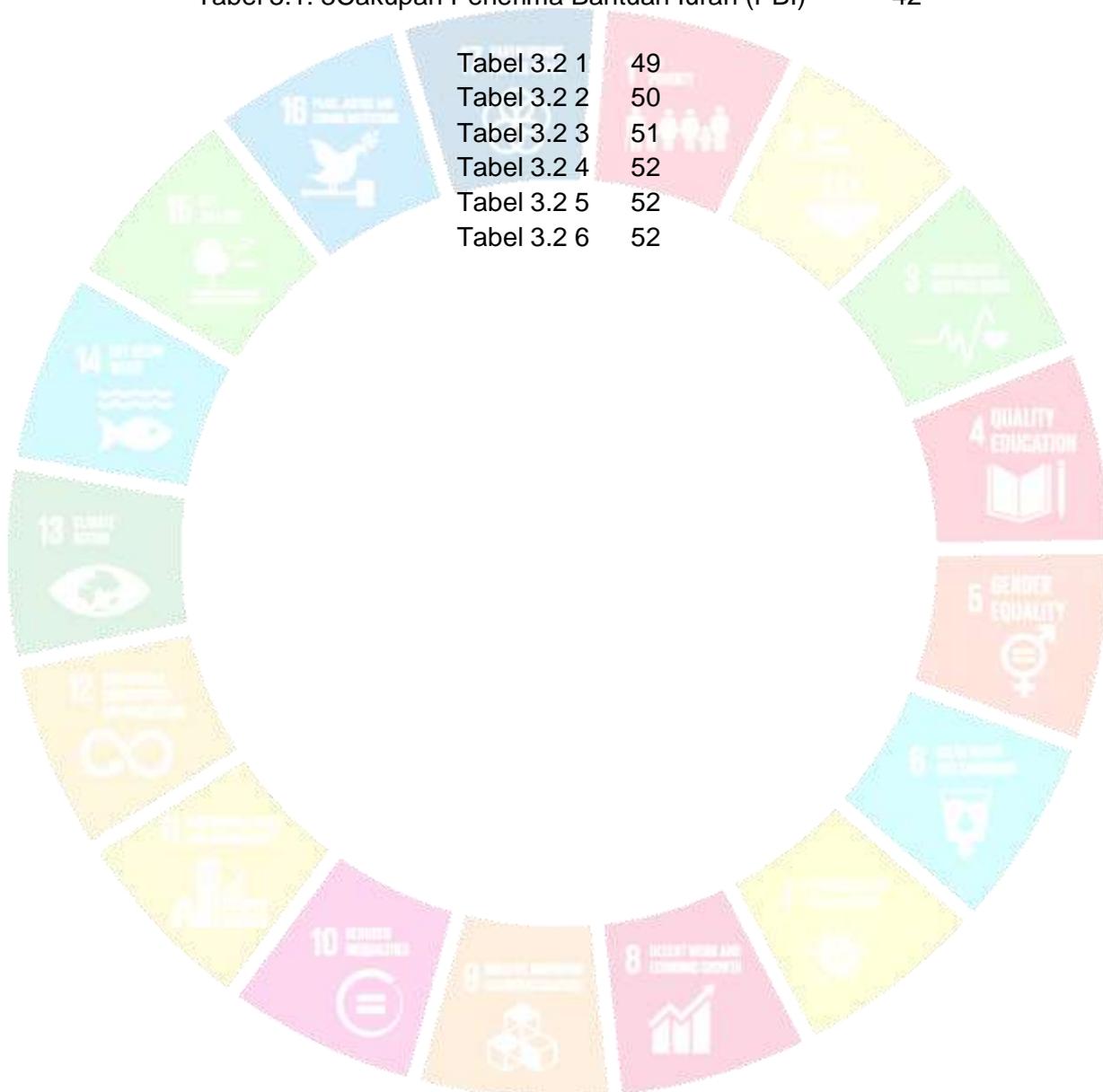
Selama kurun waktu tersebut, Dana Perimbangan menempati porsi terbesar terhadap Pendapatan Daerah. Realisasi pendapatan daerah periode tahun 2021-2023 mengalami peningkatan dikarenakan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menaikkan PAD. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun sebelumnya Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 naik sebesar 15 persen. Komponen Pajak Daerah tahun 2023 naik menjadi 26,31 persen dari tahun sebelumnya.

Penerimaan Retribusi Daerah mengalami peningkatan sebesar 11,81 persen dari penerimaan tahun sebelumnya. Penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah juga mengalami penurunan sebesar minus 31,5 persen dari penerimaan pada tahun sebelumnya.



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah dalam RPJMD 2018-2023.....	25
Tabel 2. 2	29
Tabel 2. 3	31
Tabel 2. 4 Peruntukan Anggaran Perurusan Pembangunan dan Jumlah Indikator SDGs yang dapat diintervensi	34
Tabel 3.1. 1 Akses Air Minum dan Sanitasi Layak Kabupaten Sikka Tahun 2021-2023	40
Tabel 3.1. 2	42
Tabel 3.1. 3Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	42
Tabel 3.2 1	49
Tabel 3.2 2	50
Tabel 3.2 3	51
Tabel 3.2 4	52
Tabel 3.2 5	52
Tabel 3.2 6	52



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Pagu APBD Kabupaten Sikka Tahun 2023 berdasarkan urusan pembangunan.....	15
Grafik 2.2 Pagu APBD Kabupaten Sikka tahun 2023 urusan Wajib Pelayanan Dasar .....	15
Grafik 3.1.1 Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2023 .....	19
Grafik 3.1.2 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak Tahun 2021 - 2023.....	21
Grafik 3.1.3 Persentase Rumah Tangga kumuh perkotaan.....	23
Grafik 3.3.2 Persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun .....	44
Grafik 3.3.3 Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.....	45
Grafik 3.5.1 Data Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2023 .....	65
Grafik 3.6.1 Persentase Akses Air Minum Layak Tahun 2021-2023 .....	70
Grafik 3.6.2 Persentase Penduduk Berakses Air Bersih Tahun 2021-2023.....	71
Grafik 6.3 Indeks Kualitas Air (IKA) Kab.Sikka tahun 2021-2023 .....	73
Grafik 3.8.1 Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita .....	83
Grafik 3.8.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara .....	85
Grafik 3.9.1 Laju pertumbuhan PDRB.....	91
Grafik 3.10.1 Status IDM Kabupaten Sikka Tahun 2023 .....	97
Grafik 3.10.2 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka .....	98
Grafik 3.10.3 Indeks Gini Kabupaten Sikka .....	99
Grafik 3.11.1 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang .....	104



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Decade aksi dari pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) saat ini akan menyisakan waktu tujuh tahun lagi menuju pencapaian target agenda 2030. Pasca pandemi covid 19, upaya akselerasi pembangunan Indonesia tetap diperhadapkan pada tantangan namun komitmen Pemerintah Indonesia pada pelaksanaan TPB/ SDGs tetap ada dengan diperkuat melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pencapaian Pelaksanaan TPB/SDGs. Regulasi tersebut menegaskan peran multipihak, baik pemerintah maupun non pemerintah dalam membangun sinergi dan kolaborasi untuk aksi nyata percepatan pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan hingga ke level granulasi yang dibutuhkan untuk memastikan inklusifitas dari proses pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsip *no one leave behind*.

Upaya perbaikan derajat kehidupan manusia, lingkungan dan tata kelola birokrasi yang sehat serta penataan ekonomi masyarakat yang stabil merupakan cita-cita luhur pemerintah mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah.

Kabupaten Sikka dalam upaya dan strategi pembangunan melakukan perbaikan-perbaikan tersebut dan telah dijabarkan kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menetapkan arah, prioritas, kebijakan pembangunandan Kebijakan keuangan daerah. Pelaksanaanya diatur di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan umum anggaran.

Melalui program SDGs dalam indikator-indikator strategis pembangunan telah melakukan pengukuran target capaian setiap tujuan pembangunan Kabupaten Sikka namun realisasi capaian pelaksanaan target-target pembangunan yang belum di capai baik terhadap standar provinsi, nasional maupun SDGs sendiri.

Komitmen nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) atau SDGs merupakan persentasi standar ukur capaian target-target pembangunan mulai di tingkat nasional sampai ke kabupaten/kota. Indikator-indikator capaian dan target capaian SDGs merupakan nominasi capaian yang harus diselaraskan dengan detail rencana-rencana pembangunan sesuai prinsip keadilan untuk semua.

Penyusunan Dokumen Laporan Evaluasi Capaian Target TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Kabupaten Sikka adalah sebuah narasi deskriptif untuk memberi gambaran tentang capaian target pembangunan terukur menurut indikator-indikator TPB.

Penyusunan Dokumen Laporan Evaluasi Capaian Target TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) merupakan jawaban Pemerintah Kabupaten Sikka terhadap Komitmen Nasional TPB yang di tuangkan kedalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

dalam Lampiran lalu kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Sikka sebagai ujung tombak penyedia layanan publik dan berbagai kebijakan serta program/kegiatan mempunyai kewenangan menyusun proporsi anggaran dalam kebijakan belanja daerah; lebih terkonsentrasi pada masalah kemiskinan dalam berbagai dimensinya serta besar alokasi anggaran dan target capaiannya ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Urusan pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan upaya pengentasan ketimpangan (disparitas) antar penduduk dan wilayah, indikator kinerja program RPJMD berjalan selaras dan terakumulasi di dalam tujuan, target dari setiap indikator target SDGs. Dalam penataan ekologi dan konservasi lingkungan hidup yang keberlanjutan masih harus melakukan proses penyadaran serta pemahaman tentang dampak yang berkelanjutan akibat terjadinya perusakan hutan, perusakan manajemen tata air, perusakan kesehatan laut, dan sebagainya.

Keberlanjutan agenda pembangunan derajat kehidupan manusia seperti kemiskinan, kelaparan, keadilan gender merupakan isu utama perencanaan strategis yang menjadi inspirasi dasar penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Sikka.

Peningkatan kesejahteraan dan pendidikan sesuai prioritas pembangunan Kabupaten Sikka adalah peningkatan kualitas hidup manusia melalui jaminan sosial, pendidikan, jaminan kesehatan serta reformasi agraria dalam kaitannya dengan kepemilikan sertifikat tanah hak milik pribadi. Pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Sikka lebih difokuskan kepada masalah cara mengatasi kesenjangan kesempatan dalam berusaha dari pada mengatasi ketimpangan dalam memperoleh pendapatan (*outcome*) dan konsumsi sehingga pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi di berbagai bidang seperti industrialisasi yang berkelanjutan dan penerapan pola produksi (mekanisme sistematis yang mengatur konsumsi suatu produk benar-benar mengikuti kaidah-kaidah yang menjamin keseimbangan ekologis dan berkesinambungan khususnya sumber daya alam) serta konsumsi berkelanjutan atau disebut juga *sustainable consumption* merupakan suatu pola konsumsi barang dan jasa yang tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.

Akses energi yang terjangkau di Kabupaten Sikka dilakukan dengan penyediaan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pembangkit listrik, penggunaan biofuel (Bahan bakar hayati baik padatan, cairan ataupun gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik), bendungan sebagai salah satu strategi pelaksanaan konservasi mata air bagi masyarakat serta manajemen transportasi. Pengalihan kepada sumber energi terbarukan serta transparansi pengelolaan sektor energi juga menjadi bagian dari upaya lebih luas Pemerintah Kabupaten Sikka untuk menerapkan tata kelola sumber daya berkelanjutan.

Adanya keselarasan dan saling melengkapi antara target–target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan target–target RPJMD Kabupaten Sikka dalam upaya percepatan pencapaian target-target pembangunan.

## 1.2 Tujuan

Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Sikka bertujuan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pelaksanaan setiap target tujuan pembangunan berdasarkan perencanaan dan penganggaran di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

## 1.3 Lingkup Materi

Dokumen Laporan Evaluasi Capaian Target SDGs Kabupaten Sikka tahun 2023 ini memuat data dan informasi tentang capaian target pembangunan yang terukur berdasarkan indikator Nasional SDGs. Prioritas dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sikka merupakan target strategi kinerja sedangkan indikator kinerja program/kegiatan (indikator out comes) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang digunakan sebagai sub indikator capaian target.

## 1.4. Sistematika Penulisan

### Bab I Pendahuluan

Berisikan Latar Belakang, Tujuan, Lingkup Materi, Sistematika Penulisan, Proses Penyusunan Laporan dan Permasalahan.

### Bab II Kabupaten Sikka dalam Perspektif SDGs

Berisikan Issue Strategis Perencanaan Pembangunan, Prioritas dan Kebijakan Pembangunan, Kebijakan Umum Belanja Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) 2018 -2023.

### Bab III SDGs DAN KONVERSI PROGRAM/KEGIATAN KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017

Berisikan Hubungan antara Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka dan SDGs tahun 2023.

### Bab IV PENUTUP

Berisikan rekomendasi tindak lanjut.

## 1.5 Proses Penyusunan Laporan

- Melakukan pengambilan data target capaian program/kegiatan pada setiap Perangkat Daerah
- Melakukan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Sikka tahun 2023 berdasarkan indikator target SDGs 2023.

## 1.6 Permasalahan

Apakah Target Capaian Pembangunan Kabupaten Sikka di dalam indikator kinerja perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dan Intervensi Kebijakan Anggaran yang tepat sasaran secara periodik telah menjawab permintaan 17 Tujuan (Goals) SDGs 2016-2030 melalui target dan indikatornya.

Adapun permasalahan yang dialami selama pelaksanaan Penyusunan Laporan Capaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Sikka berdasarkan instrumen SDGs adalah :

- Masih adanya beberapa ketidak selarasan antar Target-Target Pembangunan didalam Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Sikka dan target /indikator SDGs.



## BAB II

### KABUPATEN SIKKA DALAM PERSPEKTIF SDGs

Mencermati proses perencanaan pembangunan dan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 menunjukkan telah adanya korelasi/relevansi dan keselarasan antar isu-isu strategis, Arah Kebijakan Pembangunan serta intervensi program RPJMD terhadap SDGs.

#### 2.1 Isu Strategis Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sikka:

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang mendasar, mendesak dan tingkat pertumbuhan yang tinggi, serta menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan.

Mengacu pada masalah pokok Kabupaten Sikka di dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 yakni :

1. Masih rendahnya Kualitas Hidup Masyarakat
2. Masih rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah
3. Masih Rendahnya akses dan kualitas layanan infrastruktur
4. Kurangnya Tataan Kehidupan Sosial yang harmonis
5. Belum Optimalnya Pelayanan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

maka ditetapkan kedua masalah pokok tersebut menjadi issue strategis Kabupaten Sikka hingga Tahun 2023 yang dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1  
Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah dalam RPJMD 2018-2023

No.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Masih rendahnya kualitas hidup masyarakat	1 Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	1 Masih rendahnya akses layanan pendidikan 2 Masih rendahnya kualitas layanan pendidikan
		2 Masih Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1 Masih tingginya Angka Harapan Hidup 2 Masih tingginya Prevelensi Stunting
		3 Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pembangunan
2.	Masih rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Masih rendahnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan dan potensial	Masih rendahnya kontribusi dan pertumbuhan sektor-sektor unggulan dan potensial
3.	Masih Rendahnya akses dan kualitas layanan infrastruktur	Masih rendahnya Kualitas Infrastruktur Dasar	1 Masih rendahnya kualitas jalan Kabupaten
			2 Masih terdapat rumah tangga yang belum menggunakan air bersih
			3 Masih terdapat rumah tangga yang belum menggunakan listrik
4.	Kurangnya Tataan Kehidupan Sosial yang harmonis	1 Kurangnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Masih tingginya gangguan keamanan ketertiban masyarakat dan resiko bencana
		2 Masih tingginya kesenjangan pembangunan manusia	1 Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang pemerintahan dan politik

No.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		antara laki-laki dan perempuan	2 Masih rendahnya Partisipasi perempuan dalam pembangunan
5	Belum Optimalnya Pelayanan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	1 Belum optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	1 Masih rendahnya capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
			2 Masih rendahnya kinerja Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
		2 Kapasitas dan akuntabilitas kinerja dan Keuangan yang masih rendah	Masih rendahnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaksanaan dan Evaluasi serta pelaporan kinerja
		3 Masih rendahnya kualitas pelayanan publik	1 Sistem Informasi pelayanan publik yang belum memadai
2 Masih rendahnya nilai investasi swasta			

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023

## 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Strategi yang baik dikembangkan dengan prinsip-prinsip menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, memenuhi kebutuhan layanan yang berbeda tiap segmen masyarakat pengguna layanan serta pemangku kepentingan, terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita/skenario dan layanan yang bernilai tambah secara berkelanjutan. Strategi pembangunan daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023. Sedangkan Arah kebijakan adalah fokus dari strategi sehingga arah kebijakan harus mencakup kelompok sasaran (target group), tempat (locus) dan dimensi. Arah kebijakan membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional atau realistis, memperjelas strategi sehingga menjadi spesifik/fokus, konkrit dan operasional, mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran dan mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas agar memenuhi kriteria, urgensi, serius dan pertumbuhan yang tinggi.

## 2.3 Strategi Pembangunan Kabupaten Sikka berdasarkan perubahan RPJMD Tahun 2018 - 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan
2. Penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kesakitan dan Prevalensi Stunting
3. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
4. Pembangunan infrastruktur dasar
5. Peningkatan rasa aman dan nyaman
6. Peningkatan Kinerja Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

7. Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan kinerja instansi pemerintah
8. Peningkatan sistim informasi pelayanan publik

#### **2.4 Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sikka berdasarkan urusan dapat diuraikan sebagai berikut :**

1. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana, insentif pendidikan serta manajemen kependidikan yang berkualitas.
2. Pembangunan Kesehatan diarahkan pada pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar terutama bagi keluarga miskin; meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; memperbaiki sarana dan prasarana serta kualitas Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya.
3. Pembangunan pekerjaan umum diarahkan pada peningkatan kualitas jalan dan jembatan agar dapat berfungsi sesuai dengan tingkat pelayanan dan umur rencana dan menunjang perkembangan sektor-sektor strategis dan pertumbuhan/ pengembangan wilayah terutama mempersempit disparitas antar wilayah; peningkatan kapasitas maupun kualitas prasarana jalan dan jembatan sesuai dengan tuntutan pertumbuhan lalu lintas, status jalan, kondisi geografis, pengembangan wilayah dan tuntutan masyarakat; peningkatan kinerja pelayanan prasarana jalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangannya; mengembangkan sumber daya air dan jaringan irigasi.
4. Pembangunan perumahan dan pemukiman diarahkan pada peningkatan dan pemeliharaan kualitas prasarana dan sarana dasar perumahan/permukiman bagi masyarakat kurang mampu.
5. Pembangunan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diarahkan pada ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
6. Pembangunan di bidang sosial diarahkan pada pengembangan kemampuan serta kemauan para penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat mandiri memenuhi kebutuhan dan melaksanakan fungsi sosial secara wajar; tergeraknya partisipasi sosial masyarakat dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial; meningkatnya kepedulian/ rasa kesetiakawanan sosial masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha untuk menaggulangi masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan dan potensi tenaga pelayanan kesejahteraan sosial
7. Pelaksanaan urusan ketahanan pangan diarahkan pada peningkatan koordinasi dan pendampingan dalam rangka peningkatan produksi guna mempertahankan ketersediaan pangan wilayah.
8. Pembangunan pertanahan diarahkan pada peningkatan, penguasaan, pemilikan, penggunaan tanah dan penyelesaian konflik pertanahan; penyusunan dokumen perencanaan pertanahan.

9. Pembangunan pertanahan diarahkan pada peningkatan, penguasaan, pemilikan, penggunaan tanah dan penyelesaian konflik pertanahan; penyusunan dokumen perencanaan pertanahan.
10. Pembangunan Pengelolaan lingkungan hidup diarahkan pada koordinasi upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam, serta rehabilitasi dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan peningkatan kinerja pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.
11. Pembangunan kependudukan diarahkan pada pengendalian penataan administrasi kependudukan dan perluasan cakupan pelayanan hak-hak sipil masyarakat atas akta-akta catatan sipil.
12. Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat diarahkan pada pengembangan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan potensi dan keunggulan yang dimiliki melalui peningkatan partisipasi sosial.
13. Pembangunan keluarga berencana diarahkan pada pengendalian penduduk peningkatan kualitas keluarga melalui peningkatan pelayanan kontrasepsi, kesehatan reproduksi remaja dan peningkatan peran serta masyarakat dalam ber-KB.
14. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada peningkatan peran serta perempuan dalam berbagai aspek pembangunan melalui penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dalam rangka peningkatan kualitas terhadap perempuan dan anak.
15. Pembangunan perhubungan dan transportasi diarahkan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan jaringan pelayanan inter dan antar moda angkutan terutama pelayanan moda transportasi pada kantong-kantong produksi perdesaan
16. Urusan Komunikasi dan Informatika difokuskan pada pembinaan, pengawasan sarana dan prasarana komunikasi informatika.
17. Pelaksanaan urusan penanaman modal diarahkan pada peningkatan iklim investasi melalui fasilitasi kerja sama dan peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
18. Pelaksanaan urusan Koperasi dan UMKM diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, pengembangan kewirausahaan dan peningkatan daya saing UMKM, pengembangan sistem pendukung usaha dan permodalan bagi koperasi dan UMKM guna mengembangkan dan memperkuat sektor riil masyarakat.
19. Pembangunan di bidang pemuda dan olah raga diarahkan pada pembinaan dan pemasyarakatan olah raga masyarakat.
20. Pelaksanaan urusan kebudayaan diarahkan pada pengelolaan keragaman nilai dan kekayaan budaya.
21. Pelaksanaan urusan kearsipan diarahkan pada peningkatan penyelamatan dokumen-dokumen guna peningkatan kualitas informasi.
22. Pelaksanaan urusan perpustakaan diarahkan pada pengembangan minat dan budaya baca dengan sasaran pelayanan perpustakaan keliling.
23. Pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan diarahkan pada peningkatan produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan pengembangan perikanan tangkap maupun budi daya yang didukung oleh investasi dan

pendampingan serta penguatan kelembagaan, peningkatan sumber daya dan kesadaran manusia tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut.

24. Pelaksanaan urusan pariwisata diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan dan penyediaan sarana prasarana wisata yang memiliki keunggulan strategis; bimbingan pada kelompok usaha dan kelompok sadar wisata di sekitar objek wisata guna meningkatkan kualitas produk dan layanan kepada wisatawan
25. Pelaksanaan urusan pertanian diarahkan pada pembinaan sebagai upaya peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian/ perkebunan/ peternakan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.
26. Pelaksanaan urusan perdagangan diarahkan pada peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa dan pengembangan pasar dalam rangka kelancaran distribusi barang/produk.
27. Pelaksanaan urusan perindustrian diarahkan pada pengembangan industri kecil dan menengah, peningkatan fasilitasi industri kecil dan menengah melalui pemanfaatan sumber daya/potensi lokal.
28. Pelaksanaan urusan transmigrasi diarahkan pada pengembangan kawasan transmigrasi lokal.
29. Pelaksanaan unsur pendukung diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang terdiri dari optimalisasi peran Sekretariat Dewan dan Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
30. Perencanaan pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas manajemen perencanaan yang pro publik serta meningkatkan proporsi serapan anggaran yang memihak pada masyarakat.
31. Keuangan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan akuntabilitas aparatur daerah, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
32. Pelaksanaan unsur pengawas diarahkan pada peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas aparatur daerah dan peningkatan administrasi pemerintah daerah.
33. Pelaksanaan unsur kewilayahan diarahkan pada peningkatan administrasi pemerintah daerah di wilayah kecamatan dan kelurahan.
34. Unsur Kesatuan bangsa dan Politik dalam negeri diarahkan pada peningkatan kerja sama, keamanan dan ketentraman dan kesatuan bangsa dan Politik.

Tabel 2. 2

Keselarasan Dokumen Perubahan RPJMD dengan SDGs

MISI RPJMD	SDGs
1	2
<b>1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas</b>	<b>I Tanpa Kemiskinan :</b> Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
	<b>II Tanpa Kelaparan:</b> Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
	<b>III Kehidupan Sehat dan Sejahtera:</b>

MISI RPJMD	SDGs
1	2
<b>2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi</b>	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
	<b>IV Pendidikan Berkualitas:</b>
	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
	<b>V Kesetaraan Gender:</b>
	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
	<b>VI Air Bersih dan Sanitasi Layak:</b>
	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
	<b>VII Energi Bersih dan Terjangkau:</b>
	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua
	<b>VIII Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi:</b>
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
	<b>IX Industri, Inovasi dan Infrastruktur:</b>
	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
	<b>X Berkurangnya Kesenjangan:</b>
	Mengurangi kesenjangan intra- dan antar negara
	<b>XI Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan:</b>
	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
<b>XII Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab:</b>	
Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	
<b>XIII Penanganan Perubahan Iklim:</b>	
Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	
<b>XIV Ekosistem Laut:</b>	
Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	
<b>XV Ekosistem Daratan:</b>	
Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	
<b>XVI Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh:</b>	
Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	
<b>XVII Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan:</b>	
Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan	

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023

## 2.5 Sasaran dan Target Pembangunan Kabupaten Sikka 2018-2023

Pengukuran target capaian setiap tujuan pembangunan di Kabupaten Sikka tahun 2023 ditunjukkan dalam Tabel skor di bawah ini. Hal ini menunjukkan masih terdapat beberapa target pembangunan yang belum tercapai walaupun telah terakomodasi di dalam dokumen program dan anggaran.

Merujuk kepada kebijakan pembangunan Kabupaten Sikka target-target tersebut adalah merupakan prioritas utama di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah hingga tahun 2023.

Score card SDGs dibawah ini menunjukkan data capaian tujuan pembangunan Kabupaten Sikka. Score Carding Capaian Target-target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Kabupaten Sikka 2023 dari total 289 indikator nasional, terdapat 86 indikator SDGs yang didapatkan nilainya.

Tabel 2. 3  
Score Carding Target-target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Kabupaten Sikka

Target	SDGs	NTT	Kab. Sikka	*Keterangan
Target 1.2.1a	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	20,99	12,56	
Target 1.3.1a	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	86,34	62	
Target 1.3.1b	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	107,45	78,60	
Target 1.3.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	83,87	54,71	
Target 2.1	Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana	-	435	
Target 1.4.1(e)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	9,31	0	
Target 2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	33,5	15,3	
Target 2.2.2	prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada anak balita	-	10,5	
Target 2.2.3	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,6	69,7	
Target 3.1.1	Angka Kematian Ibu (AKI).	84,78	69	
Target 4.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	83,98	NA	
Target 3.2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	25,58	9	
Target 3.2.2	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	9,66	5,0	
Target 3.3.1	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	-	0,39	
Target 3.3.2	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	-	100	
Target 3.3.3(a)	Jumlah Desa yang mencapai eliminasi malaria.	0	60	
Target 2.g	Persentase desa yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	-	60	
Target 3.3.5(a)	Jml Desa dengan eliminasi kusta	-	90	
Target 3.3.5(b)	eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	-	95	

Target	SDGs	NTT	Kab. Sikka	*Keterangan
Target 3.4.1	persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun	30,49	27,73	
Target 3.4.2	Prevalensi tekanan darah tinggi.	-	81.847	
Target 3.4.3	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	-	51	
Target 3.5.1c	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	-	0	
Target 3.6.1	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	51	38,48	
Target 3.6.3	Total Fertility Rate (TFR).	3,2	2,60	
Target 3.7.1	Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	-	75,1	
Target 3.8.1	persentase merokok pada penduduk usia 10-18	30,49	27,73	
Target 3.9.1	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	-	95	
Target 3.9.2	persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	-	100	
Target 3.10.1	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	11	258,1 /190,4	
Target 4.1.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	NA	9,18	
Target 4.1.6	Angka Melek Huruf Usia ≥15 tahun	NA	94,98	
Target 4.9.1	Persentase pendidik pada jenjang Sekolah Dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan sertifikat pendidik	-	32,60	
Target 5.1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	-	NA	
Target 5.2.1	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	-	116	
Target 5.2.2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	-	109	
Target 5.3.1	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	9,22	NA	
Target 5.4.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah Daerah	-	31,8	
Target 5.4.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	92,72	88,81	
Target 5.5.1	Cakupan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif	-	49,02	
Target 5.7.1	Jumlah pelanggan Telepon	65	7.124	
Target 6.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan Sumber air minum layak.	83,87	74,8	
Target 6.2.1	Persentase rumah tangga dengan akses air limbah dan sanitasi layak	69,70	51,28	
Target 6.2.2	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	-	37,5	
Target 6.2.3	Jumlah desa/ kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar	-	160	

Target	SDGs	NTT	Kab. Sikka	*Keterangan
Target 6.3.1	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,82	60	
Target 7.7.1	Rasio Elektrifikasi	NA	95,6	
Target 7.7.1(a)	Konsumsi Listrik Perkapita	-	2.413	
Target 7.7.2	Persentase Rumah Tangga menggunakan Gas elpiji.	-	0,88	
Target 8.1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Perkapita	2,5	3,77	
Target 8.2.1	PDRB Perkapita	-	18.472	
Target 8.5.1	Persentase Tingkat pengangguran terbuka	3,77	2,62	
Target 8.9.1	Jumlah wisatawan manca negara.	13,490	4.568	
Target 8.9.2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	41,093	43.812	
Target 9.1.1	Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	-	8.983,12	
Target 9.1.1b	Jumlah Bandara	1	1	
Target 9.1.1c	Jumlah Dermaga Penyeberangan	22	5	
Target 9.2.2	Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur	PM	NA	
Target 9.7.1	Penduduk pengguna internet	-	51,06	
Target 10.1.1	Koefisien Gini.	0,354	0,326	
Target 10.1.3	Jumlah desa tertinggal	-	47	
Target 10.1.4	Jumlah Desa Mandiri	-	3	
Target 11.1a	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	9,31	24,37	
Target 11.2.1	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	PM	76,67	
Target 14.4.1	Jumlah luas kawasan konservasi perairan	701548,79	71.956,74	
Target 14.5.1	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	-	0	
Target 15.1.1	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	4,70	75,52	
Target 15.2.1	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	-	15	
Target 15.3.1	Proporsi luas lahan kritis dan sangat kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan di Kabupaten Sikka	0,58	13,76	
Target 16.1.1	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	-	0	
Target 16.2.1	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	-	0,12	
Target 16.3.1	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	-	NA	
Target 17.1.1	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya	-	95,11	
Target 17.1.1a	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	-	70	

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023

## 2.6 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan public, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Kebijakan Perubahan Belanja Daerah memperhatikan hal-hal berikut:

1. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas belanja daerah yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Mengalokasikan kebutuhan belanja wajib dan mengikat secara terukur dan terarah;
3. Keadaan tanggap darurat akibat bencana alam yang selalu berulang.

Tabel 2. 4 Peruntukan Anggaran Perurusan Pembangunan dan Jumlah Indikator SDGs yang dapat diintervensi

URAIAN	PAGU	%	JML INDIKATOR
<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	<b>776.514.568.797</b>	<b>31,88</b>	
Pendidikan	305.318.458.516	12,53	11
Kesehatan	330.963.646.816	13,58	22
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	94.933.018.050	3,89	43
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	29.671.820.171	1,21	44
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	9.482.944.015	0,38	6
Sosial	5.744.383.986	0,23	22
<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	<b>772.804.646.276</b>	<b>31,73</b>	
Tenaga Kerja	5.446.160.612	0,22	22
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	547.197.813	0,02	55
Pangan	2.925.586.180	0,12	11
Pertanahan	1.065.000.000	0,043	7
Lingkungan Hidup	7.750.201.533	0,31	11
Administrasi Kependudukan dan Capil	5.417.355.962	0,22	7
Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.544.423.244	0,23	22
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.632.807.241	0,52	44
Perhubungan	5.840.550.388	0,24	33
Komunikasi dan Informatika	3.248.027.085	0,13	22
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.729.432.373	0,32	7
Penanaman Modal	5.944.477.011	0,24	5
Kepemudaan dan Olah Raga	2.327.152.000	0,01	4
Kebudayaan	470.105.500	0,02	6
Perpustakaan	22.623.747.372	0,93	4
Kearsipan	13.179.895.362	0,54	
<b>Urusan Pilihan</b>	<b>551.163.374.000</b>	<b>222,63</b>	
Kelautan dan Perikanan	111.265.794.195	4,57	2
Pariwisata	5.5.002.034.177	0,21	5
Pertanian	31.828.240.900	1,31	4
Perdagangan	1.418.914.300	0,06	
Perindustrian	1.568.998.628	0,064	6
Transmigrasi	79.392.200	0,003	7
<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>	<b>334.971.956.041</b>	<b>13,8</b>	
Administrasi Pemerintahan	65.097.179.668	2,67	8
Pengawasan	4.871.080.680	0,2	6
Perencanaan	7.890.148.567	0,32	6

URAIAN	PAGU	%	JML INDIKATOR
Keuangan	319.095.929.792	13,1	6
Kepegawaian	6.015.224.432	0,25	8
Pendidikan dan Pelatihan	79.999.900	0,003	5
Penelitian & Pengembangan	11.890.653.350	0,49	
Kewilayahan	445.558.971.490	118,29	
	<b>2.435.454.545.114</b>	100	

Peruntukan anggaran di dalam tabel diatas dapat pula dilihat secara grafis di bawah ini :

Grafik 2.1

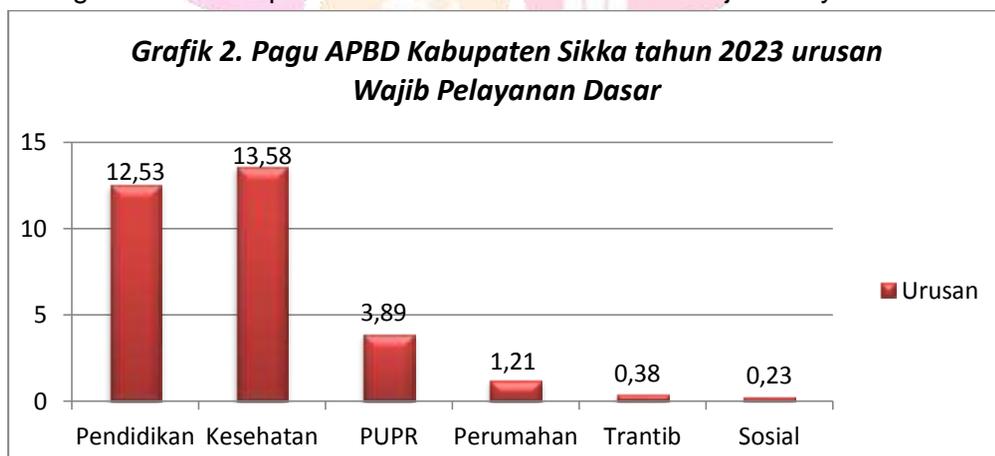
Pagu APBD Kabupaten Sikka Tahun 2023 berdasarkan urusan pembangunan



Grafik 2.1. menunjukkan bahwa keberpihakan anggaran pembangunan daerah Kabupaten Sikka untuk urusan pelayanan kebutuhan dasar manusia dialokasikan sebesar 60% lebih. Hal ini merupakan upaya peningkatan kualitas derajat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sikka mendapatkan prioritas utama sehingga selaras dengan sasaran dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dimana sektor pelayanan kebutuhan dasar menyumbang lebih banyak pencapaian indikatornya. Selain dari pada itu porsi anggaran untuk seluruh komponen penunjang pembangunan lainnya teralokasikan secara proporsional berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.

Grafik 2.2

Pagu APBD Kabupaten Sikka tahun 2023 urusan Wajib Pelayanan Dasar



Grafik 2.2. memperlihatkan prosentase anggaran untuk urusan pelayanan dasar. Urusan pendidikan 12,53%, kesehatan 13,58% menunjukkan alokasi porsi anggaran yang lebih besar dibandingkan urusan pelayanan dasar lainnya yaitu Pekerjaan Umum dan penataan ruang, Perumahan dan Kawasan pemukiman serta perumahan, keamanan ketertiban dan social. Proporsi diatas menggambarkan prioritas, fokus dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sikka sangat serius dalam hal penanganan pembangunan peningkatan kualitas hidup manusia.



## BAB III

### SDGs DAN TARGET CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN

#### KABUPATEN SIKKA TAHUN 2023

##### 3.1 Hubungan antara Dokumen RPJMD Kabupaten Sikka dan SDGs Tahun 2023

Kesepakatan (MoU) negara-negara Asia-Pasifik untuk menggunakan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagai alat ukur setiap capaian tujuan pembangunan. Pemerintah Indonesia mengatur pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan.

Terdapat 17 Tujuan dalam Pelaksanaan SDGs dengan indikator masing-masing tujuan. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan; Tujuan 2 Tanpa Kelaparan; Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera; Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas; Tujuan 5 Kesetaraan Gender; Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak; Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau; Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan; Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Berkelanjutan; Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab; Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim; Tujuan 14 Ekosistem Lautan; Tujuan 15 Ekosistem Daratan; Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Bahwa dalam 169 target dan 289 indikator SDGs menggunakan variabel dan sub variabel mendukung target capaian dan indikator kinerja program. Terdapat 86 Indikator SDGs yang termuat dalam laporan Pelaksanaan SDGs Kabupaten Sikka yang selaras dengan target capaian dan indikator kinerja program (*indikator outcome*) pada dokumen perencanaan yaitu perubahan RPJMD Kabupaten Sikka 2018 -2023. Dari 86 indikator yang terpenuhi terdapat 32 indikator yang tercapai, 35 indikator membaik/akan tercapai dan 19 indikator yang memerlukan perhatian khusus. Indikator pada laporan pelaksanaan SDGs 2023 terdapat di setiap Tujuan SDGs.

Penyusunan Laporan Evaluasi Target Capaian SDGs Kabupaten Sikka tahun 2023 menggunakan aspirasi SDGs dimana capaian setiap target pembangunan Kabupaten Sikka secara substansial telah menjawab permintaan SDGs.

T U J U A N  
TANPA  
KEMISKINAN

1



Mengakhiri Kemiskinan Dalam  
Segala Bentuk Dimanapun

## I. PENDAHULUAN

Tujuan 1 adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun, dengan target untuk penurunan angka kemiskinan, perlindungan jaminan sosial (pendidikan, sosial, ketenagakerjaan), serta pemenuhan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, energi, dan ketahanan terhadap bencana sosial maupun alam). Kemiskinan dapat berdampak sangat besar pada kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup masyarakat menggambarkan bagaimana penduduk bisa mengakses hasil pembangunan dari segi pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemiskinan menjadi masalah yang kompleks dan multi dimensi karena berkorelasi dengan kesempatan dan kesejahteraan. Kemiskinan dapat berimplikasi pada sektor-sektor lainnya, pendidikan, kesehatan, daya beli dan lain-lain. Untuk itulah pencapaian target tujuan 1 Kabupaten Sikka difokuskan pada:

- 1) Pengurangan Tingkat Kemiskinan;
- 2) Perlindungan Jaminan Sosial untuk Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
- 3) Rumah Tangga Kumuh Perkotaan;
- 4) Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Guncangan Sosial, Lingkungan dan Bencana.

## II. STATUS CAPAIAN

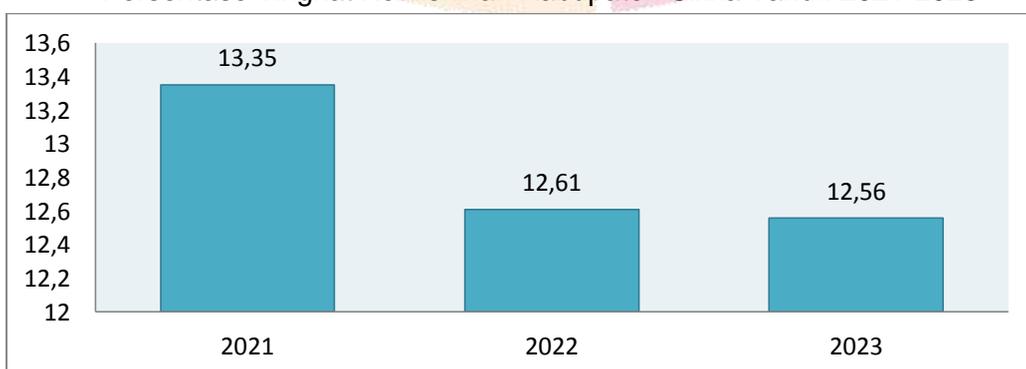
### A. Pencapaian Indikator SDGs yang menggambarkan kemajuan

#### 1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kabupaten Sikka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus membaik dengan menurunnya tingkat kemiskinan atau penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Sikka pada tahun 2021 sebesar 13,35% lalu kemudian menurun berturut-turut di dua tahun berikutnya yaitu tahun 2022 dan 2023 menjadi 12,61% dan 12,56%. Garis kemiskinan diukur dari belanja per kapita per bulan. Belanja ditentukan oleh pendapatan. sehingga perlakuan yang diperlukan haruslah memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Upaya Pemerintah Kabupaten Sikka terus mendorong sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, koperasi dan UMKM memainkan peranan yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan.. Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada grafik 1.1

Grafik 3.1.1

Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2023



Sumber : BPS Kabupaten Sikka, 2024

## 2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Sikka perlu memberikan perhatian khusus terhadap akses layanan air minum layak, mengingat data teknis perangkat daerah menunjukkan bahwa capaian tahun 2021 sebesar 41,86% lalu meningkat 2 dua tahun berturut-turut menjadi 53,51% pada tahun 2022 dan 54,71% pada tahun 2023. Lebih dari 50% penduduk telah memperoleh akses layanan air minum layak dan berkelanjutan. Namun masih ada sekitar 45,29 % penduduk termasuk penduduk dengan tingkat pendapatan terendah belum memperoleh akses layanan air minum layak.

Sanitasi layak meliputi 5 kriteria yaitu:

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan
2. Cuci Tangan Pakai Sabun
3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga
4. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Aman, dan
5. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga Aman.

Persentase Akses air minum dan sanitasi layak Kabupaten Sikka tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel 1.1.

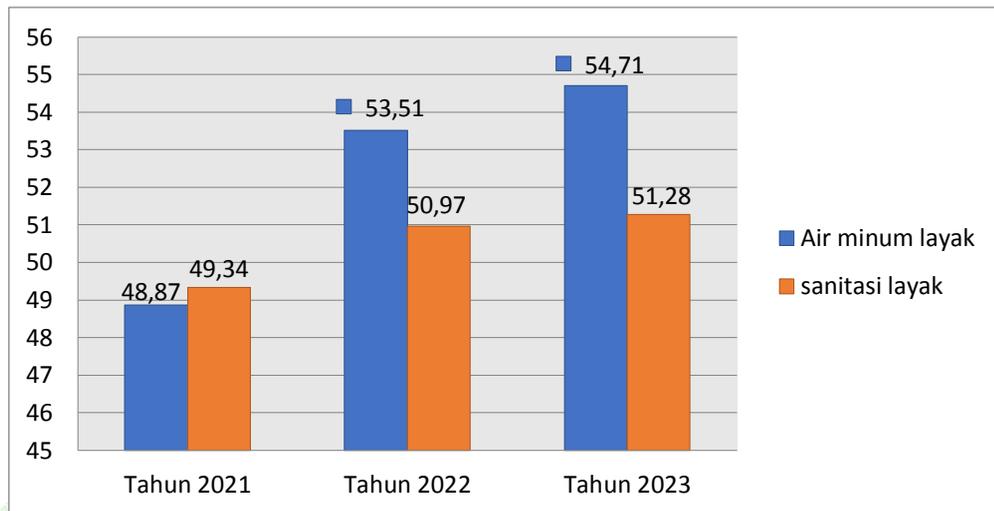
Tabel 3.1. 1  
Akses Air Minum dan Sanitasi Layak Kabupaten Sikka Tahun 2021-2023  
Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

Indikator	Satuan	Baseline (2021)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Persentase RT yang memiliki akses air minum layak	%	48,87	100	53,51	100	54,71
Persentase rumah tangga dengan akses air limbah dan sanitasi layak	%	49,34		50,97		51,28

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten Sikka Akhir Tahun 2023

Cakupan pelayanan air minum pada tahun 2022 sebesar 53,51% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 hanya tercapai sebesar 48,87%. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 4,64% Rumah Tangga yang memiliki akses air minum layak. Sejalan dengan itu, persentase rumah tangga dengan sanitasi layak juga mengalami kenaikan selama dua tahun berturut-turut pada tahun 2022 dan 2023 yaitu 50,97% dan 51,28%.

Grafik 3.1.2  
 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak Tahun 2021  
 - 2023



Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten Sikka Akhir Tahun 2023

Persentase rumah tangga yang memiliki air minum layak dan sanitasi layak pada kurun waktu 2021 – 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 rumah tangga yang memiliki akses air minum layak sebesar 48,87% dan sanitasi layak sebesar 49,34%. Kemudian pada tahun 2022 naik menjadi 53,51% untuk rumah tangga yang memiliki air minum layak dan 50,97% untuk sanitasi layak. Lebih dari 50% meningkat pada tahun 2023 yaitu 54,71% persentase rumah tangga yang memiliki air minum layak dan 51,28% sanitasi layak. Hal ini menunjukkan bahwa tersisa 45,29% rumah tangga miskin yang belum memiliki air minum dan sanitasi yang layak.

### 3. Kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia dilakukan pada berbagai tahapan kegiatan, yang berpedoman pada kebijakan pemerintah yaitu Undang-Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah terkait lainnya yang telah memasukkan Pengurangan Risiko Bencana. Kebijakan dan Regulasi terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Sikka dari tahun 2021 – 2023 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2022 target dokumen yang dihasilkan sebesar terdapat 8 dokumen dengan realisasi sebesar 8 dokumen. kemudian pada tahun 2023 menurun dari target dokumen yang dihasilkan sebesar 2 dokume dengan realisasi sebesar 2 dokumen yang terdiri dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Surat Keputusan Tanggap Darurat Bencana. Kebijakan dan regulasi terkait penanggulangan bencana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. 2  
Jumlah Kebijakan dan Regulasi Penanggulangan Bencana

Tahun	Jumlah regulasi & kebijakan	Jenis Regulasi & Kebijakan
2020	-	-
2021	8 dokumen	-
2022	2 dokumen	- Peraturan Daerah No.6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - SK Tanggap Darurat Bencana 2022

Sumber : Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, 2023

## B. Pencapaian Indikator SDGs yang perlu intervensi Khusus

### 1. Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Ketenagakerjaan pada 3 tahun berturut-turut yaitu 2020 – 2022 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 cakupan PBI 70% dari total penduduk miskin yang menerima bantuan iuran. Jumlah penduduk Sikka sebanyak 328.199 jiwa. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sebesar 68,9% dari yang ditargetkan sebesar 72%. PBI APBN tahun 2021 adalah 171.231 jiwa (52,2 % dari total jumlah penduduk Sikka), sedangkan PBI APBD tahun 2021 adalah 54.859 jiwa (16,7 % dari total jumlah penduduk Sikka) sehingga total PBI tahun 2021 adalah 226.090 jiwa (68,9 % dari total jumlah penduduk Sikka). Pada Tahun 2022 cakupan PBI mengalami kenaikan sebesar 73,2 % dari target sebesar 75%. PBI APBN tahun 2022 adalah 179.398 jiwa (54,7 % dari total jumlah penduduk Sikka), sedangkan PBI APBD tahun 2022 adalah 60.852 jiwa (18,6 % dari total jumlah penduduk Sikka) sehingga total PBI tahun 2022 adalah 240.250 jiwa (73,2 % dari total jumlah penduduk Sikka). Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.1. 3  
Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI)

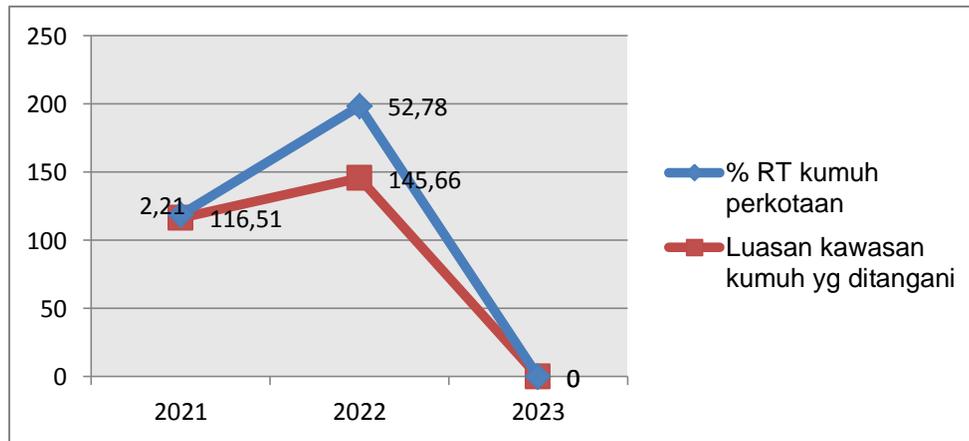
Tahun	Jumlah penerima Bantuan Iuran (PBI)	%
2021	230.200 jiwa	70%
2022	226.090 jiwa	68,9%
2023	240.250 jiwa	73,2%

Sumber : Data Dinas Sosial Kabupaten Sikka, 2023

### 2. Persentase rumah tangga kumuh perkotaan

Luasan Wilayah Kumuh berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 385/HK/2022 adalah sebesar 145,66 Ha, tersebar di Kelurahan Waioti, Beru, Kabor, Madawat, Nangalimang, Kota Uneng, Wolomarang, Hewuli, Wuring. Gambaran tentang Kawasan Kumuh Perkotaan yang Tertangani dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.1.3  
Persentase Rumah Tangga kumuh perkotaan



Sumber : DPKPP, 2024

Pada Tahun 2021 Persentase Rumah Tangga kumuh perkotaan yang tertangani sebesar 2,21% dengan Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani 116,51 Ha dengan Pengurangan Kumuh 6,28 Ha. Pada Tahun 2022 Persentase Rumah Tangga kumuh perkotaan yang tertangani sebesar 52,78% dengan Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani 145,66 Ha dengan Pengurangan Kumuh 6,28 Ha, sedangkan Pada Tahun 2023 Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan dan Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani 0 Ha dengan Pengurangan Kumuh 0 Ha.

### III. TANTANGAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sulit untuk diuraikan, apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan masih menjadi tugas berat yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka. Secara umum, tantangan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sikka adalah :

1. rendahnya akurasi basis Basisi data kelompok miskin dan rentan yang sering berubah dan cenderung bertambah.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara penanggulangan kemiskinan yang masih terbatas.
3. belum meratanya kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang kuat hingga ke level kecamatan dan desa;
4. standar operasional prosedur yang belum tersedia;
5. program-program penanggulangan kemiskinan pada masing-masing Perangkat Daerah belum terintegrasi dengan baik.

Dari aspek ketersediaan layanan air minum dan sanitasi layak menjadi hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian, guna memenuhi standar layak seperti yang dipersyaratkan dalam SDGs masih menjadi tantangan yang berat. Keterbatasan kuantitas dan kualitas air minum di wilayah perkotaan dan perdesaan masih sering dijumpai, selain itu keterbatasan sumber daya pengelolaan air minum regional memperburuk kondisi yang ada.

Tantangan lainnya terdapat pada daerah perkotaan dimana jumlah penduduk miskin perkotaan cenderung bertambah disertai dengan aktivitas perkotaan yang lebih kompleks sehingga kebutuhan akan air bersih dan air minum layak sangat diperlukan.

#### **IV. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK**

Selain tantangan tersebut, Pemerintah juga tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat baik terhadap Pendidikan terutama melalui bantuan biaya Pendidikan melalui program beasiswa prestasi dan bantuan sosial bagi pelajar yang kurang mampu sebagai bagian dari keberpihakan terhadap masyarakat.

Inovasi untuk peningkatan pengentasan rumah tangga kumuh antara lain dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2021 tentang bantuan stimulan pembangunan bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam Perbup ini bantuan stimulan diberikan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Data RTLH yang valid dapat ditemukan dalam aplikasi *Sikka Elektronik Rumah Tidak Layak Huni* (Sikka e-RTLH) yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan.

#### **V. KEBIJAKAN SELANJUTNYA**

Pemerintah Kabupaten Sikka terus mendorong upaya penanggulangan kemiskinan dengan mengalokasikan sumber daya untuk membantu keluarga miskin. Bantuan sambungan rumah untuk listrik dan air minum, tetap dilaksanakan kendati memiliki keterbatasan penganggarnya.

Penguatan kebijakan pembangunan ekonomi yang menyeluruh, berkualitas serta dilaksanakan, melalui strategi-strategi :

1. Meningkatkan kualitas data base kemiskinan, melalui Pemutakhiran data oleh Perangkat Daerah dan Badan Pusat Statistik (verifikasi dan validasi terhadap data kemiskinan) Mengakomodir kelompok masyarakat miskin yang belum terdata;
2. Mendorong adanya satu data base kemiskinan (single data) yang menjadi acuan bagi multi pihak dalam implementasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan;
3. Melakukan pemetaan dan analisis kelompok masyarakat miskin;
4. Hasil pemetaan dan analisis kelompok masyarakat miskin sangat penting untuk menetapkan intervensi program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kondisi kelompok masyarakat miskin. Pemetaan dan analisis kelompok masyarakat miskin diharapkan dapat memberikan data dan informasi kelompok masyarakat miskin yang dalam upaya penanggulangannya dapat dilakukan melalui pendekatan perlindungan dan pendekatan pemberdayaan;
5. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
6. Merumuskan program penanggulangan kemiskinan berbasis perlindungan;
7. Merumuskan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan sesuai kondisi kelompok masyarakat miskin;
8. Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tingkat

Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

9. Penyusunan Standar Operasional Prosedur penanganan pengaduan masyarakat.

Terkait kebencanaan, Pemerintah Kabupaten Sikka juga menetapkan langkah-langkah penanggulangan bencana sebagai berikut :

1. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel;
2. Penguatan upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah;
3. Peningkatan prasarana sarana mitigasi dan pengurangan risiko bencana;
4. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur penanggulangan bencana;
5. Penguatan sistem kesiapsiagaan bencana;
6. Pemberdayaan masyarakat dengan pembentukan desa tangguh bencana;
7. Peningkatan kerjasama dan kemitraan baik pada level antar daerah maupun antar lembaga; serta
8. Penguatan pelaksanaan standar pelayanan minimal layanan kebencanaan.



### Tujuan1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan

Tujuan1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan												
KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	SUMBER DATA	SAT.	2021	2022		2023		STATUS CAPAIAN	KET.
						BASE-LINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
<b>Sasaran : Pada Tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak ari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.</b>												
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 6,0-7,0%.	BPS	%	13,35	-	12,61	-	12,56		
<b>Sasaran : Menerapkan secara Nasional sistim dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada Tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan</b>												
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial: Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial menjadi 98%.	Profil Kesehatan NTT,2023	%	68,9	100	75	100	62		
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Meningkatnya cakupan kepesertaan Sistim Jaminan Sosial Nasional Bidang Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan menjadi 74,57% untuk pekerjaan informal.	Kemnaker satu Data, 2023	%	80,75	100	75,89	100	78,60		

**Sasaran 3.1 : Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro**

1.3.1.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses air minum layak menjadi 100% Tahun dasar 2020:90,21% akses layak; Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90%.	LKPJ 2024	%	48,87	100	53,51	100	54,71	
--------	--	--	--	-----------	---	-------	-----	-------	-----	-------	--

**Sasaran 4 : Pada Tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan dan bencana.**

1.4.1(a)	Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana	Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana	Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana maksimal sebesar 0,2 per 100.000 jiwa setiap tahunnya (Sumber data:RPJMN 2020-2024)	BPBD	jumlah	14.549 KK	14.549 KK	1.718 KK	3.332	435	
1.4.1(c)	Jumlah Kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana	Jumlah Kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana	Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana (kajian) sebanyak 50 dokumen	BPBD	jumlah		8	8	2	2	
1.4.1.(d)	Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan bencana dan pasca bencana	Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan bencana dan pasca bencana	Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan bencana dan pasca bencana sebanyak 55 dokumen. Tahun 2020: 246 dokumen (Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana)	BPBD	jumlah	-	-	1	-	-	

**Sasaran 5 : Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.**

1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Meningkatkan kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya dalam kerangka kebijakan mikro melalui bantuan sosial dan ekonomi produktif. Tahun dasar 2019:15,54% (Sumber data:Kementerian Keuangan)	DPKPP	%	2,21%	-	52,78%	-	0%	
-----------	--	--	--	-------	---	-------	---	--------	---	----	--

T U J U A N  
T A N P A  
K E L A P A R A N



Menghilangkan Kelaparan, Mencapai  
Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta  
Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

## I. PENDAHULUAN

Tujuan 2 adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, dengan target-target untuk menghilangkan kelaparan, menjamin akses pangan, aman, bergizi; menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi; menggandakan produktivitas pertanian. Pencapaian target tujuan 2 difokuskan pada: 1) Prevalensi Stunting, Kesehatan Ibu dan Anak; (2) Kualitas Konsumsi Pangan; dan (3) Nilai Tambah Pertanian. Kelaparan disebabkan karena kurangnya konsumsi pangan kronis. Dalam jangka panjang, kelaparan kronis berakibat buruk pada derajat kesehatan masyarakat dan menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan.

## II. STATUS CAPAIAN

### A. Pencapaian Indikator SDGs Yang Masih Memerlukan Intervensi Khusus

#### 1. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Kualitas Konsumsi Pangan yang diindikasikan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH Konsumsi dan Skor PPH Ketersediaan berdasarkan Analisa Pola Konsumsi dan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Sikka Tahun 2021-2023.

Berdasarkan data dibawah ini, dapat dijelaskan bahwa Skor PPH Ketersediaan dan Konsumsi Kabupaten Sikka Tahun 2021–2023 mengalami penurunan. Skor PPH Ketersediaan Tahun 2021 sebesar 82,67 dan pada Tahun 2022 naik menjadi 85% kemudian naik sebesar 4,5% menjadi 89,5 pada tahun 2023. Angka Kecukupan Protein Ketersediaan Kabupaten Sikka Tahun 2024 rata-rata sebesar 48 gram/kapita/hari dan rata rata angka kecukupan energi sebesar 1753 kilo kalori/kapita/hari.

Tabel 3.2 1

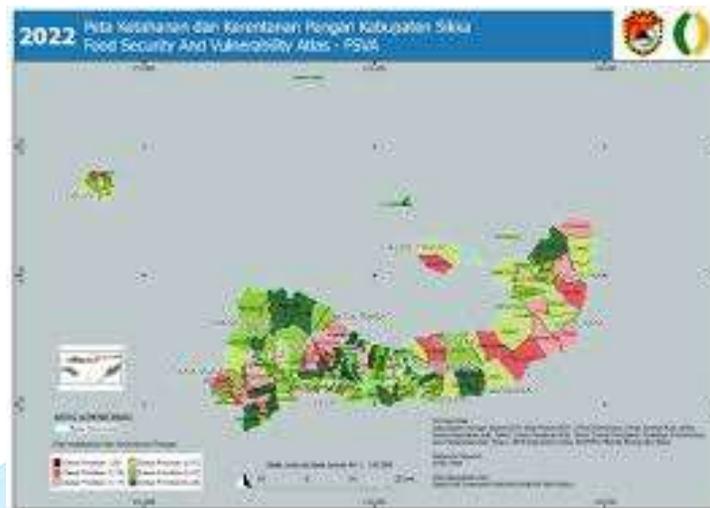
Kualitas Konsumsi Pangan yang diukur dengan Skor Pangan Harapan (PPH)

Tujuan 2. Tanpa Kelaparan						
Indikator	Satuan	Baseline 2020	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Skor PPH Ketersediaan	%	82,67	100	85	100	89,5
Skor PPH Konsumsi	%	77,42	100	77,42	100	69,7

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sikka, 2023

Skor PPH Komsumsi Kabupaten Sikka Tahun 2021 dan tahun 2022 berturut-turut sebesar 77,42 sedangkan Tahun 2023 turun menjadi 69,7. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan Kabupaten Sikka mencukupi, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau karena nilai konsumsi kita masih berada dibawah nilai ketersediaan pangan.

Gambar. 3.2.1  
Peta Ketahanan Pangan



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sikka, 2024

Indikator ini digunakan untuk mengukur besarnya penduduk yang mempunyai konsumsi energi yang sangat rendah sehingga memerlukan prioritas dalam upaya perbaikan pangan dan gizi. Di Kabupaten Sikka proporsi penduduk dengan asupan kalori per kapita sehari pada tahun 2021 sebesar 1.846 Kkal/hari kemudian berturut-turut pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 1.813 Kkal/hari dan 1.753 Kkal/hari. Umumnya wanita 19-29 tahun membutuhkan 2.250 Kkal/hari, dan wanita 30-50 tahun membutuhkan 2.150 Kkal/hari. Sedangkan pria 19-29 tahun membutuhkan 2.725 Kkal/hari, dan 30-50 tahun membutuhkan 2.625 Kkal/hari.

Skor PPH dikelompokkan mendasarkan 9 kelompok pangan yaitu: Padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula sayur dan buah, serta lain-lain. Jika dilihat berdasarkan kelompok pangan, maka padi-padian dan minyak dan lemak merupakan kelompok pangan yang telah sesuai dengan standar. Sedangkan untuk kelompok gula, sayur dan buah dan ubi-ubian, minyak dan lemak diperoleh gambaran bahwa Kabupaten Sikka masih jauh dari standar.

Tabel 3.2 2  
Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan

Tujuan 2. Tanpa Kelaparan			
Kelompok Pangan	Base line (2020)	2021	2022
Padi-padian	25,0	25,0	25,0
Umbi-umbian	1,2	1,3	2,3
Pangan hewani	15,4	10,7	10,4
Minyak dan lemak,	2,4	3,2	3,2
Buah/biji berminyak	0,4	0,8	1,8
Kacang-kacangan	5,3	1,3	1,2
Gula	0,7	1,6	23,9
Sayur dan buah	27,0	21,3	23,9

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sikka, 2023

## 2. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/ baduta

Perkembangan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 2 tahun/balita mengalami penurunan, ditunjukkan dengan meningkatnya angka prevalensi stunting 13,8 % pada 2022 menjadi 15,3 % pada tahun 2023, perolehan data bersumber dari Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPBGM). SDGs juga mensyaratkan pengukuran stunting bagi anak usia di bawah dua tahun (baduta) melalui indikator prevalensi stunting pada anak baduta. Selanjutnya dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 3.2 3  
Prevelensi Stunting Kabupaten Sikka

Tujuan 2. Tanpa Kelaparan						
Indikator	Sat	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Prevalensi Stunting anak dibawah 2 tahun	%	18,2	5	13,8	5	15,3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2023

Masih adanya kasus stunting di Kabupaten Sikka disebabkan antara lain kurangnya pengetahuan tentang pola pangan beragam, bergizi, berimbang, sehat, dan aman, pola asuh orang tua, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, risiko akibat pernikahan anak, serta kurangnya ketersediaan akses air minum layak, air bersih, dan sanitasi. Pencegahan stunting memerlukan intervensi gizi yang terpadu yang mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dengan sasaran kelompok prioritas pada lokasi prioritas. Beberapa upaya dalam rangka menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Sikka antara lain melalui perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, dan Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi dalam kerangka 1.000 HPK. Selain sasaran prioritas pencegahan stunting bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak 0-23 bulan, terdapat kategori sasaran penting yaitu anak usia 24-59 bulan, wanita usia subur (WUS), dan remaja putri.

## 3. Prevalensi Balita dengan kasus wasting dan under weight

Secara umum, kondisi wasting ditandai dengan penurunan berat badan drastis sehingga membuat bobot tubuh anak tidak sebanding dengan tinggi badannya. Penyebab wasting pada anak:

- Kurang terjangkau atau sulitnya akses ke pelayanan kesehatan, sehingga orangtua enggan memeriksakan kondisi kesehatan anaknya.
- Pemberian asupan makanan harian yang tidak memenuhi kebutuhan gizi anak.
- Kebersihan lingkungan sekitar yang buruk, termasuk sulitnya mendapatkan akses air bersih dan pelayanan kebersihan.
- Pengetahuan kurang mengenai nutrisi dan kesehatan anak.
- Pilihan sumber makanan yang sangat terbatas dan kurang beragam.

Sedangkan Balita Gizi Kurang (Underweight) adalah Status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U) yang merupakan gabungan dari istilah gizi buruk dan gizi kurang dengan Z score < -2 standar deviasi. Artinya terdapat kegagalan bayi untuk mencapai berat badan ideal, yang kemudian juga

bisa mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan, sesuai usianya, dalam jangka waktu tertentu. Gangguan ini bisa disebabkan karena bayi kekurangan energi dan zat-zat gizi yang dibutuhkan sesuai usianya. Selanjutnya dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 3.2 4  
Prevelensi Wasting dan Under Weight Kabupaten Sikka

Tujuan 2. Tanpa Kelaparan						
Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Prevalensi Balita Wasting	%	6,5	5	9,9	5	10,5
Prevalensi Balita Under weight	%	8,0	0	7	0	7,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2023

Dari data pada tabel diatas bahwa prevalensi balita wasting menunjukkan tren yang negatif pada tahun 2021 hingga tahun 2023.

#### 4. Prevalensi anemia pada ibu hamil

Kondisi di Kabupaten Sikka menunjukkan penurunan sebesar 1,65% pada tahun 2023. Jumlah ibu hamil yang mengalami anemia pada tahun 2023 sebanyak 222 orang dan tersebar dalam 25 puskesmas. Jumlah tersebut jauh lebih baik dibandingkan tahun 2022 dimana 6% ibu hamil di Kabupaten Sikka mengalami anemia. Anemia pada permepuan hamil berpotensi memberikan pengaruh terhadap kondisi kesehatan anak saat dilahirkan, termasuk salah satunya kekerdilan atau stunting.

Tabel 3.2 5  
Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil

Tujuan 2. Tanpa Kelaparan						
Indikator	Sat	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	94,1		6,0		4,35

Sumber: Profil Juknis Kesehatan Kabupaten Sikka, 2023

#### 5. Persentase Ibu Hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK)

KEK atau Kekurangan Energi Kronis merupakan kondisi dimana ketika seseorang mengalami kelelahan secara terus menerus meski telah beristirahat. KEK dapat terjadi pada ibu hamil. Terdapat kemungkinan KEK dipicu oleh stres, infeksi virus, gangguan sistem kekebalan tubuh, atau ketidakseimbangan hormon. Ibu Hamil KEK pada tahun 2023 sebanyak 621 orang dengan prevalensi sebesar 11,6%. Hal ini menunjukkan penurunan yang signifikan dari jumlah ibu hamil KEK di tahun 2022 sebesar 1.248 orang atau sebesar 22,35%.

Tabel 3.2 6  
Persentase Ibu Hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK)

Tujuan 2. Tanpa Kelaparan						
Indikator	Sat	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Persentase Ibu Hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK)	%		10	22,35	10	11,6

Sumber: Profil Juknis Kesehatan Kabupaten Sikka, 2023

### III. TANTANGAN

Pencapaian tujuan 2 memerlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Hal ini memerlukan peningkatan investasi dalam pertanian dan pembangunan pedesaan sambil juga memprioritaskan ketahanan iklim dan konservasi keanekaragaman hayati. Selain itu, hal ini menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam pertanian karena mereka memainkan peran penting dalam menjamin ketahanan pangan.

Meskipun Kabupaten Sikka dinilai cukup berhasil dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting, namun masih terdapat tantangan berat dalam hal menurunkan hingga mencapai satu digit persen angka stunting BADUTA dan BALITA. Balita stunting, wasting dan under weight beririsan dengan kemiskinan dan ketahanan pangan rumah tangga sangat berpengaruh terhadap asupan gizi anak yang dapat berakibat pada stunting. Pola asuh terutama pemberian makanan bayi dan balita mendapat tantangan yang besar dengan hadirnya makanan-makanan instan atau cepat saji yang beragam, serta buruknya kondisi lingkungan dan kurangnya akses pada fasilitas kesehatan, pemahaman terhadap pola asuh dan pola gizi berimbang dapat mempersulit penurunan stunting di Kabupaten Sikka.

Dalam penyediaan pangan berkecukupan dan berkualitas, tantangan dan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sikka antara lain: (1) Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal) dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil. (2) Konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), (3) Masih dijumpai pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat, (4) Tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya kualitas lahan produktif. (5) Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal) dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil. (6) Masuknya produk pangan dari luar dan tingginya tingkat persaingan usaha dan mempengaruhi fluktuasi harga pangan (7) Pola konsumsi masih tinggi pada konsumsi karbohidrat sedangkan konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan sangat kecil.

### IV. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

#### A. Inovasi Ketahanan Pangan

Inovasi dalam penganekaragaman Pola konsumsi berupa inovasi teknologi dalam Penganekaragaman Pangan Lestari (P2L) :

- Irigasi tetes untukantisipasi kekurangan air pada musim kemarau sehingga produksi tetap berlanjut
- Sosialisasi dan promosi melalui media masa dan elektronik.

#### B. Inovasi Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sikka

Berbagai upaya dilakukan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dalam pencegahan dan penanganan serta penurunan angka stunting di Kabupaten Sikka. Beberapa praktik baik dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Kabupaten Sikka melalui keragaman bentuk kegiatan dan media publikasi yang melibatkan pelaku lintas sektor secara konsisten, sistematis dan focus terhadap layanan sasaran prioritas stunting. Bentuknya adalah dengan Pemberian

Makanan Tambahan dan beberapa layanan pencegahan seperti pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja, Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja di sekolah-sekolah, pelayanan melalui sahabat sehat, serta pelayanan kursus perkawinan bagi calon pengantin di gereja maupun masjid. Disamping tetap melaksanakan upaya promotif, dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif, dan rehabilitatif melalui upaya penerapan paradigma sehat dengan optimalisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat/GERMAS dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); intervensi pencegahan dan penanganan stunting; peningkatan peran posyandu dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak; pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kesehatan di lingkungan masyarakat; dan mendorong pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) termasuk penuntasan Open Defecation Free (ODF); serta peningkatan peran dan keaktifan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia.

## **V. KEBIJAKAN KEDEPAN**

Adanya kegiatan Pekarangan Pangan Lestari sebagai bentuk implementasi kebijakan penganeekaragaman Pola Konsumsi Pangan.

Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan di Kabupaten Sikka dilakukan melalui perwujudan sistem logistik daerah yang menjamin ketersediaan terutama ketersediaan stok pangan yang ada di masyarakat, memperpendek rantai distribusi serta adanya pengelolaan stok melalui cadangan pangan dan stabilisasi harga, konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta mutu dan keamanan pangan segar. Melalui Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Penumbuhan dan Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Pengembangan. Kegiatan ini dilakukan dengan pendampingan oleh Penyuluh Pendamping P2KP desa dan Pendamping P2KP kabupaten, serta dikoordinasikan bersama dengan aparatur kabupaten. Selain pemanfaatan pekarangan, juga diarahkan untuk pemberdayaan kemampuan kelompok wanita membudayakan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) termasuk kegiatan usaha pengolahan pangan rumah tangga untuk menyediakan pangan yang lebih beragam.

Kelompok sasaran kegiatan ini adalah kelompok wanita yang beranggotakan minimal 15 orang yang berdomisili berdekatan dalam satu wilayah desa/kelurahan. Setiap anggota kelompok maupun penduduk desa wajib memanfaatkan pekarangan dengan menanam tanaman sumber pangan (sayuran, buah, umbi – umbian) ataupun memelihara ternak dan/atau ikan, dengan tujuan untuk mencukupi ketersediaan pangan dan gizi di tingkat keluarga atau rumah tangga. Hasil dari usaha pekarangan ini diutamakan untuk dikonsumsi oleh rumah tangga bersangkutan dan apabila berlebih dapat dibagikan/disumbangkan kepada anggota kelompok atau secara bersama – sama dijual oleh kelompok.

Setiap pekarangan rumah anggota kelompok diharapkan dilengkapi dengan sarana pembuatan pupuk kompos dari sisa – sisa tanaman dan kotoran ternak serta sisa – sisa limbah dapur untuk digunakan sendiri.

Rincian tahapan kegiatan tiap KWT pada umumnya sama, yakni :

### ❖ Pembuatan Kebun Bibit

- Pengadaan bahan pembuatan kebun bibit

- Pengadaan benih sayur – sayuran
- Pengadaan pupuk dan peralatan
- Pengadaan bahan – bahan pembuatan rak
- Pengadaan air sederhana
- ❖ Pemanfaatan pekarangan anggota kelompok
  - Pengadaan benih aneka sayur – sayuran
  - Pengadaan sarana pendukung
  - Pengadaan bahan pembuatan rak (media vertikultur)
  - Peternakan lele sebagai pendukung protein
- ❖ Pembuatan demplot
- ❖ Pertanaman
- ❖ Penanganan pasca panen



**Tujuan 2. Menghilangkan Kelaparan, mencapai Ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan**

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	SUMBER DATA	SAT	2021	2022		2023		STTS. CAPAIAN	KET.
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
<b>Sasaran 2: Pada Tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada Tahun 2025 encapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</b>												
2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita menjadi 14%.	DINKES	angka	18,2	5	13,8	5	15,3	▼	
2.2.2	prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada anak balita	prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada anak balita	Menurunnya prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada anak balita menjadi 7%.	DINKES	angka	6,5	5	9,9	5	10,50	▼	
2.2.3	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi 95,2%.	Dinas Ket Pangan	Skor	77,42	100	77,42	100	69,7	▼	

T U J U A N  
KEHIDUPAN  
SEHAT DAN  
SEJAHTERA

3

Menjamin Kehidupan yang  
Sehat dan Meningkatkan  
Kesejahteraan Seluruh  
Penduduk Semua Usia



## I. PENDAHULUAN

Tujuan 3 adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, dengan target-target untuk mengurangi rasio kematian; mengakhiri penyakit menular dan tidak menular; memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat-zat adiktif; mengurangi resiko kematian dan cedera dari kecelakaan lalu lintas; menjamin akses universal terhadap layanan Kesehatan seksual dan reproduksi; cakupan jaminan Kesehatan; serta distribusi tenaga kesehatan. Pencapaian target tujuan 3 difokuskan pada:

1. Angka Kematian;
2. Penyakit Menular dan Tidak Menular;
3. Penyalahgunaan Zat Adiktif;
4. Angka Kelahiran;
5. Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR); serta
6. Distribusi Tenaga Kesehatan.

Secara umum pencapaian tujuan ini memperlihatkan kecenderungan hasil yang positif hal ini didukung dengan standard pelayanan minimal pada sektor-sektor kesehatan.

## II. STATUS CAPAIAN

### A. Pencapaian Indikator SDGs yang mengalami kemajuan

#### 1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Sikka tahun 2021 – 2023 cenderung menurun 179 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2021 terus mengalami penurunan menjadi 166 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2022 lalu menurun kembali di tahun 2023 sebesar 97 menjadi 69 per 100.000 Kelahiran Hidup.

Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan dan perbaikan dalam sistem rujukan layanan baik di fasilitas kesehatan (faskes) pertama yaitu puskesmas maupun setelahnya yaitu fasilitas rujukan di rumah sakit.

Tabel 3.3 1  
Perkembangan AKI

Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera						
Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000 KH	179	0	166	0	69

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2023

#### 2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Trend Angka Kematian Balita di Kabupaten Sikka pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan tren yang positif yaitu sebesar 10 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) pada tahun 2021 menjadi sebesar 7 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) pada tahun 2022. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 5 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH). Capaian tersebut perlu terus dilakukan upaya penurunan AKaBA melalui strategi dan kebijakan hingga

titik terendah, mengingat masih adanya berbagai kasus kematian balita di Kabupaten Sikka. Beberapa penyebab kematian balita antara lain dikarenakan pneumonia, penyakit bawaan, diare, cedera, campak dan malaria di daerah endemis. Selain itu upaya pencegahan kematian balita juga tidak terlepas dari pola asuh, oleh sebab itu perlu upaya edukasi dan penyadaran bagi ibu/pengasuh untuk dapat menerapkan pola asuh secara benar kepada balita yang diasuhnya. Keberlanjutan pelayanan kesehatan esensial anak tetap harus terus dilakukan sebagai upaya menurunkan Angka Kematian Balita, sehingga diperlukan pendekatan yang berbeda untuk mengupayakan kelangsungan pelayanan kesehatan anak dengan bersinergi dengan seluruh pihak baik lintas program dan juga lintas sektor. Angka Kematian Balita di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel 3.3.2.

Tabel 3.3 2  
Angka Kematian Balita

Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera						
Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2022
Angka Kematian Balita (AKBa) / 1000 KH	100.000 /KH	10	0	7	0	5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2023

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Sikka periode tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan tren yang menurun, tahun 2021 menjadi 10,8 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) dan naik pada tahun 2022 naik menjadi 14 atau sebesar 3,2 % kenaikan dari tahun 2021 lalu menurun kembali pada tahun 2023 menjadi 9 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH). AKI Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel 3.3.3.

Tabel 3.3 3  
Angka Kematian Bayi

Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera						
Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	%	10,8	0	14	0	9

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2023

Meskipun capaian AKB telah menunjukkan kinerja membaik, namun upaya penurunan AKB perlu terus dilakukan mengingat masih adanya berbagai kasus kematian bayi di Kabupaten Sikka yang diakibatkan antara lain kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan berat badan lahir rendah, kelainan konginetal pada bayi dan komplikasi kehamilan serta peningkatan layanan kesehatan Ibu dan anak lainnya.

### 3. Kejadian penyakit menular (TB, Malaria, HIV/AIDS, Filariasis, dan Kusta)

Penyakit menular yang menjadi sasaran prioritas program di Kabupaten Sikka adalah TB, HIV/AIDS dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Angka kesakitan DBD (Incidence Rate/IRDBD) di Kabupaten Sikka mengalami penurunan di tahun 2023 dibanding tahun 2022 yaitu menjadi 0,8 per 100.000 penduduk

setelah tahun sebelumnya hanya di angka 0,11 per 100.000 penduduk. Sejalan dengan angka kesakitan DBD jumlah kasus DBD juga mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 822 kasus dari sebelumnya 466 kasus DBD di tahun 2022. Sementara itu penemuan kasus TB yang ternotifikasi (CNR TB) tahun 2022 sebesar 231% dan tahun 2023 sebesar 100% sehingga terjadi penurunan di tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 1,31. Harapannya penanganan TB juga kian membaik yaitu ditandai dengan naiknya angka keberhasilan pengobatan TB (SRTB) di tahun 2022 sebesar 92% namun menurun di tahun 2023 menjadi 45,6%. Standar Indikator keberhasilan pengobatan sebesar 90%.

Penemuan kasus TB semakin membaik seiring dengan dilaksanakannya deteksi dini oleh petugas Puskesmas yang langsung turun ke masyarakat.

Tabel 3.3 4  
Insiden Tuberkolosis

Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera						
Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Insiden Tuberkolosis (ITB) per 100000 penduduk	%	10,18	231	132	132	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2023

Filiariasis atau lebih dikenal dengan kaki gajah merupakan penyakit yang hampir terlupakan seiring berjalannya waktu. Pemerintah sebenarnya telah mencanangkan program eliminasi (pemberantasan) filariasis tahun 2020, namun penyakit ini masih saja dijumpai.

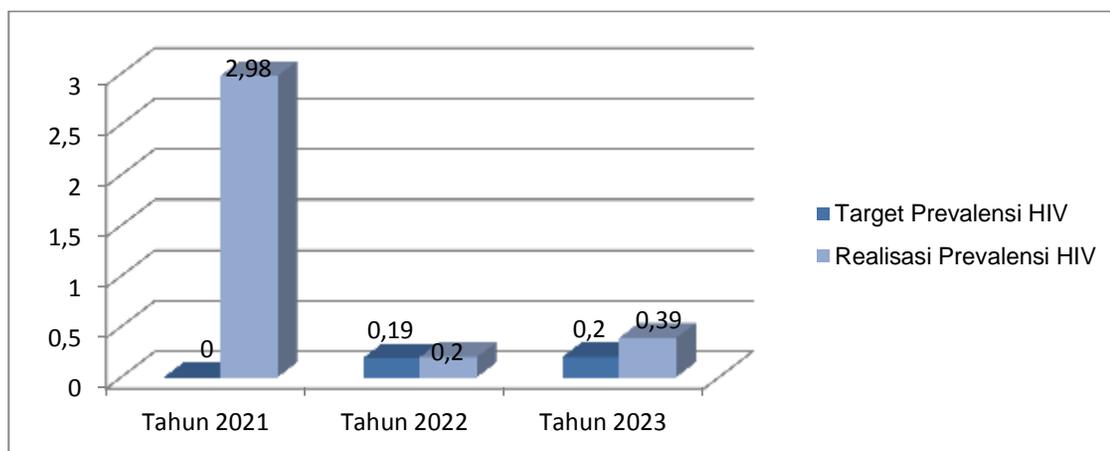
Tabel 3.3 5  
Intervensi Penyakit Tropis

Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera						
Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Jml kab/kota dgn eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Desa/Kel	160	160	160	160	95

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2023

Sedangkan Prevalensi HIV pada populasi dewasa dapat dicermati melalui diagram 3.3.1.

Grafik 3.3.1.  
Prevalensi HIV pada populasi dewasa Di Kabupaten Sikka  
Tahun 2021 s/d Desember 2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2023

Penyakit hepatitis B merupakan infeksi hati serius yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang sebetulnya dapat dicegah dengan vaksin. Namun di Kabupaten Sikka persentase deteksi dini untuk infeksi hepatitis B bervariasi karena eliminasi tidak dilakukan setiap tahun.

Tabel 3.3 6  
Desa yang Melaksanakan Deteksi Infeksi Hepatitis

Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2022	Realisasi 2022
Persentase desa yang melakukan deteksi dini untuk Infeksi hepatitis B	%	82,97	160	160		160

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2023

#### 4. Penyalahgunaan Narkotika yang Mendapat Layanan Rehabilitasi

Ancaman peredaran NAPZA juga telah menjadi isu krusial secara nasional, bahkan Indonesia pernah menetapkan “darurat narkoba” sebagai implikasi peredaran NAPZA yang semakin tak terkendali. Kelompok anak dan remaja merupakan salah satu yang menjadi sasaran korban penyalahgunaan NAPZA. Pengguna NAPZA yang berhasil ditangani oleh BNN Kabupaten Sikka telah mencapai target yang ditetapkan. Sebanyak 0 kasus penyalah guna narkoba mendapat rehabilitasi sosial yang sesuai dengan standar pelayanan dan penyalah guna narkoba mengakses layanan pasca rehabilitasi. Selain itu, sebanyak lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA telah dikembangkan atau mendapat bantuan dari BNN Kabupaten Sikka.

Tabel 3.3 7  
Penanganan Korban Penyalahgunaan Napza

Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera						
Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Jumlah penyalahguna narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Org	0	0	0	0	0

Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Org	0	0	0	0	0
Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti sesuai standar pelayanan	Org	0	0	0	0	0
Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Lemba ga	0	1	0	1	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2023

## 5. Angka Kelahiran Pada Perempuan umur 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR)

Pernikahan pada usia 15-19 tahun dapat berisiko pada kesehatan ibu maupun anak yang dilahirkan. Pernikahan dini menurut WHO (World Health Organization) adalah pernikahan sebelum usia 18 tahun, yang berlaku pada laki-laki maupun perempuan, tetapi banyak terjadi atau umum terjadi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Salah satu dampak pernikahan dini adalah terganggunya organ reproduksi pada perempuan dan apabila terjadi kehamilan, termasuk kriteria kehamilan risiko tinggi. Selain itu dapat juga berdampak pada anak yang dilahirkannya. Kecenderungan semakin dini usia ibu menikah, maka semakin meningkatnya persentase terjadinya anak pendek dan gizi kurang. Hal ini karena pada masa remaja terjadi puncak pertumbuhan massa tulang (peak bone mass/PBM) yang menyebabkan kebutuhan gizi pada masa ini lebih tinggi dibandingkan pada fase kehidupan lainnya. Apabila terjadi kehamilan di usia remaja, maka akan menyebabkan organ reproduksi perempuan belum siap untuk menerima kehamilan dan melahirkan sehingga dapat membahayakan ibu maupun bayi.

Tabel 3.3 8  
Age Spesific Fertility Rate (ASFR)

Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera						
Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Angka Kelahiran Pada Perempuan umur 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR)	%	13,8	12,40	12,1	12,40	19,7

Sumber : DP2KBP3A Kabupaten Sikka, 2023

Angka Kelahiran Pada Perempuan umur 15-19 tahun pada tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2020 – 2022 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021 sebesar 13,8% perempuan usia 15-19 tahun yang melahirkan anak dan menurun 1,7% pada tahun 2022 menjadi 12,1%. Namun melonjak naik kembali pada tahun 2023 sebesar 19,7%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 1000 kelahiran, 19 diantaranya dilahirkan oleh ibu yang berusia 15 – 19 tahun. Dampaknya pada usia 15-19 tahun merupakan masa sekolah tingkat menengah atas sehingga organ reproduksinya belum sepenuhnya sempurna dan kecenderungan melahirkan anak yang berisiko stunting.

## B. Pencapaian Indikator SDGs yang perlu penanganan serius

### 1. Angka Kematian Neonatal (AKN)

Angka Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/Neo Natal Death Rate) adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Kematian neonatal dapat diakibatkan oleh kelainan perinatal kehamilan berisiko tinggi seperti asfiksia, kelahiran bayi dengan berat badan yang rendah, dan trauma kelahiran. Derajat kesehatan neonatal sangat erat kaitannya dengan kesehatan ibu selama kehamilan, pengetahuan ibu dan keluarga tentang pentingnya pemberian perawatan antenatal serta perawatan bayi baru lahir dan ketersediaan fasilitas kesehatan.

Tabel 3.3 9  
Angka Kematian Neonatal (AKN)

Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera						
Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Angka kematian Neonatal	Per 1000 KH	3,3	0	4,6	0	5,0

Sumber : Profil Juknis Kesehatan Kabupaten Sikka, 2023

Angka kematian neonatal pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami tren yang negatif. Pada tahun 2021 AKN berada di angka 3,3 per 1000 kelahiran kehidupan kemudian mengalami kenaikan berturut-turut pada tahun 2022 dan tahun 2023 menjadi 4,6 per 1000 kelahiran kehidupan dan 5,0 per 1000 kelahiran kehidupan. Hal ini dikarenakan usia ibu saat hamil, paritas, dan jarak kelahiran. Selain faktor tersebut ada faktor lain yang juga dapat mempengaruhinya, antara lain: ibu-ibu jarang memeriksakan kandungan, hamil di usia muda, jarak yang dengan kehamilan sebelumnya terlalu dekat, hamil di usia tua, ibu dan bayi kekurangan gizi, makanan yang dikonsumsi oleh ibu kurang higienis, serta fasilitas sanitasi dan higienitas yang kurang memadai.

### 2. Total Fertility Rate (TFR)

Kepadatan penduduk berkorelasi dengan permasalahan sosial yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kepadatan dan jumlah penduduk sangat erat kaitannya dengan tingkat kelahiran atau fertilitas. Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk maka dilaksanakan program pengendalian penduduk salah satunya melalui Keluarga Berencana (KB). Keberhasilan program KB dapat diukur melalui Total Fertility Rate (TFR). Pada rentang waktu tahun 2021 hingga 2023 capaian TFR berhasil melampaui target sebesar 2,47.

Tabel 3.3 10  
Total Fertility Rate

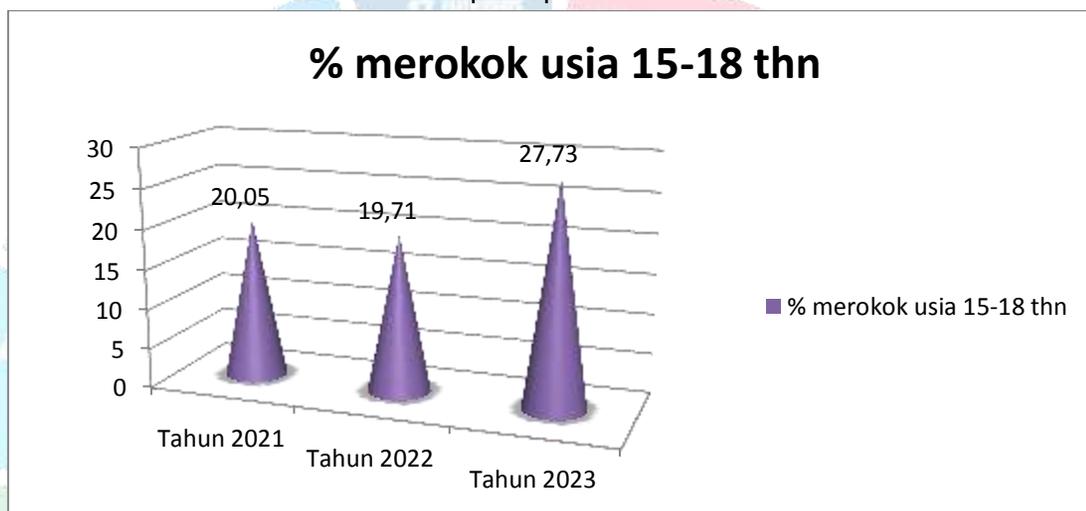
Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera						
Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Total Fertility Rate (TFR)	%	1,90	2,47	2,60	2,47	2,60

Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Sikka, 2023

### 3. Persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun

Kebiasaan merokok menjadi masalah bagi semua orang, termasuk remaja dan anak-anak. Hal ini didukung oleh peningkatan angka merokok antara usia 10 dan 18 tahun. Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik menyebutkan, persentase merokok pada usia kurang dari 18 tahun untuk laki-laki adalah 7,14 persen dan perempuan 0,09 persen, dengan persentase merokok tertinggi ada pada kelompok usia 16 –18 tahun. Hal yang perlu menjadi perhatian bahwa perokok dewasa memulai kebiasaan merokok pada masa remaja. Tren persentase merokok pada remaja dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.3.2  
Persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun



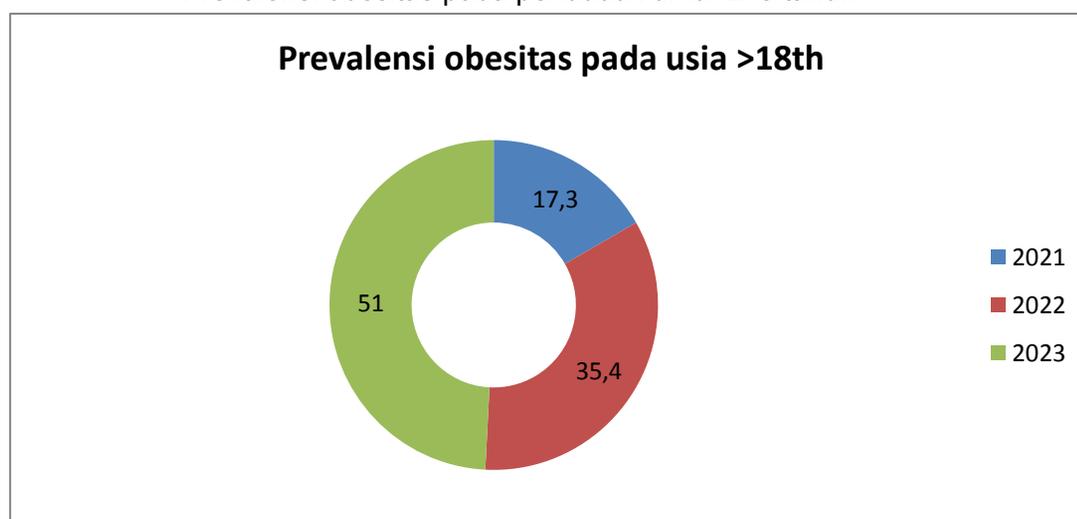
Sumber : BPS Provinsi NTT, 2023

Persentase merokok pada usia remaja (15 -19 tahun) cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021 sebesar 20,05% usia 15 – 19 tahun menjadi perokok. Kemudian menurun sebesar 0,34 menjadi 19,71% pada tahun 2022. Puncaknya pada tahun 2023 melonjak naik kembali menjadi 27,73% remaja usia 15-19 tahun menjadi pecandu rokok. Perilaku merokok remaja dipengaruhi oleh aspek lingkungan tempat tinggal remaja, kerabat/teman termasuk keluarga.

### 4. Prevalensi obesitas pada penduduk umur $\geq 18$ tahun.

Jumlah penduduk dewasa (usia di atas 18 tahun) di Indonesia yang mengalami obesitas mengalami peningkatan. Berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) Kementerian Kesehatan, sekitar 25,8 persen penduduk dewasa tergolong obesitas pada tahun 2021. Akibat kelebihan berat badan ini menimbulkan sejumlah penyakit kardiovaskular, seperti jantung dan darah tinggi. Selain itu, obesitas berkaitan erat dengan penyakit diabetes. Selain masalah kesehatan, jika tidak ditangani dengan tepat, obesitas dapat berdampak terhadap produktivitas masyarakat. Berikut diagram prevalensi obesitas pada penduduk umur  $\geq 18$  tahun tahun 2021-2023.

Grafik.3.3.3  
Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun



Sumber : BPS Provinsi NTT, 2023

Tren prevalensi obesitas pada usia > 18 tahun semakin naik pada tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2021 angka prevalensi obesitas sebesar 17,3% kemudian naik berturut-turut menjadi 35,4% pada tahun 2022 dan 51% pada tahun 2024. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka obesitas yaitu dengan diterapkannya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Sahabat Sehat.

### III. TANTANGAN

Dalam rangka menurunkan AKI dan AKB, pemerintah terus berupaya dengan memastikan bahwa setiap ibu memiliki akses dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, perawatan masa nifas bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan apabila terdapat komplikasi, serta pelayanan KB namun masih dihadapkan pada tantangan antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
2. Peningkatan pengetahuan ibu tentang perawatan antenatal dan pengasuhan anak;
3. Peningkatan peran masyarakat melalui penguatan usaha kesehatan seperti Posyandu.

Kesehatan reproduksi menjadi salah satu penentu kualitas SDM yang dihasilkan. Maka pentingnya kualitas reproduksi hendaknya dipahami dengan baik oleh ibu, calon ibu dan perempuan. Tantangan yang dihadapi adalah:

1. Peningkatan partisipasi pendidikan perempuan untuk mencegah pernikahan dini;
2. Penggunaan MKJP untuk mengatur kelahiran; dan
3. Peningkatan peran Tri Bina dan UPPKS guna mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

### IV. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

#### A. Inovasi Daerah

Pemerintah daerah Kabupaten Sikka memiliki inovasi untuk peningkatan layanan Kesehatan melalui “Sahabat Sehat” serta pelayanan terhadap Kesehatan ibu

hamil melalui “H3Center”. Program Sahabat Sehat yang digalakkan pemerintah Indonesia, turut dijalani oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Kewapante Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur (NTT). Model pendekatan pada 2 puskesmas ini kemudian diperluas pada seluruh puskesmas se Kabupaten Sikka. Inovasi tersebut menjadi model pendekatan kesehatan dari hati di masyarakat. Keberhasilan inovasi tak hanya dengan model pendekatan ke masyarakat saja, tapi juga ke komitmen tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Inovasi Sahabat Sehat menjadi model pelayanan kesehatan masyarakat melalui pendekatan keluarga. Mengambil bahasa lokal Sikka, filosofi Sahabat Sehat adalah melakukan pemeriksaan (logulowot), datang secara rutin (lakolalong), sambil berbincang ringan (bibobabong), dan mencari solusi (kulakameng). Ada banyak manfaat dari program Sahabat Sehat tersebut, seperti mampu mempertahankan kesehatan keluarga, agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi, sumber data Puskesmas dan lintas sektor dan deteksi dini penyakit atau masalah kesehatan di masyarakat. “Upaya preventif dan promotif terintegrasi, serta kemandirian keluarga dan masyarakat dalam mengatasi masalah Kesehatan. Sedangkan terkait “H3Center” merupakan pendekatan yang mewajibkan setiap ibu hamil untuk selalu mengakses tenaga Kesehatan dan fasilitas Kesehatan, mulai dari pemeriksaan pertama (k1) sampai pemeriksaan terakhir (k4). Melalui pendekatan ini, setiap ibu hamil sudah harus berada 5 hari sebelum melahirkan di fasilitas Kesehatan dengan memanfaatkan rumah tunggu kelahiran sambil dilayani petugas Kesehatan serta 2 hari pasca melahirkan, ibu dan bayi baru lahir sudah bisa Kembali berkumpul Bersama keluarga.

Selain itu terdapat program Integrasi Layanan Primer (ILP) yang dapat mempercepat upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Anak dan juga stunting di Kabupaten Sikka yang difasilitasi oleh AUSAID MOMENTUM. Integrasi Layanan Primer ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; mempercepat perbaikan gizi masyarakat; memperbaiki pengendalian penyakit; Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan memperkuat sistem kesehatan dan pengendalian obat dan makanan. Terdapat enam (6) Transformasi Kesehatan di Indonesia yang harus dijalankan yakni: Transformasi Layanan Primer; Transformasi Layanan Rujukan; Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan; Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan; Transformasi SDM Kesehatan dan Transformasi Teknologi Kesehatan. 3 fokus Integrasi Layanan Primer (ILP) yakni pertama, Siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan sekaligus sebagai fokus penguatan promosi dan pencegahan.

Kedua, Mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun, termasuk untuk memperkuat promosi dan pencegahan serta resiliensi terhadap pandemic. Ketiga, Memperkuat Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) melalui pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa, serta kunjungan rumah dengan konsep Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).

## **B. Praktek Baik**

Praktek baik yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Sikka salah satunya yaitu bekerja sama dan bergandengan tangan bersama tokoh-tokoh agama khususnya Keuskupan Maumere untuk sama-sama menurunkan Angka

Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan stunting. Beberapa kerjasama yang telah dilakukan pemerintah daerah dan keuskupan Maumere yaitu penyelarasan tujuan, program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 5 tahunan Keuskupan Maumere dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemereintah Daerah. Salah satu pengaplikasiannya yaitu adanya katakese terkait stunting pada lingkungan-lingkungan dan Komunitas Basis Gereja (KBG) disertai pemberian PMT pada anak-anak.

## V. KEBIJAKAN KEDEPAN

Arah kebijakan yang diambil untuk menuju kehidupan sehat dan sejahtera sejalan dengan tujuan 3 SDGs antara lain: Peningkatan upaya penerapan paradigma sehat melalui optimalisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat/GERMAS dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); Peningkatan peran dan keaktifan Tri Bina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia; Peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan melalui standarisasi pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan; peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dengan pengembangan teknologi informasi; peningkatan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat melalui aksi-aksi dan bakti sosial dan aksi penanganan cepat termasuk penyediaan RS Lapangan dalam rangka mendukung penanggulangan bencana dan Kejadian Luar Biasa sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM); Peningkatan dan pemerataan prasarana sarana kesehatan, serta sumberdaya kesehatan melalui pembangunan rumah sakit pratama di Doreng,; peningkatan sarana prasarana kesehatan dan farmasi; serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.



### Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABIUPATEN	SASARAN TPB 2-24 (PERPRES 111/2022)	SUMBER DATA	SAT	2021	2022		2023		STATUS CAPAIAN	KET
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
<b>Sasaran 1: Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.</b>												
3.1.1	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurunnya angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup menjadi 183. Tahun dasar 2015: 305 (Sumber data: Survei Penduduk Antar Sensus 2015).	DINKES	100.000 / KH	179	0	166	0	69		
3.1.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi 95%. Tahun dasar 2020: 87, 91 % (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	DINKES	%	88	100	89,5	100	90		
<b>Sasaran 2: Pada Tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Keahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.</b>												
3.2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) menjadi 16. Tahun dasar 2017: 24 (Sumber data: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017).	DINKES	%	10,8	0	14	0	9		
3.2.2	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurunnya angka kematian neonatal per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) menjadi 10. Tahun dasar 2017: 15 (Sumber data: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017).	Profil Kesehatan NTT	1.000/KH	3,3	0	4,6	0	5,0		

<b>Sasaran 3 : Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.</b>												
3.3.1	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurunnya insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) menjadi 0,18. Tahun 2020:0,81 (Sumber data:Kementerian Kesehatan)	Profil Kesehatan NTT, 2023	%	2,98	0,19	0,20	0,20	0,39		
3.3.2.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per100.000 penduduk.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurunnya insidensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk menjadi 190.	Profil Kesehatan NTT, 2023	per 100.000 penduduk	118	231	132	132	100		
3.3.3.(a)	Jml kab/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Jumlah Desa yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria menjadi 405.	Dinkes	Desa	160	160	0	160	60		
3.3.4.	Persentase kab/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Persentase desa yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Menurunnya insidensi Hepatitis B menjadi 1,09%.	Dinkes	%	82,97	160	160		160		
3.3.5 (a)	Jml provinsi dengan eliminasi kusta	Jml Desa dengan eliminasi kusta	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta menjadi sebanyak 514.	Profil Juknis Kesehatan NTT	Desa	160	160	0	160	90		
3.3.5.(b)	Jml kab/kota dgn eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Meningkatnya jumlah kabupaten /kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi menjadi 190.	Dinkes	Desa/Kel	160	160	0	160	95		
<b>Sasaran 4: Pada Tahun 2030, mengurangnya hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan</b>												
3.4.1.	persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun	persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun	Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun menjadi 8,7%. Tahun dasar 2018:9,1% (Sumber data:Riset Kesehatan Dasar 2018)	BPS Provinsi NTT	%	20,05		19,71		27,73		
3.4.2	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Tidak Meningkatnya pevalensi tekanan darah tinggi, dengan target sebesar 34,1%. Tahun	Dinkes	kasus	28.604 28.604		79.497 79.497		81.847		

			dasar 2018:42,1% (Sumber data:Riset Kesehatan Dasar 2018)										
3.4.3	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Tidak Meningkatnya pevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 Tahun, dengan target sebesar 21,8%. Tahun dasar 2018:42,1% (Sumber data:Riset Kesehatan Dasar 2018)2019:467	Profil Juknis Kesehatan NTT	%	17,3		35,4		51			
<b>Sasaran 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalagunaan zat, termasuk penyalagunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan</b>													
3.5.1 (c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Meningkatnya jumlah penyalagunaan napza yang mendapatkan pelayanan reahabilitasi medis menjadi 11.500.		BNN	Orang	0	0	0	0	0		
<b>Sasaran 3.6 Pada Tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.</b>													
3.6.1.	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)menjadi 63,4% (Tahun dasar 2017:57,2%), serta menurunnya persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need KB) menjadi 7,4% (Tahun dasar 2017: 10,6%). Sumber data: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017)	DP2KBP3A	%	71,03	65,91	38,48	65,91	38,48			
3.6.2	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific	Menurunnya angka kelahiran remaja (Age Specific Fertility Rate/ASFR) umur 15-19 tahun menjadi 18, Tahun dasar	DP2KBP3A	Kelahiran per 1000 perempuan	13,8	12,40	12,1	12,40	19,7			

		Fertility Rate/ASFR).	2017:36% Sumber data: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017)		an (15-19 tahun)								
3.6.3.	Total Fertility Rate (TFR).	Total Fertility Rate (TFR).	Menurunnya angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) menjadi 2,1. Tahun dasar 2017:2,41 Sumber data: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017)	DP2KBP3A/B PS	Jml anak/W US (15-49 tahun)	1,90	2,47	2,60	2,47	2,60			
<b>Sasaran 3.7 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang</b>													
3.7.1	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkatnya cakupan penerimaan Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40 persen penduduk berpendapatan terbawah menjadi 112,9 juta penduduk. Tahun dasar 2020: 93,95 juta penduduk (Sumber data: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)	Dinsos	%	68,9	75	73,2	73,2	75,1			
<b>Sasaran 3.8: Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di eluruh negara sebagai langkah yang tepat</b>													
3.8.1	persentase merokok pada penduduk usia 10-18	persentase merokok pada penduduk usia 10-18	Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun menjadi 8,7%. Tahun dasar 2018:9,1% (Sumber data: Riset Kesehatan Dasar 2018)	BPS Provinsi NTT	%	20,05		19,71		27,73			
<b>Sasaran 3.9 : Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration ten tang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan</b>													

3.9.1	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkatnya persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan menjadi 90%. Tahun dasar 2020:70% (Sumber data: Kementerian Kesehatan)	Dinkes	%	95.0	100	84,7	100	95		
3.9.2	persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Meningkatnya persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial menjadi 96%; tahun dasar 2020:92,12% (sumber data:kementrian kesehatan)	Dinkes	%	90	100	100	100	100		
<b>Sasaran 3.10: Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.</b>												
3.10.1	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkatnya persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar menjadi 83%.	Tenaga kesehatan/1000 pend	Profil Kesehatan NTT,2023	248,1/190,4	248,1/90,4	256,2/190,4	248,1/190,4	258,1/190,4		

T U J U A N  
P E N D I D I K A N  
B E R K U A L I T A S

4



## I. PENDAHULUAN

Pendidikan tidak hanya berperan menciptakan generasi muda sebagai agent of change yang membawa perubahan, namun generasi muda harus bisa menjadi agent of producer yang mampu menciptakan perubahan yang nyata. Pendidikan harus bisa menjadi patron bukan hanya dalam hal pendidikan formal tapi yang dimaksud adalah pendidikan yang mampu mengubah pola pikir anak bangsa dan pendidikan inovatif yang mendorong kreativitas dan daya inovatif anak bangsa. Generasi muda sebagai agen inovasi yang dapat memberikan kontribusi penting dan signifikan untuk menerapkan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan yang aplikatif.

Tujuan 4 adalah menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, dengan target-target untuk menjamin semua anak usia sekolah mendapatkan layanan dan fasilitas pendidikan; Pencapaian target tujuan 4 Kabupaten Sikka difokuskan pada:(1) Angka Partisipasi dan (2) Kualitas Tenaga Pendidik.

## II. STATUS CAPAIAN

### A. Pencapaian Indikator SDGs yang Mengalami Kemajuan di bidang pendidikan

#### 1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk umur $\geq 15$ tahun

Rata-rata Lama Sekolah adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat. Angka RRLS penduduk usia  $\geq 15$  tahun pada tahun 2021 hingga 2023 kian meningkat. Pada Tahun 2021 angka RRLS sebesar 8,24 yang berarti tahun maksimal menamatkan pendidikan adalah 8 tahun atau di jenjang kelas delapan (8) Sekolah Menengah Pertama. Kemudian naik pada tahun 2022 menjadi 8,67 dan tahun 2023 sebesar 9,18. Artinya pada tahun 2023 jenjang pendidikan yang diselesaikan rata-rata penduduk usia  $\geq 15$  tahun adalah kelas Sembilan (9) Sekolah Menengah Pertama. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk umur  $\geq 15$  tahun adalah sebagai berikut

Tabel 3.4. 1  
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk  $> 15$  Tahun

Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas untuk Semua						
Indikator	Satuan %	Baseline 2021	Target 2022	R ealisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk umur $\geq 15$ tahun	Angka	8,24		8,67		9,18

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka, Tahun 2023

#### 2. Persentase angka melek aksara penduduk umur $\geq 15$ tahun

Angka Melek Aksara/Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Melek Aksara/huruf merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Tabel 3.4. 2

Persentase Angka Melek Aksara penduduk umur &gt; 15 tahun tahun 2021-2023.

Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas untuk Semua						
Indikator	Satuan %	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	%	8,24		8,67		9,18

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka, Tahun 2023

Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel 3.4.2. Angka melek aksara mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 8,24% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan mengalami puncak kenaikan pada tahun 2023 menjadi 9,18%. Hal ini menunjukkan bahwa Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

## B. Pencapaian Indikator SDGs yang butuh Intervensi Khusus di bidang pendidikan

### 1. Persentase pendidik yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan sertifikat pendidik

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas proses dan hasil pendidikan, antara lain kurikulum, guru, sarana dan prasarana pendidikan, lingkungan, manajemen pendidikan, serta potensi anak itu sendiri. Namun dari berbagai faktor itu, guru dapat dikatakan sebagai faktor kunci dalam keberhasilan pendidikan. Latar belakang pendidikan guru ternyata juga berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran di kelas. Memiliki kualifikasi akademik minimal terus didorong agar memenuhi standar seorang pendidik sesuai amanat undang-undang. Untuk itu diperlukan peningkatan efektivitas undang-undang tentang guru sebagai instrumen perbaikan kualitas guru. Jika hal ini dijalankan dengan benar, upaya yang tengah dilakukan untuk meningkatkan kualifikasi akademik guru ke tingkat D-IV atau S-1 akan berpengaruh signifikan pada peningkatan mutu pendidikan. Persentase pendidik yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan sertifikat pendidik adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. 3

Persentase pendidik yang memiliki ijazah D-IV atay S1 dan sertifikat pendidik

Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas untuk Semua						
Indikator	Satuan %	Baseline 2021	Target 2022	Realiasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Persentase pendidik pada jenjang SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan sertifikat pendidik	%	30,42		31,95	46,88	32,60

Persentase pendidik pada SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan sertifikat pendidik	%	27,95		29,9	72,27	33,36
--	---	-------	--	------	-------	-------

Sumber : Data Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, 2023

Data pendidik yang memiliki ijazah S1 atau D-IV pada Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2023 sebesar 32,60% dari yang ditargetkan sebesar lebih dari 40%. Sedangkan untuk pendidik yang memiliki ijazah S1 atau D-IV pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2023 sebesar 33,36% dari yang ditargetkan sebesar 72%.

### III. TANTANGAN

Usia sekolah yang putus atau tidak bersekolah. Data Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka pada tahun 2022, menunjukkan masih terdapat 34.310 anak putus sekolah usia 7 -12 tahun, 15.930 anak putus sekolah usia 13-15 tahun dan 15.605 anak putus sekolah usia 16-18 tahun. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Sikka untuk mencari akar permasalahan penyebab putus sekolah. Apakah faktor ekonomi /biaya sekolah yang menjadi alasan utama penyebab putus dan tidak sekolah, atau mungkin disebabkan faktor geografis dan kesadaran masyarakat yang lebih dominan.

Namun demikian Pemerintah Kabupaten Sikka terus berupaya untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) dan anak putus sekolah (DO) melalui kerjasama lintas sektor dan multi pihak. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga bukan satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak usia sekolah, namun keterlibatan Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bahkan instansi vertikal yaitu Kementerian Agama juga bertanggung jawab terhadap permasalahan ATS dan DO.

Tantangan lain dalam pencegahan dan penanganan ATS adalah akses pendidikan bagi anak-anak rentan seperti miskin, berhadapan dengan hukum, anak terlantar, pernikahan dini, pekerja anak bahkan penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus. Di samping itu, implementasi sekolah inklusi di Kabupaten Sikka juga belum optimal, dikarenakan fasilitas pendukung di sekolah umum belum memadai serta ketersediaan guru pendamping khusus yang masih minim. belum optimal, terutama dalam hal keselarasan antara lulusan yang dihasilkan oleh sekolah kejuruan dengan dunia usaha dan industri.

Partisipasi pendidikan usia dini di Kabupaten Sikka juga masih rendah, dikarenakan beberapa penyebab antara lain : minat orang tua dan kemampuan biaya untuk menyekolahkan anak ke PAUD masih kurang; faktor lingkungan dan budaya yang kurang mendorong pada pendidikan anak usia dini; masih cukup banyak lembaga PAUD yang belum memperoleh akreditasi; serta guru PAUD yang berkualifikasi masih kurang. Tantangan lain yang dihadapi dalam upaya mengakhiri kemiskinan ekstrim melalui peningkatan kualitas akses pendidikan, melalui penjaminan mutu dan peningkatan akses pemerataan pendidikan yakni kurangnya sumberdaya Pendidik dan Tenaga Kependidikan; masih kurangnya ketersediaan dan keterjangkauan daya dukung pengembangan kurikulum dan digitalisasi sekolah; belum meratanya kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana akses dan peningkatan mutu pembelajaran; dan masih rendahnya pendanaan pembiayaan operasional penyelenggaraan baik disatukan pendidikan

negeri maupun pendidikan swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat/  
badan hukum lainnya.



#### IV. INOVASI DAN PRAKTEK BAIK

Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga telah berupaya melakukan Inovasi untuk menjawab berbagai tantangan terkait upaya peningkatan kualitas bidang pendidikan. Tahapan yang sedang dilakukan adalah tahapan inisiasi yang disulkan melalui proposal Inovasi Daerah Kabupaten Sikka dengan Konsep atau nama inovasi “Gerakan Sikka Belajar.” Inovasi ini di usulkan melalui Inovation Government Award Tahun 2023 dan difasilitasi oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan dan Penelitian Kabupaten Sikka.

Gerakan Sikka Belajar adalah suatu kegiatan edukatif yang mengakomodasi berbagai jenis kegiatan meliputi literasi, olimpiade sains dan olahraga serta seni budaya lokal sebagai bagian dari proses internalisasi nilai bagi peserta didik pada seluruh jenjang pendidikan.

Tabel 4. 1  
Implementasi Program Gerakan Sikka Belajar

	Indikator	Kegiatan
1.	Literasi	Gerakan wajib jam membaca (Pukul 16.00--19.00WITA)
2.	Olimpiade Sains dan Olahraga	Olimpiade sains (Matematika, IPA dan IPS) Tingkat Sekolah, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten
		Turnamen I Pertandingan Olahraga Futsal, Bola Kaki, Bola Voli dan jenis olahraga lainnya di tingkat Sekolah, Kecamatan dan Kabupaten
3.	Seni Budaya	Penerapan Muatan Lokal Deni Budaya Sikka
		Pameran, Festival dan Perlombaan Seni Budaya Lokal Kabupaten Sikka (Seni Tari, Seni Musik, Seni Suara Seni Kerajinan Tangan)

Sumber : Dinas Penndidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Sikka, Tahun 2022

Adapun tahapan inovasi Gerakan Sikka Belajar (GSB) meliputi :

Inisiatif : Januari - September

Uji coba : Oktober - Desember

Penerapan : Januari 2023

Inisiator Inovasi : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Sikka, tahun 2023

Jenis Inovasi Daerah : Non Digital

Bentuk Inovasi Daerah: Inovasi Pelayanan Publik Bidang Pendidikan

Selain itu, dengan adanya penerbitan Peraturan Bupati No. 51/2022 tentang Standarisasi PAUD HI, serta Keputusan Bupati No. 379/2023 tentang penetapan Gugus Tugas PAUD HI, dimana ketiga peraturan perundangan tersebut merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kab. Sikka dalam mempersiapkan Generasi Emas 2045. Adanya standarisasi layanan mulai dari Tingkat Pratama, Madya, Purnama, dan Mandiri diterapkan pemda untuk penilaian PAUD HI adalah inovasi yang belum dilakukan di daerah lainnya yang patut dicontoh. 3 (tiga) satuan PAUD yang menjadi percontohan layanan PAUD HI dengan Status Layanan Mandiri adalah TK Negeri Pembina Maumere, Pos PAUD Sayang Anak, dan Kelompok Bermain Flos Carmeli.

## V. KEBIJAKAN KEDEPAN

Sejalan dengan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, maka kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten Sikka antara lain meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana, insentif pendidikan serta manajemen kependidikan yang berkualitas dengan standar pelayanan minimal bidang pendidikan yang terdiri dari :

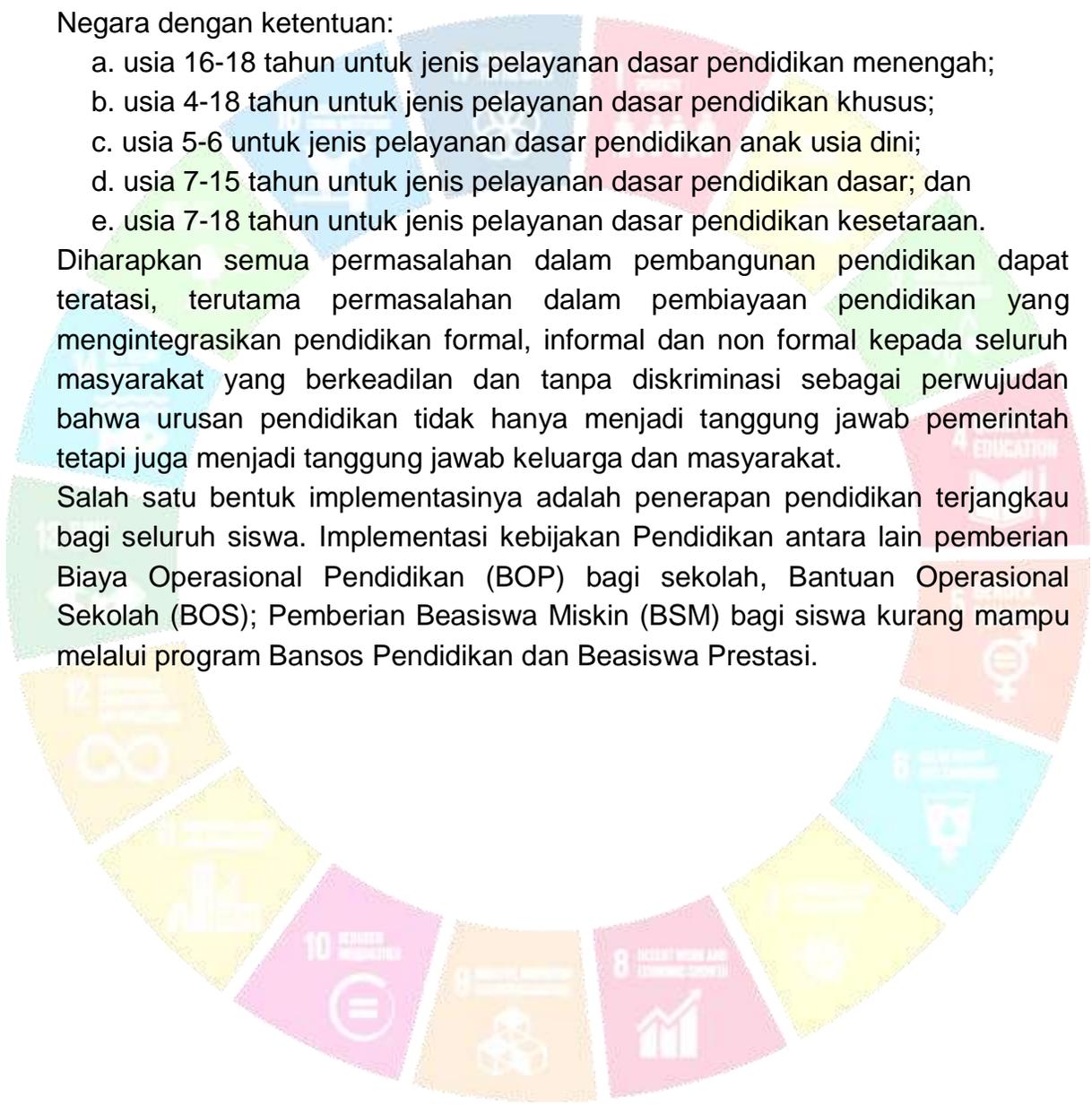
Pelayanan dasar Pendidikan daerah yang terdiri dari pendidikan anak usia dini; pendidikan dasar; dan pendidikan kesetaraan.

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. usia 16-18 tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan menengah;
- b. usia 4-18 tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan khusus;
- c. usia 5-6 untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini;
- d. usia 7-15 tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar; dan
- e. usia 7-18 tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.

Diharapkan semua permasalahan dalam pembangunan pendidikan dapat teratasi, terutama permasalahan dalam pembiayaan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan formal, informal dan non formal kepada seluruh masyarakat yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi sebagai perwujudan bahwa urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat.

Salah satu bentuk implementasinya adalah penerapan pendidikan terjangkau bagi seluruh siswa. Implementasi kebijakan Pendidikan antara lain pemberian Biaya Operasional Pendidikan (BOP) bagi sekolah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Pemberian Beasiswa Miskin (BSM) bagi siswa kurang mampu melalui program Bansos Pendidikan dan Beasiswa Prestasi.



**Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua**

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	SUMBER DATA	SAT- UAN	2021	2022		2023		STATUS CAPAIAN	KET.
							BASELINE	TARGET	REALISASI	TAR- GET	REALISASI		
<b>Sasaran 4.1 Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pebelajaran yang relevan dan efektif.</b>													
4.1.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk umur ≥ 15 tahun	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk umur ≥ 15 tahun	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Meningkatnya tingkat penyelesaian pendidikan untuk SD/ sederajat menjadi sebesar 98,94%, SMP/ sederajat menjadi sebesar 93,33%, dan SMA/ sederajat menjadi 71,71%. Tahun dasar 2020: SD/ sederajat 96,00%; SMP/ sederajat 87,89%; SMA/ sederajat 63,95 (Sumber data: survei Sosial Ekonomi Nasional)	PKO	Angka	8,24		8,67		9,18		
<b>Sasaran 6.1 Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi</b>													
4.6.1	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Angka Melek Huruf Usia ≥15 tahun		BPS	%	94,75		94,15		94,98		
<b>Sasaran 4.9 Pada Tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerja sama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.</b>													

4.9.1*	Persentase pendidik yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan sertifikat pendidik	Persentase pendidik pada jenjang Sekolah Dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan sertifikat pendidik	Persentase pendidik pada jenjang Sekolah Dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan sertifikat pendidik	Menigkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan melalui program pendidikan profesi guru dan peningkatan kualifikasi pendidik. sebesar 0,77: dan Pendidikan Tinggi sebesar 0,28	PKO	%				46,88	32,60	▶	
		Persentase pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan sertifikat pendidik	Persentase pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan sertifikat pendidik		PKO	%					72,27	33,36	▶

# T U J U A N KESETARAAN GENDER

5

**Mencapai Kesetaraan Gender  
dan Memberdayakan Kaum  
Perempuan**



## I. PENDAHULUAN

Perempuan dan gender merupakan isu yang selalu mendapat perhatian terkait pengarusutamaan dalam Pembangunan karena masih mendapat perhatian khusus. Konsep gender tidak merujuk kepada jenis kelamin tertentu (laki-laki atau perempuan). Berbeda dengan jenis kelamin, gender merupakan konsep yang dipergunakan untuk menggambarkan peran dan relasi sosial laki-laki dan perempuan. Gender merumuskan peran apa yang seharusnya melekat pada laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Konsep inilah yang kemudian membentuk identitas gender atas laki-laki dan perempuan yang diperkenalkan, dipertahankan, dan disosialisasikan melalui perangkat-perangkat sosial dan norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis dalam masyarakat. Tujuan 5 adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan, dengan target untuk mengakhiri diskriminasi kaum perempuan; menghapus praktik berbahaya perkawinan usia dini; serta menjamin partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Pencapaian target tujuan 5 di Kabupaten Sikka difokuskan pada: (1) Kebijakan responsif gender; (2) Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan; serta (3) Cakupan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif; (4) penggunaan teknologi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

## II. STATUS CAPAIAN

### A. Indikator SDGs yang Mengalami Kemajuan

#### 1. Cakupan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif

Cakupan peserta KB yang aktif pada kondisi terakhir di tahun 2023 cenderung fluktuatif dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dimana cakupan peserta KB aktif mencapai angka 24,08%. Pada Tahun 2023 jumlah cakupan peserta KB aktif berada di angka 49,02%. Kenaikan pada rentang waktu tahun 2022 ke tahun 2023 dikarenakan giat pelayanan yang telah dilakukan oleh petugas PL-KB serta berbagai pelayanan KB yang telah dilakukan pada desa dampingan atau kampung KB.

Tabel 3.5. 1  
Cakupan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif

Tujuan 5. Kesetaraan Gender						
Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Cakupan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif	%	38	80	24,8	80	49,02

Sumber : Profil Juknis Kesehatan Kabupaten Sikka, Tahun 2023

#### 2. Jumlah Pelanggan Telepon

Salah satu teknologi yang banyak persaingan dikala ini merupakan telepon seluler. telepon seluler pada dasarnya ialah perangkat telekomunikasi elektronik yang juga memiliki sebuah keahlian dasar yang sama dengan perangkat telepon konvensional saluran tetap, akan tetapi lebih mudah dibawa ke mana-mana. Ponsel kini sudah dapat dirasakan oleh seluruh golongan, baik yang sangat memerlukan ataupun yang kurang memerlukan. Jumlah pelanggan telepon seluler pada tahun 2021 hanya tercatat 109 pelanggan kemudian naik berturut-turut pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 1.537 dan 7.124 pelanggan. Jumlah

Pelanggan telepon dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.5. 2  
Jumlah Pelanggan Telepon

Tujuan 5. Kesetaraan Gender						
Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Jumlah pelanggan Telepon	Jumlah	109		1.537		7.124

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2023

### 3. Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah, Pemerintah Daerah, dan Managerial/Professional.

Tabel 3.5. 3

Proporsi yang diduduki Perempuan di Pemerintah Daerah, dan Managerial/Profesional

Tujuan 5. Kesetaraan Gender						
Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen daerah dan pemerintah daerah	%	31,8	5,42	31,8	5,42	31,8

Sumber data: Data DP2KBP3A, Tahun 2023

Partisipasi aktif dan keterlibatan perempuan dalam politik mengalami kemajuan. Dalam bidang politik, proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen dengan jumlah ini tetap konsisten hingga tahun 2023 yaitu sebesar 31,8%.

## B. Pencapaian Indikator SDGs yang Masih Memerlukan Perhatian Khusus

### 1. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IDG digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial.

Tabel 3.5. 4  
Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Tujuan 5. Kesetaraan Gender						
Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Indeks Pembangunan Gender	%	89,15	100	88,93	100	88,81

Sumber: BPS Kabupaten Sikka, Tahun 2023

Nilai IPG pada tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 cenderung menurun. Nilai IPG mengalami penurunan sebesar 0,22% dari 89,15% pada tahun 2021 menjadi 88,93% pada tahun 2022. Pada Tahun 2023 turun menjadi 88,81%.

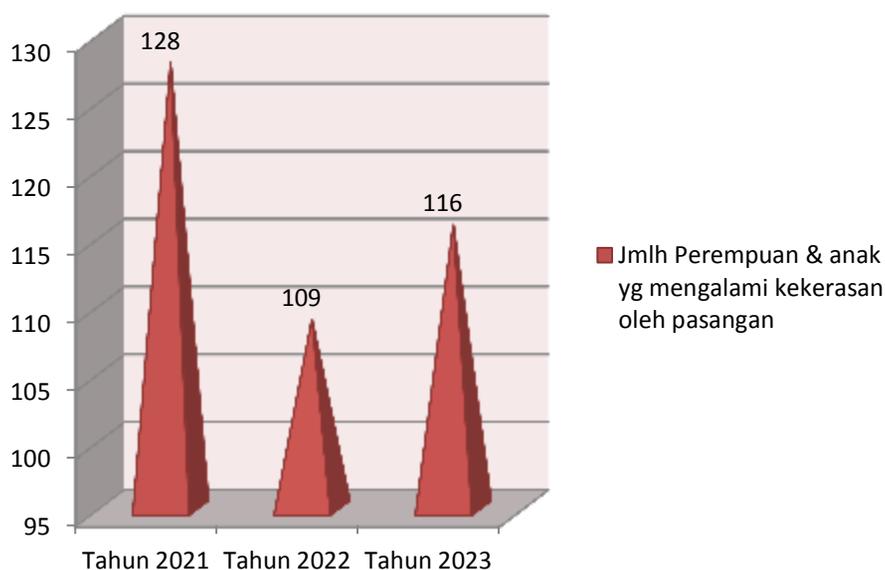
### 2. Jumlah perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir

Kondisi tiga tahun terakhir yaitu tahun 2021 hingga tahun 2023 proporsi korban kekerasan fisik yang dialami perempuan dan anak masih sangat tinggi. Pada

tahun 2021 sebanyak 128 korban perempuan dan anak mengalami kekerasan fisik kemudian jumlah korban berkurang sebanyak 19 orang pada tahun 2022 sehingga jumlah korban kekerasan fisik perempuan dan anak menjadi 109 orang kemudian pada kondisi terakhir tahun 2023 naik kembali sebanyak 7 orang menjadi 116 orang.

Grafik 3.5.1.

Data Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2023



Sumber data: Olahan DP2KBP3A, Tahun 2023

### 3. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir terhadap perempuan dan anak mengalami kenaikan di tiga (3) tahun berikut. Tahun 2021 sebanyak 14 % korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain, kemudian naik pada tahun 2022 sebanyak 97 % dan puncaknya menjadi 109 di tahun 2023.

Tabel 3.5. 5

Data Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh orang lain

Tujuan 5. Kesetaraan Gender						
Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	%	14		97		109

Sumber : Data DP2KBP3A Kabupaten Sikka, 2023

### III. TANTANGAN

Tantangan yang dihadapi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain: Masih ada budaya yang memaklumi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); Belum optimalnya sistem layanan

terpadu yang komprehensif dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan; Belum optimalnya kerjasama multipihak dan multisektor dalam upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terkait peran serta aktif dan keterlibatan perempuan pada posisi strategis dan politik masih dihadapkan pada tantangan budaya patriarki, yang menempatkan sektor publik dominan ranah laki-laki. Selain itu, kurangnya pemahaman individu baik laki-laki maupun perempuan mengenai hak perempuan dalam bidang politik mengakibatkan akses, control, manfaat dan partisipasi kaum perempuan di bidang politik masih kurang. Dalam hal mengendalikan jumlah penduduk untuk menciptakan kesejahteraan keluarga, masih terdapat tantangan dan kendala pada pelaksanaannya. Kebijakan pengendalian penduduk di kabupaten/kota dan provinsi belum dilaksanakan secara optimal. Selain itu, masih diperlukan peningkatan peran Tri Bina dan UPPKS guna mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Tantangan lainnya masih kurangnya tenaga penyuluh KB Tenaga Penyuluh KB berjumlah 23 org untuk 160 desa/Kelurahan Idealnya 1 orang Penyuluh KB membawahi 3 Desa/Kelurahan; Ketersediaan bahan habis pakai untuk proses pelayanan KB tidak mencukupi (pengadaan dari provinsi sedikit, dari kabupaten tidak ada); Data manual tidak terekam dengan baik dalam sistem pelaporan secara online.

#### **IV. KEBIJAKAN KEDEPAN**

Sesuai RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 maka kebijakan pembangunan kualitas SDM dalam kerangka kesetaraan gender dan perlindungan anak yaitu: Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui:

- a. Cegah terhadap kekerasan perempuan dan anak;
- b. Penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban kekerasan sesuai standar dan terintegrasi dengan layanan dasar;
- c. Pemberdayaan perempuan;
- d. Pemenuhan hak anak termasuk edukasi pencegahan perkawinan anak;
- e. Perekrutan Tenaga Penyuluh Lapangan keluarga berencana sesuai peraturan Menpan dan BKKBN;
- f. Penganggaran bahan habis pakai untuk pelayanan KB di kabupaten;
- g. Penguatan kapasitas tenaga penyuluh lapangan KB tentang pencatatan dan pelaporan secara online.

### Tujuan 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

KODE	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	SUMBER DATA	SATUAN	2021	2022		2023		STATUS CAPAIAN	KET
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
<b>Sasaran 5.1 Mengakhiri segala bentuk Diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun</b>												
5.1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Menguatkan kebijakan dan regulasi peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	DP3AKB	Jumlah	1 Perbup	-	-	-	-		
<b>Sasaran 5.2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta bernagai jeis eksploitasi lainnya.</b>												
5.2.1	Jumlah perempuan dewasa dan anak perempuan (umur15-64) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Jumlah perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksua, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Meningkatnya perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).	DP2KBP3 A	Jumlah	128		109		116		
5.2.2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan sia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir. Tahun dasar 2016 : 9,4% (Sumber data:Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2016)	DP2KBP3 A	%	14		97		109		
<b>Sasaran 5.3 Menghilangkan semua praktik berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa. Serta sunat perempuan.</b>												
5.3.1	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurunnya persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun menjadi 8,74%. Tahun dasar 2020: 10,35% (Sumber data:Survei Sosialisasi Ekonomi Nasional)	DP2KBP3A /BPS	% (sebelum 15 th)	NA	NA	NA	NA	NA	(-)	
<b>Sasaran 5.4 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambil keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat.</b>												

KODE	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	SUMBER DATA	SATUAN	2021	2022		2023		STATUS CAPAIAN	KET
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
5.4.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah Daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah Daerah	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR RI menjadi 22,52%, DPRD Provinsi menjadi 20%, dan DPRD Kabupaten/ Kota menjadi 17%.	DP2KBP3A	%	31,8	5,42	31,8	5,42	31,8		
5.4.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).	BPS	%	89,15	100	88,93	100	88,81		
<b>Sasaran 5.5 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.</b>												
5.5.1	Cakupan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif	Cakupan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.	DP2KBP3A/BPS	%	38	80	24,8	80	49,02		
<b>Sasaran 7: Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.</b>												
7.1	Jumlah pelanggan Telepon	Jumlah pelanggan Telepon	Meningkatnya proporsi individu yang menguasai /memiliki telepon genggam menjadi 75,7%. Tahun dasar 2020:57,48% (sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional)	BPS Provinsi NTT	jumlah	109		1.537		7.124		

T U J U A N

**AIR BERSIH DAN  
SANITASI LAYAK**



**MENJAMIN KETERSEDIAAN  
SERTA PENGELOLAAN AIR  
BERSIH DAN SANITASI YANG  
BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA**

## I. PENDAHULUAN

Salah satu agenda dari tujuan pembangunan berkelanjutan adalah memastikan akses terhadap pelayanan dasar terhadap sanitasi air minum yang aman dan terjangkau, bersih dan memadai. Data memperlihatkan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Rumah Tangga Pengguna Air Bersih adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 68.799 Rumah Tangga sedangkan pada Tahun 2023 sebanyak 35.254 rumah tangga dari total keseluruhan rumah tangga 64.436 rumah tangga. Persentase Penduduk Berakses Air Bersih adalah penduduk berakses air bersih berbanding dengan jumlah penduduk. Persentase Penduduk Berakses Air Bersih di Kabupaten Sikka pada Tahun 2022 naik menjadi 53,51% dan pada tahun 2023 naik menjadi 54,71%. Capaian ini masih lebih rendah dari target SDGs sebesar 65%.

Tujuan 6 yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, dengan target-target pencapaian untuk pemenuhan akses air bersih dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya air, serta pengelolaan sumber daya air secara terpadu. Dengan ketersediaan air dan sanitasi yang baik akan mendukung produktivitas masyarakat yang pada akhirnya secara tidak langsung mendukung pertumbuhan ekonomi secara positif. Pencapaian target tujuan 6 Kabupaten Sikka difokuskan pada: (1) Cakupan pelayanan air minum aman dan sanitasi layak; (2) desa/ kelurahan yang telah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); serta (3) Pengendalian pemanfaatan air tanah.

## II. STATUS CAPAIAN

### A. Indikator SDGs yang mengalami Kemajuan

#### 1. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak.

Akses layanan air minum di Kabupaten Sikka diukur menggunakan indikator cakupan pelayanan air minum yang dibagi antara perkotaan dan perdesaan. Secara umum persentase rumah tangga di Kabupaten Sikka yang memiliki layanan air minum layak mengalami peningkatan. Namun demikian jika dilihat secara agregat (perkotaan dan perdesaan), maka cakupan pelayanan air minum perkotaan lebih baik dibandingkan perdesaan. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air minum layak di Kabupaten Sikka sebagaimana ditunjukkan pada diagram 3.6.1.

Grafik 3.6.1

Persentase Akses Air Minum Layak Tahun 2021-2023



Sumber : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kab. Sikka, 2023

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2022 Sebanyak 68.799 Rumah Tangga sedangkan pada Tahun 2023 sebanyak 35.254 rumah tangga dari total keseluruhan rumah tangga 64.436 rumah tangga.

Tabel 3.6. 1

Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak

Tujuan 6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak					
Indikator	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	angka		68.799		35.254

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kab. Sikka, 2023

Grafik 3.6.2.

Persentase Penduduk Berakses Air Bersih Tahun 2021-2023



Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kab. Sikka, 2023

Persentase penduduk yang berakses air bersih tiga tahun 2021-2023 berturut-turut mengalami tren yang positif selaras dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak.

## 2. Persentase rumah tangga dengan akses air limbah dan sanitasi layak

2. Cakupan sanitasi layak di Kabupaten Sikka Tahun 2023 dapat dilihat dari
2. persentase kepala keluarga yang memiliki akses air limbah dan sanitasi layak
2. Persentase RT yang memiliki akses air limbah dan sanitasi layak pada tabel
2. 3.6.2.

Tabel 3.6. 2

Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Air Limbah dan Sanitasi Layak

Tujuan 6. Pengelolaan Air Bersih						
Indikator	Satuan %	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Air Limbah & Sanitasi Layak	%	49,34		50,97		51,28

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kab. Sikka, 2023

Persentase rumah tangga dengan akses air limbah dan sanitasi layak mengalami kenaikan pada tiga (3) tahun terakhir. 49,34% RT memiliki akses air limbah dan sanitasi layak pada tahun 2021 menjadi 50,97% pada tahun 2022. Puncaknya pada tahun 2023 naik menjadi 51,28%. Lebih dari 50% Rumah tangga telah memiliki air limbah dan sanitasi yang layak.

## B. Indikator SDGs yang mengalami Intervensi Khusus

### 1. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Jumlah desa/kelurahan Tahun 2021 adalah 160 desa dan 13 kelurahan. Sedangkan Persentase Desa/Kelurahan melaksanakan STBM Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.6.3.

Tabel 3.6. 3

Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Tujuan 6.Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak						
Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021
Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	160	194	160	194	160

Sumber: Profil Juknis Kesehatan Kab. Sikka, 2023

Persentase Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten Sikka konsisten dari tahun 2021 hingga tahun 2023 yaitu sebanyak 160 desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Sedangkan jumlah desa kelurahan yang Open Defecation Free (ODF) /Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) mengalami kenaikan pada rentang waktu tahun 2021-2023. Data jumlah desa yang ODF dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6. 4

Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF) /Stop Buang Air Besar Sembarangan

Tujuan 6.Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak						
Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021
Jumlah desa/ kelurahan yang Open Defecation Free (ODF) /Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	%	160	194	160	194	160

Sumber: Profil Juknis Kesehatan Kab. Sikka, 2023

Desa/kelurahan di Kabupaten Sikka yang sudah melaksanakan STBM adalah :

- 1) Stop Buang Air Besar Sembarangan atau akses sanitasi mencapai 91,62%
- 2) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) 89,79%
- 3) Pengelolaan Makan Minum Rumah Tangga (PaMMRT) 97,69%
- 4) Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT) 86,12% dan
- 5) Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PSRT) 32,32%.

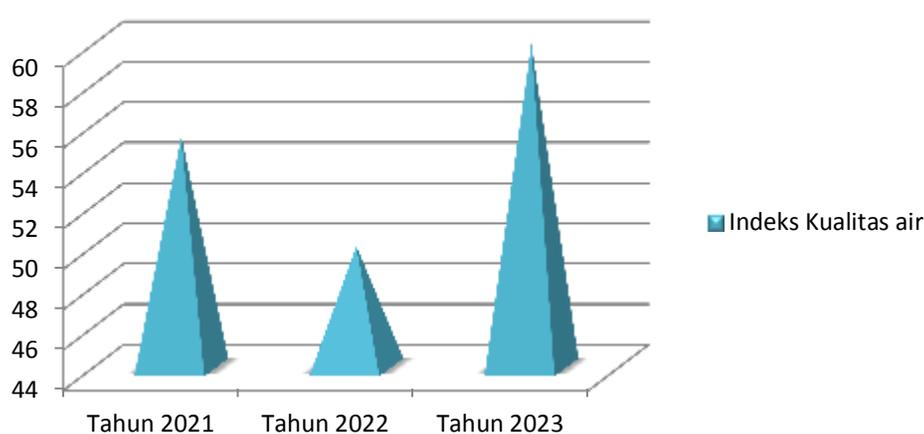
### 2. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang

menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks ini menyediakan cara yang mudah untuk menilai kesesuaian air untuk berbagai penggunaan, seperti minum, rekreasi, dan penyokong kehidupan akuatik dengan mempertimbangkan beberapa parameter air seperti nilai PH, kekeruhan, dan lain-lain untuk memberikan nilai tunggal.

Indeks kualitas air di Kabupaten Sikka mengalami kenaikan pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2021 – 2023. Kenaikan indeks kualitas air di tahun 2021-2023 dapat dilihat pada diagram dibawah ini.

Grafik 6.3  
Indeks Kualitas Air (IKA) Kab.Sikka tahun 2021-2023



Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kab. Sikka, 2023

### III. TANTANGAN

Tantangan dalam upaya penyediaan air baku adalah:

- Masih terdapat sarana dan prasarana jaringan irigasi yang rusak dan perlu dikembangkan;
- Masih di perlukan upaya peningkatan sarana dan prasarana penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan irigasi dan domestik;
- Masih terdapat kondisi sarana dan prasarana sungai dan pantai dalam kondisi rusak dan atau berkurang daya tampungnya.

Dalam rangka pemenuhan air minum dan sanitas layak sesuai amanat SDGs dijumpai tantangan sebagai berikut :

- Keterbatasan kuantitas dan kualitas air yang belum sesuai standar SDGs serta keterbatasan sumber daya pengelolaan air minum regional;
- Akses pelayanan sanitasi air limbah domestik masih harus dikembangkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan perlunya peningkatan kapasitas pengelola instalasi pengolahan limbah domestik komunal.

### IV. INOVASI DAN PRAKTEK BAIK

Pemerintah Kabupaten Sikka mendukung pengembangan sistem air minum dan sanitasi secara komprehensif, kegiatan monitoring kondisi jaringan air minum dan sanitasi yang *up to date* penyajiannya sangat dibutuhkan dalam kerangka penyiapan solusi teknis dari permasalahan minum dan sanitasi yang ada, agar dapat beroperasi secara optimal.

## V. KEBIJAKAN KEDEPAN

Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sikka dalam mencapai Tujuan 6 antara lain: Meningkatkan upaya promotif, dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif, dan rehabilitatif, melalui Peningkatan upaya penerapan paradigma sehat dengan mendorong pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) termasuk penuntasan Open Defecation Free (ODF).

Untuk mewujudkan sumber daya air Kabupaten Sikka yang berkualitas dan berkelanjutan dilakukan dengan peningkatan daya dukung DAS dan rehabilitasi hutan dan lahan; peningkatan konservasi sumberdaya air, peningkatan pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air tanah, pengembangan dan perbaikan kualitas air; pengendalian banjir ; rehabilitasi kawasan mangrove dan terumbu karang; serta konservasi energi.



### Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	SUMBER DATA	SATUAN	2021	2022		2023		STATUS CAPAIAN	KET
						BASE-LINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
<b>Sasaran 6.1 Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.</b>												
6.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan Sumber air minum layak.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak 100% (dengan akses jaringan perpipaan 30,45%) dan persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman 15%.	LKPJ	%	44,13		53,51%	54,38	74,8		
<b>Sasaran 6.2 Pada Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.</b>												
6.2.1	Persentase rumah tangga dengan akses air limbah dan sanitasi layak	Persentase rumah tangga dengan akses air limbah dan sanitasi layak	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman sebesar 90% untuk layak, termasuk 15% untuk aman.)	PUPR	%	49,34		50,97		51,28		
6.2.2	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	umlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman /kota/regional (SR) sebesar 3,9 juts sambungan. Tahun dasar 2019: ±2,2 juta sambungan rumah	Profil Kesehatan NTT,2023	Desa / kel	160	194	160	194	160		
6.2.3	Jumlah desa / keluran yang Open Defecation Free (ODF) /Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Jumlah desa/ kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Persetanse rumah tangga yang masih mempraktekan Buang Air Besar Sembarangan (BAB) di tempat terbuka sebesar 0	Profil Kesehatan NTT,2023	Desa / kel	70	160	79	194	96		
<b>Sasaran 6.3: Pada Tahun2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan perlepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.</b>												

6.3.1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 55,5. Tahun dasar 2019:52,65 (Sumber data: Rencana Kerja Pemerintah 2021)	LKPJ	Kab/ Kota	55,45		50		60		
-------	---------------------------	---------------------------	---	------	-----------	-------	--	----	--	----	---	--



T U J U A N  
ENERGI BERSIH  
& TERJANGKAU



Menjamin Akses Energi  
Yang Terjangkau, Andal,  
Berkelanjutan dan Modern  
Untuk Semua



## I. PENDAHULUAN

Layanan energi bersih dan terjangkau dapat mencakup akses dan layanan, pasokan dan efisiensi energi baru dan terbarukan. Energi merupakan kebutuhan mendasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan energi akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk namun pada sisi yang lain sumber energi yang digunakan cenderung terbatas, sehingga dibutuhkan upaya sistematis pemanfaatan energi alternatif yang berkelanjutan.

Tujuan 7 adalah menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua, dengan target untuk menjamin akses layanan energi untuk semua. Pencapaian target tujuan 7 Kabupaten Sikka difokuskan pada : (1) Akses Layanan Energi Yang Terjangkau; dan (2) Mengembangkan Alternatif Sumber Energi Non Fosil.

## II. STATUS CAPAIAN

### A. Pencapaian Indikator SDGS Yang Mengalami Kemajuan

#### 1. Rasio Elektrifikasi

Untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik maka digunakan indikator Rasio Elektrifikasi. Rasio elektrifikasi Kabupaten Sikka hingga tahun 2023 mencapai 95,60%, angka tersebut naik sebesar 0,18 dari 95,42% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Sikka masih terdapat sekitar 4,4% KK belum berlistrik, yang sebagian besar merupakan rumah tangga miskin. Perkembangan rasio elektrifikasi selama tahun 2021-2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7. 1  
Ratio Elektrifikasi

Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau						
Indikator	Satuan %	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Rasio Elektrifikasi	%	54,48		95,42		95,60

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kab. Sikka , Tahun 2023

#### 2. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi listrik per kapita merupakan perbandingan jumlah penjualan tenaga listrik dengan jumlah penduduk. Konsumsi listrik perkapita di Kabupaten Sikka Tahun 2023 sebesar 2.413 kwh, mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 2.209 kwh.

Tabel 3.7. 2  
Konsumsi Listrik Per Kapita

Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau						
Indikator	Satuan KWh	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Konsumsi Listrik Per Kapita	KWh	2.209		2.209		2.413

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2023

## B. Pencapaian Indikator SDGs yang Masih Memerlukan Perhatian Khusus

### 1. Persentase Rumah Tangga menggunakan Gas elpiji

Guna melihat proporsi rumah tangga yang sudah memanfaatkan penggunaan gas sebagai bahan bakar untuk memasak yang lebih cepat dan praktis. Penggunaan gas elpiji pada tahun 2023 naik 0,11% dari tahun 2021 menjadi 0,88%. Hal ini dipengaruhi oleh masyarakat yang mulai terbiasa menggunakan gas disamping suplay minyak tanah masih tergolong lancar. Presentase Penggunaan Gas elpiji terlihat pada tabel 3.7.3

Tabel 3.7. 3  
Persentase Rumah Tangga menggunakan Gas elpiji

Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau						
Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Persentase Rumah Tangga menggunakan Gas elpiji	%	0,77		0,88		0,88

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2023

## III. TANTANGAN

Kebutuhan energi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan industri. Kebutuhan material untuk pembangunan infrastruktur juga semakin meningkat sehingga perlu ditingkatkan lagi pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Terkait hal tersebut, pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral masih menjadi tantangan dan menghadapi permasalahan yang memerlukan perhatian, yaitu:

- Adanya pengelolaan dan pemanfaatan energi yang kurang efisien
- Kecukupan pasokan energi terutama gas, dan listrik untuk memenuhi kebutuhan sektor riil
- Pemanfaatan sumber daya energi secara maksimal untuk bahan baku industri
- Pemanfaatan energi belum memberi dampak pengembangan ekonomi secara luas
- Belum adanya fasilitas cadangan penyangga energi nasional untuk mengantisipasi kondisi krisis dan darurat energi.

## IV. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Investasi dalam infratraktur dan inovasi adalah penggerak penting pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Saat ini lebih dari setengah populasi dunia tinggal di perkotaan, karena itu transportasi massal dan energi terbarukan menjadi sangat penting, begitu juga dengan pertumbuhan industri baru serta teknologi informasi dan komunikasi.

Kemajuan teknologi juga adalah kunci untuk menemukan solusi jangka panjang bagi tantangan ekonomi dan lingkungan, seperti menyediakan lapangan pekerjaan baru dan mendorong efisiensi energi. Mempromosikan industri berkelanjutan serta berinvestasi dalam penelitian ilmiah dan inovasi adalah cara-cara penting untuk memfasilitasi pembangunan berkelanjutan.

## V. KEBIJAKAN KEDEPAN

Arah kebijakan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target sasaran tujuan 7 yaitu energi bersih dan terjangkau antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi energi dengan memperluas, merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas sistem transmisi dan distribusi serta mengembangkan sistem manajemen informasi dan kontrol data;
2. Meningkatkan diversifikasi energi melalui pengelolaan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan sebagai energi alternatif pengganti energi fosil antara lain dalam bentuk pemanfaatan energi surya atap dan PLTS, serta;
3. Memperluas pasokan energi dan listrik, terutama bagi rumah tangga tidak mampu.



**Tujuan 7. Menjamin Akses Energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.**

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sasaran TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	Sumber Data	Satuan	2021	2022		2023		Status Capaian	Ket.
						Baseline	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
<b>Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.</b>												
7.1.1*	Rasio Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	Meningkatnya rasio elektrifikasi mendekati 100%. Tahun dasar 2020:99,20%	LKPJ	%	54,48		95,42		95,60		
7.1.1. (a)	Konsumsi Listrik Perkapita	Konsumsi Listrik Perkapita	Meningkatnya konsumsi listrik per kapita menjadi 1.400 KWh. Tahun dasar 2020:10,38 KWh	BPS Provinsi NTT	KWh	2.209		2.209		2.413		
7.1.2	Persentase Rumah Tangga menggunakan Gas elpiji	Persentase Rumah Tangga menggunakan Gas elpiji	Tercapainya jaringan gas 4 juta sambungan rumah tangga.	BPS Provinsi NTT	%	0,77		0,88		0,88		
<b>Sasaran 7.2: Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial proporsi energi terbarukan dalam bauran energi global.</b>												
7.2.1*	Bauran Energi Terbarukan	Bauran Energi Terbarukan	Bauran energi terbarukan menuju 19,50%.	Kantor ESDM	EBTB (KWh)	1.680.037		1.151.500				

T U J U A N  
PEKERJAAN LAYAK  
& PERTUMBUHAN  
EKONOMI



MENINGKATKAN PERTUMBUHAN  
EKONOMI YANG INKLUSIF DAN  
BERKELANJUTAN, KESEMPATAN  
KERJA YANG PRODUKTIF DAN  
MENYELURUH SERTA PEKERJAAN  
YANG LAYAK UNTUK SEMUA



## I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan mata rantai yang akan memberikan dampak terhadap tumbuhnya sektor-sektor lain yakni pekerjaan, penghidupan yang layak maupun penghasilannya. Menempatkan penciptaan kesempatan kerja sebagai pusat dari pembuatan kebijakan ekonomi dan rencana pembangunan, tidak hanya akan menghasilkan peluang kerja yang layak namun juga pertumbuhan yang lebih kuat, inklusif dan dapat mengurangi kemiskinan. Ini merupakan lingkaran positif yang baik bagi perekonomian maupun bagi masyarakat serta mendorong pembangunan berkelanjutan.

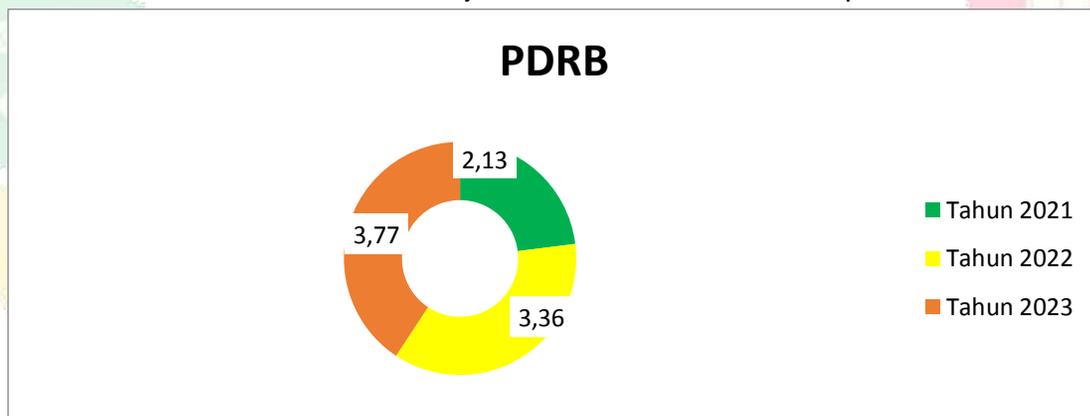
Tujuan 8 adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua dengan target untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, mencapai produktivitas perekonomian, penciptaan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, serta pariwisata yang berkelanjutan. Pencapaian target tujuan 8 Kabupaten Sikka difokuskan pada: (1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi; (2) Penyediaan Lapangan Pekerjaan Untuk Mengurangi Angka Pengangguran; serta (3) Meningkatkan Pendapatan dari Sektor Pariwisata

## II. STATUS CAPAIAN

### A. Pencapaian Indikator SDGs Yang Mengalami Kemajuan

#### 1. Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita

Grafik 3.8.1  
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita



Sumber : BPS Kabupaten Sikka, 2023

Laju pertumbuhan PDRB memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa.

PDRB merupakan indikator ekonomi makro suatu daerah, yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Dengan menghitung PDRB secara teliti dan akurat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai keberhasilan pembangunan di suatu daerah.

#### 2. PDRB Perkapita

PDRB Per Kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan Per Kapita, maka wilayah tersebut semakin makmur. PDRB Per Kapita menunjukkan nilai PDRB Per Satu orang penduduk pertahun.

Pada kurun waktu 2021 hingga 2023, laju pertumbuhan PDB Per Kapita Kabupaten Sikka Tahun 2021 16.335 dan di tahun 2022 meningkat menjadi 17.259. Pada kondisi terakhir di tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 18.472. Hal ini sejalan dengan peningkatan laju pertumbuhan PDRB per kapita tiga tahun berturut-turut.

Tabel 3.8. 1  
PDRB Per Kapita

Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi						
Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
PDRB Per kapita	Juta/rupiah	16.335	-	17.259	-	18.472

Sumber : BPS Kabupaten Sikka, 2023

### 3. Persentase Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Jika dilihat dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 terjadi penurunan angka TPT dari 4,54% menjadi 4,51%, kemudian menurun 1,89% menjadi 2,62% pada tahun 2023.

Tabel 3.8. 2  
Tingkat Pengangguran

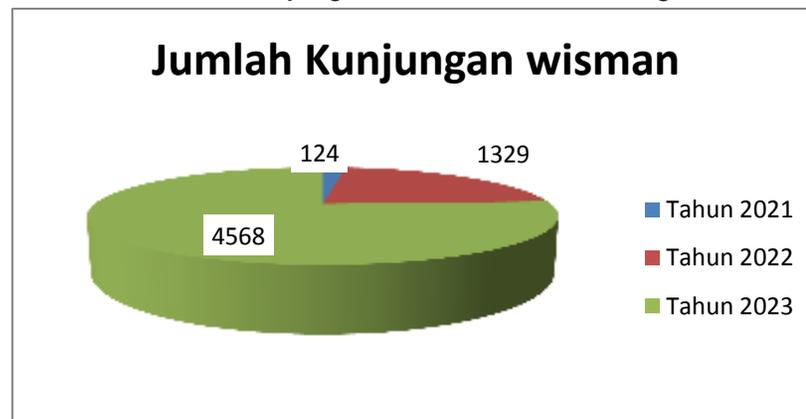
Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi						
Indikator	Sat	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Persentase tingkat pengangguran terbuka	%	4,54		4,51		2,62

Sumber : BPS Kabupaten Sikka, 2023

### 4. Jumlah Wisatawan Manca Negara

Jumlah kunjungan wisatawan naik drastis pasca sempat anjlok pada masa pandemic covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 dan tahun 2021 yang mengharuskan para wisatawan tidak melakukan perjalanan baik dalam negeri dan luar negeri. Giat pariwisata kembali dilakukan agar dapat menarik kembali wisatawan dalam negeri dan manca negara untuk berkunjung dan lama bertahan. Data jumlah wisatawan mancanegara dapat dilihat pada diagram berikut :

Grafik 3.8.2  
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara



Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Sikka, 2023

### 5. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2021 – 2023 mengalami tren yang positif. Pada tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 25.933 orang lalu pada tahun 2022 sebanyak 36.041 orang dan naik kembali pada tahun 2023 menjadi 43.812 orang.

Tabel 3.8. 3  
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi						
Indikator	Sat %	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	org	25.933		36.041		43.812

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Sikka, 2023

## B. Pencapaian Indikator SDGs yang Masih Memerlukan Perhatian Khusus

### 1. Persentase PDRB dari sektor pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang dipengaruhi oleh beberapa sektor, salah satunya adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata memiliki peran potensial yang signifikan bagi pasar dan perekonomian. Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Sikka pada tahun 2023 cenderung konsisten dari dua (2) tahun sebelumnya yaitu 0,62.

Tabel 3.8. 4  
Persentase PDRB dari sektor pariwisata Tahun 2021-2023

Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi						
Indikator	Sat %	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Persentase PDRB dari sektor pariwisata	%	0,62		0,62		0,62

Sumber : LKPJ Kabupaten Sikka, 2023

## III. TANTANGAN

Pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi pula oleh situasi perekonomian nasional. Kendati pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka pada tahun 2023 sebesar 3,77 % namun dari aspek ketenagakerjaan dapat disampaikan masih terdapat jumlah penduduk yang tidak bekerja.

Penduduk Kabupaten Sikka yang tergolong angkatan kerja sebanyak 176,860

atau 73.92% dari jumlah usia angkatan kerja Kabupaten Sikka dengan komposisi lakilaki sebanyak 90.661 atau 51.26% dan perempuan sebanyak 86.199 atau 48.74%. Pada usia angkatan kerja terdapat pula Pengangguran terbuka sebanyak 8.022 jiwa atau 4.5%. Sedangkan jumlah penduduk yang bukan merupakan angkatan kerja di Kabupaten Sikka sebanyak 62.387 atau 26.07%. Dengan komposisi terbanyak pada kelompok penduduk dengan kegiatan Mengurus Rumah Tangga sebanyak 37.731 atau 67.48% dengan jumlah terbanyak adalah perempuan sebesar 32.071 atau 85%

#### **IV. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK**

Masa pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi keberlangsungan bidang pariwisata pada tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Sikka mencoba membuat terobosan baru untuk bidang pariwisata dengan tatanan baru.

Dengan Adanya fasilitas pelayanan bagi wisatawan melalui TIS (Tourist Information System/Sistem Informasi Pariwisata) pada Anjungan Informasi Mandiri Pariwisata sebagai upaya untuk peningkatan pelayanan informasi bagi wisatawan, antara lain;

- a. Pembuatan konten peta wisata
- b. Pembuatan konten promosi multimedia di TIC
- c. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui pelatihan-pelatihan yang bersumber dari DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata

Pada tahun 2023, Kabupaten Sikka telah melakukan terobosan terkait pariwisata dengan melakukan “Festival Jelajah Maumere” yang dilakukan selama tiga (3) hari untuk memperkenalkan wisata alam, laut dan budaya. Berbagai kegiatan yang dilakukan adalah jelajah alam (Hiking ke Hutan Andalan Egon dan air panas Blidit) , jelajah laut (Gowes sepanjang Tanjung Kajuwulu) dan festival budaya melalui tarian dan musik tradisional.

#### **V. KEBIJAKAN KEDEPAN**

Tantangan pembangunan ke depan semakin menuntut berbagai terobosan yang dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan riil dalam rangka mencapai daya saing destinasi yang kompetitif. Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu melakukan kebijakan pembenahan (revamping) dengan merekontekstualisasi strategi pengembangan destinasi pariwisata melalui pemanfaatan suatu instrumen pengelolaan dan tatakelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan, bertanggung jawab, berkeadilan buat masyarakat setempat.

**Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.**

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	Sasaran TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	SUMBER DATA	SATUAN	2021	2022		2023		STATUS CAPAIAN	KET.
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
<b>Sasaran 8.1: Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.</b>												
8.1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Perkapita	Laju Pertumbuhan Ekonomi Perkapita	Meningkatnya Gross Nayional Income (GNI) per kapita (Atlas Method) diharapkan menjadi USD5.810-6.000 per kapita. Tahun dasar 2020: USD 3.870 (Sumber data: Work Bank)	BPS	%	2,13		3,36		3,77		
<b>Sasaran 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang mmberi nilai tambah tinggi dan padat karya</b>												
8.2.1	PDRB Perkapita	PDRB Perkapita	Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat menjadi 3,7 - 4,5%. Tahun dasar 2020: - 1,84 (Sumber data: Badan Pusat Statistik)	BPS	Juta /Rupiah	16.335		17.259		18.472		
<b>Sasaran 8.5 : Pada Tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sma nilainya.</b>												
8.5.1	Persentase Tingkat pengangguran terbuka	Persentase Tingkat pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka menurun dalam rentang 3,6-4,3%. Tahun dasar 2020: 7,07% (Sumber data: Badan Pusat Statistik)	BPS	%	4,54		4,51		2,62		
<b>Sasaran 8.9: Pada Tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.</b>												
8.9.1	Persentase PDRB dari sektor pariwisata	Persentase PDRB dari sektor akomodasi	Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 4,5% terhadap PDB. Tahun dasar 2020:4,0% (Sumber data: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan	LKPJ 2023		0,62		0,62		0,62		

			Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)								
8.9.2	Jumlah wisatawan manca negara.	Jumlah wisatawan manca negara.	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 16-17 juta. Tahun dasar 2020:4,05 juta (Sumber data: Badan Pusat Statistik)59/2017)	Disparbud	orang	124		1.329		4.568	▶
8.9.3	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara menjadi 320-335 juta perjalanan. Tahun dasar 2020: 198,24 juta (Sumber data: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)	Disparbud	orang	25.933		36.041		43.812	▶



T U J U A N

9

INDUSTRI,  
INOVASI DAN  
INFRASTRUKTUR

MEMBANGUN  
INFRASTRUKTUR YANG  
TANGGUH, MENINGKATKAN  
INDUSTRI INKLUSIF DAN  
BERKELANJUTAN SERTA  
MENDORONG INOVASI



## I. PENDAHULUAN

Industrialisasi yang inklusif berkelanjutan, berbasis lingkungan serta inovasi, akan menumbuhkan terciptanya kemakmuran. Oleh karena itu, menjadi penting ketika ada alih teknologi sebagai respek terhadap pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan industri, inovasi dan infrastruktur merupakan upaya yang dilakukan pemerintah suatu negara untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membantu perkembangan inovasi. Investasi berkelanjutan dalam infratruktur dan inovasi adalah penggerak penting pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Oleh karena itu, semakin besar investasi pada inovasi dan infrastruktur maka akan semakin baik. Tujuan 9 adalah membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, dengan target untuk mengembangkan infrastruktur dan meningkatkan proporsi industri dalam PDRB. Pencapaian target tujuan 9 Kabupaten Sikka difokuskan pada : (1) Pengembangan Infrastruktur Berkualitas dan Peningkatkan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri.

## II. STATUS CAPAIAN

### A. Pencapaian Indikator SDGs yang mengalami kemajuan

#### 1. Kondisi Mantap Jalan Nasional, Provinsi dan Jalan Kabupaten

Tabel 3.9. 1

Kondisi Mantap Jalan Nasional, Provinsi dan Jalan Kabupaten

Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur						
Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Kondisi Mantap Jalan Nasional	km	1.759,25		1.746,37		2.043,76
Kondisi Mantap Jalan Provinsi	km	1.865,856		1.878,85		1.901,84
Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	km	7.557.98		9.401,65		8.983,12

Sumber data : Data Kementerian PUPR yang dipublikasikan, 2023

Kondisi mantap Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten mengalami peningkatan signifikan sebagaimana diperlihatkan dalam tabel tersebut. Sebagian besar jalan di Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan sisanya merupakan kewenangan Nasional dan kewenangan Provinsi.

Tabel 3.9. 2

Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi, Kabupaten Sikka Tahun 2021-2022

No.	Kondisi Jalan	Tahun	
		2021	2022
1.	Kondisi Baik	517,83	584,505
2.	Kondisi Sedang Rusak	183,68	174,161
3.	Kondisi Rusak	136,12	108,849
4.	Kondisi Rusak Berat	235,5	205,615
5.	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten)	1.073,13	1.073,13

Sumber : NTT dalam Angka , Dinas PUPR Kabupaten Sikka, 2023

Kondisi infrastruktur jalan Kabupaten Sikka tahun 2023 pada persentase 63,58%. Pada tahun 2022, panjang jalan dalam kondisi baik meningkat menjadi sekitar 584.505 kilometer. Ini mencerminkan upaya pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Sikka.

## 2. Bandara Frans Seda

Telah dioperasikan terminal penumpang baru Bandara Frans Seda pada tahun 2023 dengan kapasitas ± 100.000 Penumpang Per Tahun.

Tabel 3.9. 3  
Luas Terminal dan Panjang Landasan

Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur						
Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Luas Terminal	M2	8.068		8.068		8.068
Panjang Landasan	M2	2.250		2.250		2.250

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2023

## 3. Jumlah Dermaga Penyeberangan dan Pelabuhan Strategis di Kabupaten Sikka

Tabel 3.9. 4  
Dermaga dan penumpang

Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur						
Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Jumlah Dermaga	Buah	5	5	5	5	5
Jumlah Penumpang Terangkut	Orang	72.712		59.925		79.321
Jumlah Barang Terangkut	T/M3	84.138		53.132		62.914

Sumber : Dokumen RPJPD Kabupaten Sikka 2025-2045

Sebagai dukungan pencapaian terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), diperlukan peningkatan kondisi dan kinerja angkutan penyeberangan sungai danau dan penyeberangan dengan sedikitnya memiliki derajat konektivitas dengan pulau-pulau sekitar sisi utara Kabupaten Sikka.

## 4. Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur

Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur Kabupaten Sikka mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2022 hingga 2023. Pada tahun 2021 angka laju pertumbuhan PDRB hanya sekitar 1,74% kemudian naik sebesar 4,8% menjadi 6,54%. Jenis lapangan usaha yan berkontribusi besar dalam PDRB yaitu pada sektor transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; industri pengolahan; serta pertanian, kehutanan dan perikanan.

Grafik 3.9.1

Laju pertumbuhan PDRB



Sumber : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kab.Sikka, 2023

## 5. Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah atau negara bisa cukup signifikan karena perdagangan mencakup berbagai aktivitas ekonomi seperti penjualan barang dan jasa, distribusi, dan kegiatan terkait lainnya. Perkembangan PDRB dari sektor perdagangan dari tahun 2021 – 2023 menunjukkan tren yang positif. Tahun 2021 sebanyak 10,47% sektor perdagangan berkontribusi terhadap PDRB. Kemudian naik menjadi 10,79% pada tahun 2022 dan 11,12% pada tahun 2023.

Tabel 3.9. 5

Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB

Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur						
Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB	%	10,47		10,79		11,12

Sumber : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kab.Sikka, 2023

## III. TANTANGAN

Pembangunan prasarana jalan dan jembatan diperlukan untuk membuka akses antar wilayah, terutama untuk menghubungkan daerah - daerah tertinggal dengan pusat - pusat pertumbuhan serta untuk meningkatkan arus distribusi barang, jasa dan orang dalam mendukung perekonomian.

Selain itu, transportasi memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan wilayah di Kabupaten Sikka. Namun demikian masih terdapat berbagai tantangan di sektor perhubungan diantaranya: (a) Masih diperlukannya pengembangan pelayanan angkutan dalam mendukung aksesibilitas dan aglomerasi wilayah perkotaan, kawasan perbatasan dan kawasan strategislainnya; (b) Masih diperlukannya upaya keras untuk meminimalisasi adanya potensi kerawanan kecelakaan. (c) Masih diperlukannya upaya keras peningkatan pelayanan terminal penumpang utamanya tipe B dari aspek jumlah, persebaran dan kondisi fisik fasilitas utama beserta pendukungnya; (d) Masih diperlukannya upaya fasilitasi Pemerintah Kabupaten Sikka untuk pengembangan infrastruktur perhubungan strategis yang merupakan kewenangan Pusat (bandara, pelabuhan, dan terminal tipe A atau B); Tantangan dalam pembangunan sektor industri yang perlu mendapat perhatian yaitu: (a) Masih rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB; (b) Menurunnya pertumbuhan industri skala kecil dan menengah;

## IV. KEBIJAKAN KEDEPAN

Investasi berkelanjutan dalam infratraktur dan inovasi adalah penggerak penting pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Kemajuan teknologi juga adalah kunci untuk menemukan solusi jangka panjang bagi tantangan ekonomi dan lingkungan, seperti menyediakan lapangan pekerjaan baru dan mendorong efisiensi energi. Mempromosikan industri berkelanjutan serta berinvestasi dalam penelitian ilmiah dan inovasi adalah cara-cara penting untuk memfasilitasi pembangunan berkelanjutan. Untuk mempercepat pencapaian target indikator Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Keadaan Baik , Pemerintah Kabupaten Sikka pada tahun 2021

mengambil keputusan untuk melakukan Pinjaman kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mempercepat penanganan ruas jalan di Kabupaten Sikka.



### Tujuan 9. Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan Serta Mendorong Inovasi

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	TARGET (PERPRES 111/2022)	SUMBER DATA	SAT	2021	2022		2023		STATUS CAPAIAN	KET
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
Sasaran 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas atas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.												
9.1.1	Kondisi Mantap Jalan Nasional	Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	Meningkatnya kemantapan jalan nasional menjadi 97%. Tahun dasar 2020:92% (Sumber data: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	Kemen PUPR	%	7.557,98		9.401,65		8.983,12		
9.1.2 (b)	Jumlah Bandara	Jumlah Bandara	Meningkatnya jumlah bandara sebanyak 21 unit. Tahun dasar 2019:15 (Sumber data:Kementerian Perhubungan)	Dishub	unit	1		1		1		
9.1.2 (c)	Jumlah Dermaga Penyeberangan	Jumlah Dermaga Penyeberangan	Meningkatnya jumlah lokasi pelabuhan penyeberangan sebanyak 36 unit. Tahun dasar 2019:24 ((Sumber data:Kementerian Perhubungan)	Dishub	unit	5		5		5		
Sasaran 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada Thaun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto,sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.												
9.2.2	Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur	Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur	Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur menjadi 8,1%. Tahun dasar 2020: -2,93%. (Sumber data: Badan Pusat Statistik)	LKPJ, 2023		1,74		6,54		6,54		
Sasaran 9.3 : Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar												
9.3.1	Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total niai tambah sektor industri	LKPJ, 2023		10,47		10,79		11,12		
Sasaran 9.7 Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.												
9.7.1	Persentase	Persentase	Meningkatnya persentase	BPS	%					51,06		

	penduduk yang mengakses internet	penduduk yang mengakses internet	penduduk yang terlayani mobile broadband menjadi 100%. Tahun dasar 2020:97,5% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional)	Prov.NTT								
--	----------------------------------	----------------------------------	---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--



T U J U A N  
BERKURANGNYA  
KESENJANGAN

10

Mengurangi Kesenjangan  
Intra- dan Antar Negara



## I. PENDAHULUAN

Mengurangi kesenjangan antar wilayah, memiliki tantangan dan menuntun upaya pemecahan yang komprehensif serta melibatkan berbagai pihak. Akese yang luas dan adil akan berdampak pada berkurangnya kesenjangan.

Tujuan 10 adalah mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara. Mengurangi ketidaksetaraan, kebijakan harus bersifat universal, memperhatikan kebutuhan populasi kurang beruntung dan terpinggirkan, selain itu mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan target untuk mempertahankan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 persen dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Pencapaian target tujuan 10 Kabupaten Sikka difokuskan pada: Mengurangi ketimpangan pendapatan melalui desa mandiri.

## II. STATUS CAPAIAN

### A. Pencapaian Indikator TPB yang Mengalami Kemajuan

#### 1. Jumlah Desa Tertinggal dan Desa Mandiri

Untuk memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dapat dilihat dari Indeks Desa Membangun (IDM). Dari data IDM tahun 2023 diketahui status Desa Kabupaten Sikka mengalami peningkatan dengan rincian 10 Desa Sangat Tertinggal, 47 Desa Tertinggal, 95 Desa Berkembang dan 26 Desa Maju dan 3 desa yang telah masuk ke dalam desa mandiri. Jika dibandingkan dengan data IDM tahun 2022 dengan rincian 2 Desa Sangat Tertinggal, 45 Desa Tertinggal, 79 Desa Berkembang dan 21 Desa Maju dan 0 desa mandiri.



Sumber : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kab.Sikka, 2023

Dari diagram diatas, diketahui bahwa tahun 2023 merupakan tahun perdana terdapat Desa dengan status IDM Desa Mandiri. Persentase Desa dengan status IDM sangat tertinggal sebesar 6%, sedangkan Desa mandiri sebesar 1,6%, hal ini dipengaruhi oleh intervensi yang serius melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sinergis dengan intervensi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Sikka adalah melalui penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa meliputi BUMDes, Pasar Desa, UED-SP, UP2K-PKK dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada. Status Desa di Kabupaten Sikka berdasarkan IDM dapat dilihat pada tabel 10.1.

Tabel 3.10. 1  
Status Desa Berdasarkan IDM

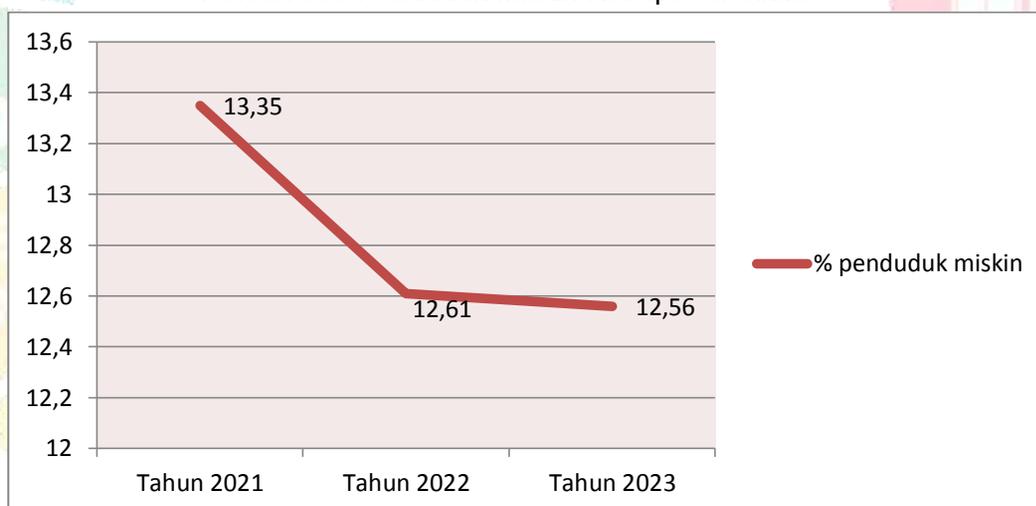
Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan				
Indikator	Satuan	Baseline (2021)	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Jumlah Desa Maju	Desa	14	21	10
Jumlah Desa Berkembang	Desa	57	79	47
Jumlah Desa Tertinggal	Desa	63	45	95
Jumlah Desa Sangat Tertinggal	Desa	13	2	26
Jumlah Desa Mandiri	Desa	0	0	3

Sumber : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kab.Sikka, 2023

## 2. Persentase Penduduk Miskin

Pembangunan yang inklusif telah diupayakan dengan menurunkan kesenjangan pada kelompok masyarakat, antara lain menahan lonjakan peningkatan garis kemiskinan, meningkatkan rata-rata pengeluaran dan menekan indeks gini. Garis kemiskinan merepresentasikan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok minimal bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Grafik 3.10.2  
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka



Sumber : BPS Kabupaten Sikka, 2023

Pada Grafik 3.10.2 menunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sikka tahun 2021-2023 cenderung menurun. Pada tahun 2021 sebesar 13,35% lalu menurun pada tahun 2022 menjadi 12,61%, dan 12,56% pada tahun 2023. Persentase penduduk Kabupaten Sikka yang hidup di bawah garis kemiskinan dapat dilihat pada tabel 3.10.2.

Tabel 3.10. 2  
Persentase Penduduk Hidup di Bawah Garis Kemiskinan

Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan				
Indikator	Satuan	Baseline (2021)	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	%	13,35	12,61	12,56

Sumber : Sikka Dalam Angka, 2023

## B. Pencapaian Indikator SDGs yang Masih Memerlukan Perhatian Khusus

### 1. Koefisien Gini

Indeks Gini atau koefisien gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai koefisien gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Koefisien gini  $<0,3$  menunjukkan ketimpangan rendah, koefisien gini  $0,3 \leq G \leq 0,5$  menunjukkan ketimpangan sedang dan koefisien gini  $G > 0,5$  menunjukkan ketimpangan tinggi.

Grafik 3.10.3  
Indeks Gini Kabupaten Sikka



Sumber : BPS Kabupaten Sikka, 2023

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terlihat ketimpangan di perkotaan jauh lebih besar dibanding ketimpangan di pedesaan. Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Indeks Gini Kabupaten Sikka Tahun 2021-2023 mengalami fluktuatif. Tahun 2021 sebesar 0,248, Tahun 2022 naik menjadi 0,342, Tahun 2023 turun menjadi 0,326. Nilai capaian koefisien gini Kabupaten Sikka masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

Tabel 3.10. 3  
Persentase Penduduk Hidup di Bawah Garis Kemiskinan

Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan				
Indikator	Satuan %	Baseline (2021)	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Koefisien Gini		0,248	0,342	0,326

Sumber : BPS Kabupaten Sikka, 2023

### III. TANTANGAN

Indeks Gini Kabupaten Sikka cenderung tidak mengalami penurunan yang berarti. Sehingga tantangan yang dihadapi ke depan yaitu bagaimana menurunkan ketimpangan pendapatan dan pengeluaran antar penduduk baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Sementara itu terjadi perubahan paradigma dalam pembangunan desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan bertujuan agar desa mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai kearifan setempat seperti ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial, dan lingkungan hidup. Pemberdayaan masyarakat juga berperan cukup penting dalam proses pembangunan sebuah daerah, dimana masyarakat berpartisipasi dan berinisiatif untuk melaksanakan proses kegiatan

ekonomi maupun sosial untuk perbaikan situasi dan kondisi diri sendiri. Proses tersebut tidaklah mudah, karena beberapa tantangan yang dihadapi yaitu:

- a. BUMDesa sebagai katalisator perekonomian desa masih belum dipahami sepenuhnya oleh desa sehingga masih banyak desa yang belum membentuk BUMDesa dan masih perlunya peningkatan status klasifikasi BUMDesa;
- b. Belum optimalnya pengembangan kawasan pedesaan guna mendukung pembangkitan ekonomi desa.

#### IV. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Pantai-pantai di Kabupaten Sikka disulap menjadi destinasi wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal. Konsep wisata alam pantai dengan menyajikan layanan tempat peristirahatan, hiburan, rekreasi keluarga dan spot foto, menarik pengunjung lokal untuk mengunjungi pantai setiap hari Sabtu dan Minggu. Warga masyarakat yang tinggal disekitaran pantai dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berjualan hasil tanaman pekarangannya atau penjualan makan minuman ringan yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan sedikit demi sedikit dapat mengurangi kesenjangan.

#### V. KEBIJAKAN KE DEPAN

Arah kebijakan untuk mengurangi kesenjangan di Kabupaten Sikka antara lain:

- a. Penurunan angka kemiskinan secara merata melalui penyediaan basic needs access dan penguatan sustainable livelihood yang bersifat tidak langsung dan kolektif untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- b. Peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat (community based Tourism) dengan mempertimbangkan keunggulan spesifik.



### Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	SUMBER DATA	SATUAN	2021	2022		2023		STATUS CAPAIAN	KET
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
<b>Sasaran 10.1 Pada Tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.</b>												
10.1.1*	Koefisien Gini.	Koefisien Gini	Menurunnya koefisiensi gini menjadi 0,376 - 0,378. Tahun dasar 2020 : 0,247 (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional)	Bappeda/ BPS	Indeks	0,248		0,342		0,326		
10.1.2	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 8,5-9,0. Tahun dasar September 2020:13,12% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional)	BPS	%	13,35	10,64	12,61	9,9	12,56		
10.1.3	Jumlah desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal	Menurunnya Desa Tertinggal menjadi 9.152 desa. Tahun dasar 2019:19.152 (Sumber data: Indeks Desa)	DPMD	desa	64	62	45		47		
10.1.4	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Meningkatnya Desa Mandiri menjadi 6.4444 desa. Tahun dasar 2019:1.4444 (Sumber data: Indeks Desa)	DPMD	desa	0		0		3		

T U J U A N  
K O T A D A N  
P E M U K I M A N  
Y A N G  
B E R K E L A N J U T A N



Menjadikan Kota dan  
Pemukiman Inklusif, Aman,  
Tangguh dan Berkelanjutan

## I. PENDAHULUAN

Kota yang inklusif, tangguh dan aman akan menjamin kehidupan masyarakat yang harmonis akan mendorong kohesi sosial yang tinggi. Data PBB menjelaskan bahwa Lebih dari setengah populasi dunia kini tinggal di wilayah perkotaan. Pada tahun 2050, angka tersebut akan naik menjadi 6,5 miliar orang, dua per tiga dari jumlah penduduk dunia. Pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa perubahan signifikan dalam cara kita membangun dan mengatur wilayah perkotaan. Pertumbuhan kota-kota yang sangat cepat di negara berkembang, ditambah dengan meningkatnya urbanisasi. Tujuan 11 adalah menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan, dengan target untuk perumahan yang layak, sistem transportasi, dan resiko bencana. Pada Tahun 2023 Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana adalah jumlah rumah layak huni bagi korban bencana yang tertangani dibandingkan dengan rumah korban bencana keseluruhan. Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 9,38%. Tahun 2020 sebesar 0%, Tahun 2021 bertambah menjadi 81,15%. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni adalah jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu berbanding dengan jumlah rumah di suatu wilayah wilayah pada kurun waktu tertentu. Jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Sikka pada Tahun 2020 sebanyak 20.175 unit. Yang tertangani pada tahun 2022 sebanyak 485 unit, sehingga berkurang menjadi 19.690 unit, dan pada Tahun 2023 sebanyak 45 unit.

## II. STATUS CAPAIAN

### A. Pencapaian Indikator SDGs Yang Mengalami Kemajuan

#### 1. Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.

Pemerintah Kabupaten Sikka telah memberikan bantuan bagi pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu, sehingga memiliki hunian yang layak dan dilengkapi dengan sanitasi yang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat rumah tangga kumuh termasuk kepadatan penduduk, kemiskinan, kurangnya akses ke layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi, serta infrastruktur perkotaan yang kurang baik. Pada tahun 2021 sebanyak 46,95% rumah tangga kumuh di perkotaan kemudian turun menjadi 46,59%. Pada tahun 2023 turun kembali menjadi 24,37%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga kumuh perkotaan berkurang seiring dengan bertambahnya hunian layak yang telah dibangun. Bantuan rumah bagi masyarakat dapat dicermati melalui tabel berikut.

Tabel 3.11. 1

Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Rumah Layak Huni

Tujuan 11. Kota dan Pemukiman Berkelanjutan					
Indikator	Satuan	Baseline 2021	2022		2023
			Target	Realisasi	Realisasi
Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	%	46,95		46,59	24,37

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sikka, 2023

## 2. Jumlah Korban Meninggal, Hilang dan Terkena Dampak Bencana per 100.000 Orang.

Kabupaten Sikka termasuk salah satu Kabupaten di Indonesia yang juga memiliki ancaman bencana tinggi. Potensi ancaman yang ada di Kabupaten Sikka meliputi: 1) bencana alam, yaitu gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, banjir bandang, tanah longor, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem/abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan; 2) bencana non-alam, yaitu epidemi dan wabah penyakit, serta kegagalan teknologi.

Tabel 3.11. 2

Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2023

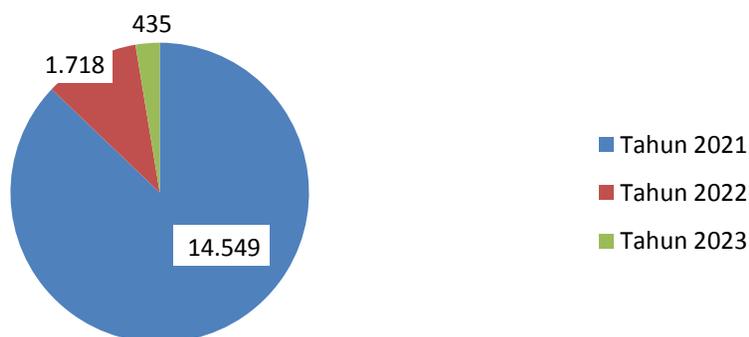
Tahun	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian
2021	Bencana Angin Kencang	8
	Bencana Longsor	15
	Bencana Abrasi	7
	Bencana Kekeringan	65
	Gelombang Pasang	11
2022	Bencana Angin Kencang	9
	Bencana Banjir	11
	Angin Puting Beliung	1
	Bencana Kekeringan	67
	Bencana Longsor	6
2023	Bencana Angin Kencang	8
	Bencana Longsor	15
	Bencana Abrasi	7
	Bencana Kekeringan	65
	Bencana Banjir	59

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, 2023

Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang pada tiga (3) tahun berturut-turut dapat dilihat pada diagram dibawah ini.

Grafik 3.11.1

Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang



Sumber : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten Sikka, 2023

## 3. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas udara di suatu daerah. IKU biasanya menggambarkan seberapa baik atau buruk kualitas udara berdasarkan tingkat polusi udara yang terdeteksi di lokasi tersebut. Beberapa negara dan kota-kota besar memiliki

sistem IKU mereka sendiri untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tingkat polusi udara saat itu.

Tabel 3.11. 3  
Indeks Kualitas Udara

Tujuan 11. Kota dan Pemukiman Berkelanjutan				
Indikator	Satuan	Baseline	Realisasi	Realisasi
		2021	2022	2023
Indeks Kualitas Udara	indeks		92,37	93,3

Sumber : RPJPD Kabupaten Sikka, 2023

## B. Pencapaian Indikator SDGs yang perlu intervensi Khusus

### 1. Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan

Tabel 3.11. 4  
Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan

Tujuan 11. Kota dan Pemukiman Berkelanjutan					
Indikator	Satuan	Baseline	2022		2023
		2021	Target	Realisasi	Realisasi
Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan	%	76,67%	76,67%	76,67%	76,67%

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2023

Adanya angkutan umum perkotaan yang dilayani dan memiliki kontribusi riil terhadap indikator SDGS yaitu mendukung peningkatan penggunaan moda transportasi umum di perkotaan (Target tahun 2030 mencapai 32%).

### 2. Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana

Kejadian bencana di Kabupaten Sikka ditangani Pemerintah dengan pemberian bantuan berupa material non lokal dan pembangunan turap/tembok pengaman erosi, pembangunan jalan dan jembatan yang rusak, dll. Kerugian ekonomi langsung yang ditimbulkan akibat bencana di Tahun 2021 sebesar Rp 1.354.287.000 dan tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp 1.354.287.000.

Tabel 3.11. 5  
Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Kabupaten Sikka

Tujuan 11. Kota Dan Pemukiman Yang Berkelanjutan				
Indikator	Satuan	Baseline (2021)	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana		1.354.287.000	1.354.287.000	1.354.287.000

Sumber: BPBD Kabupaten Sikka, 2023

## III. TANTANGAN

Rumah dengan lingkungan permukiman yang sehat dan aman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan beberapa tantangan, antara lain:

1. Masih banyaknya rumah tidak layak huni;
2. Perlu pendampingan penanganan rumah masyarakat korban bencana yang rusak parah dan/atau harus direlokasi ke lokasi yang lebih aman

Permasalahan dan tantangan untuk mewujudkan rumah dengan lingkungan permukiman yang sehat adalah pengelolaan dan penanganan sampah perkotaan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

- 1) masih rendahnya penerapan prinsip pengurangan sampah dan terbatasnya infrastruktur reduksi sampah. seperti contohnya: Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS 3R);
- 2) kurangnya armada pengangkutan sampah dan adanya tantangan geografis dan aksesibilitas yang menghambat proses pengangkutan sampah; dan
- 3) komitmen pemerintah daerah masih harus terus ditingkatkan dalam pengelolaan sampah di daerah, salah satu bentuk komitmen yang harus diperhatikan adalah pembiayaan infrastruktur persampahan untuk operasional dan pemeliharaan.

Terkait dengan transportasi, maka tantangan yang dihadapi yaitu terminal-terminal yang digunakan untuk tempat pemberhentian angkutan umum penataannya masih belum teratur, selain itu kondisi terminal yang kurang nyaman bagi pengguna moda transportasi umum.

#### **IV. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK**

Beberapa praktik baik telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sikka antara lain:

1. Mengakomodir ketersediaan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin.
2. Untuk penanganan sampah di Kabupaten Sikka, saat ini masyarakat menyadari bahwa sampah bisa menghasilkan uang, sehingga sudah dapat memilah sampah untuk dapat dijual ke tempat-tempat penampungan sampah untuk didaur ulang

#### **V. KEBIJAKAN KE DEPAN**

Arah kebijakan dalam rangka mencapai target Tujuan 11 antara lain:

- 1) Menyediakan basic need access untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui bantuan pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH), dan perbaikan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh termasuk diantaranya air bersih, sanitasi dan listrik.
- 2) Meningkatkan aksesibilitas serta konektivitas antara daerah dan wilayah pengembangan melalui pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan pada kawasan aglomerasi perkotaan; serta
- 3) Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana, yang dilakukan dengan strategi penguatan dan harmonisasi kebijakan penanggulangan bencana di daerah, penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel, penguatan upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah, peningkatan prasarana sarana mitigasi dan pengurangan risiko bencana, pembangunan dan peningkatan infrastruktur penanggulangan bencana, penguatan sistem kesiapsiagaan bencana, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering), peningkatan kerjasama dan kemitraan antar daerah dan antar lembaga dalam upaya pengurangan risiko bencana, serta mendorong

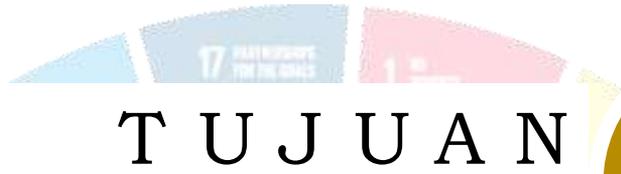
optimalisasi pelaksanaan standar pelayanan minimal.



### Tujuan 11. Menjadikan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	SUMBER DATA	SATUAN	2021	2022		2023		STATUS CAPAIAN	KET
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
<b>Sasaran 11.1: Pada Tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh</b>												
11.1.(a)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau sebesar 70%.	DPKPP	-	46,95%	-	46,59%		24,37%		
<b>Sasaran 11.2: Pada Tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberikan perhatian khusus, dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua.</b>												
11.2.1	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal yang dibangun dan dikembangkan (kota) sebanyak 6 kota. Tahun dasar 2019:1 kota (Sumber data:RPJMN 2020-2024)	Dishub bekerjasama Susenas Kor BPS	Desa tangguh	76,67%	-	76,67%		76,67%		Data cakupan layanan transportasi
<b>Sasaran 11.4: Pada Tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.</b>												
11.4.1	Jumlah korban bencana di daerah rawan bencana	Jumlah korban bencana di daerah rawan bencana	Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana maksimal sebesar 0,2 per 100.000 jiwa setiap tahunnya (Sumber data: RPJMN 2020-2024)	BPBD	jumlah	14.549 KK	14.549	1.718 KK	3.332	435		
11.4.2	Jml kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Jml kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen PDB) sebesar 0,10% (sumber data:RPJMD 2020-2024)	BPBD	Rp	1.354.287.000		1.354.287.000		1.354.287.000		

<b>Sasaran 11.5: Pada Tahun 2030, menngurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.</b>											
11.5.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 84,50. Tahun dasar 2019:86,57 (Sumber data:Rencana Kerja Pemerintah 2021)	RPJPD	Angka		100	92,37	100	93,3	
<b>Sasaran 11.6: Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yan mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplemantasikan penanganan holistik risiko bencana si semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.</b>											
11.6.2	Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana	Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana	Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana (kajian) sebanyak 50 dokumen. Tahun dasar 2019:183 dokumen (Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana)	BPBD		1	-	-	-	-	



T U J U A N  
K O N S U M S I D A N  
P R O D U K S I Y A N G  
B E R T A N G G U N G J A W A B

12



**Menjamin Pola Produksi dan  
Konsumsi yang Berkelanjutan**

## I. PENDAHULUAN

Dampak dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan pada suatu wilayah akan selalu berhadapan dengan dampak ekologi maka dengan demikian kita perlu mengubah cara produksi, konsumsi makanan, dan sumber daya lainnya. Keterbatasan sumber daya, perlu dikelola secara bertanggungjawab agar terdapat keseimbangan dampak ekologis. Pengendalian terhadap kualitas lingkungan dapat dilakukan dengan menerapkan standard baku mutu serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Tujuan 12 TPB adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang bertanggungjawab. Dalam rangka mencapai tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab pada tahun 2030, pada dokumen RAN ditetapkan target yang diukur melalui target-target tersebut terdiri dari pencapaian pelaksanaan kerangka kerja konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Artinya implementasi prinsip keberlanjutan dalam proses pembangunan salah satunya melibatkan pergeseran dari penggunaan energi fosil ke energi yang terbarukan seperti panas bumi, angin, sinar matahari, dan lain-lain.

## II. STATUS CAPAIAN

### A. Pencapaian Indikator SDGs yang mengalami kemajuan

#### 1. Bauran Energi Terbarukan

Pemenuhan kebutuhan energi Kabupaten Sikka saat ini telah menggunakan sumber energi baru terbarukan yaitu yang bersumber dari gas (PLTG Wairita) dan PLTU Ropa. Pada masa-masa mendatang, sumber energi ini masih dipertahankan penggunaan energi yang ramah lingkungan yaitu energi baru terbarukan (EBT). Kabupaten Sikka memiliki potensi EBT yang cukup tersedia antara lain energi surya, air, biogas, waste to energy (biomassa), panas bumi. Pengembangan potensi panas bumi menjadi prioritas karena diharapkan akan menambah pasokan energi listrik di Kabupaten Sikka. Berikut data EBT Kabupaten Sikka Tahun 2021-2023.

Tabel 3.12. 1  
Bauran Energi Terbarukan

Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab						
Indikator	Satuan	Baseline	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Kwh	2021	2022	2022	2023	2023
Bauran Energi Terbarukan	Kwh	1.680.087	1.682.000	1.681.287	1.682.000	1.684.787

Sumber : PLTMG Wairita Kab.Sikka, 2023

Dari tabel di atas , dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 jumlah Bauran Energi Terbarukan (EBT) mengalami peningkatan dan melampaui target dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1.684.787 Kwh. Ini menunjukkan bahwa komitmen PT.PLN Persero, wilayah UP3 Flores Bagian Timur berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan listrik wilayah timur Flores, salah satunya Sikka. Pada tahun 2023 telah terbangun beberapa PLTS seperti PLTS Wairbleler (1.000 kWp), PLTS Koja doi (190 kWp), PLTS Parumaan (420 kWp), dan PLTS Palue (760 kWp) yang menjadi bagian pasokan besaran di wilayah Maumere.

## **B. Pencapaian Indikator SDGs yang Perlu Mendapat Perhatian.**

Persoalan persampahan sebagai dampak dari produksi dan konsumsi pangan masyarakat mengindikasikan bahwa setiap rumah tangga memiliki potensi penghasil sampah. Setiap rumah tangga lazimnya menghasilkan sampah rumah tangga. Karena itu, keluarga, perlu mengambil bagian dalam proses pengelolaan sampah agar tidak mencemari lingkungan. Bagaimanapun juga, sikap tak peduli terhadap perkara sampah berdampak buruk pada lingkungan hidup dalam jangka panjang. Untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah, harus diadakan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya, misalnya dari setiap keluarga yang tentunya membuang sampah rumah tangga mereka. Indikator penanganan sampah didapatkan dari volume sampah yang terangkut ke TPA. Volume Sampah yang Terangkut ke TPA Berdasarkan data dapat dijelaskan bahwa Volume Sampah yang Terangkut ke TPA di Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 46.080m<sup>3</sup>. Tahun 2020 sebesar 48.240m<sup>3</sup>, Tahun 2021 sebesar 51.120m<sup>3</sup> sedangkan pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebesar 48.960,65 m<sup>3</sup>.

## **III. TANTANGAN**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke 12 menyoroti masalah yang kompleks terkait dengan produksi dan konsumsi yang berlebihan, penggunaan sumber daya yang tidak efisien, pemborosan pangan, dan polusi lingkungan. Konsep pertumbuhan pembangunan tanpa memperhatikan konsumsi yang bertanggung jawab menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan. Peningkatan produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan telah mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, degradasi ekosistem, dan kerugian keanekaragaman hayati.

## **IV. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK**

Beberapa praktik baik telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sikka antara lain:

1. Kampanye dan sosialisasi pemberdayaan petani, dan perbaikan infrastruktur untuk keamanan dan distribusi makanan yang lebih efisien.
2. Pengembangan sistem pengelolaan limbah yang efektif dan mempromosikan kegiatan daur ulang dapat membantu mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan.

## **V. KEBIJAKAN KE DEPAN**

Arah kebijakan dalam rangka mencapai target Tujuan 12 antara lain:

1. Konservasi Sumber Daya Alam dengan pengembangan area terpadu perhutanan sosial guna melindungi sumber daya alam yang terbatas dan memperpanjang masa depannya.
2. Pengelolaan usaha tani yang selaras alam yakni dengan menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang penting bagi kehidupan kita.

### Tujuan 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	SUMBER DATA	SATUAN	2021	2022		2023		STATUS CAPAIAN	KET
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
<p><b>Sasaran 12.8 : Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisiensi yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak.</b></p>												
12.8.1	Bauran Energi Terbarukan	Bauran Energi Terbarukan	Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan menjadi 19,3 GW. Tahun dasar 2019: 10,2 GW (Sumber data:RPJMN 2020-2024)	PLTMG	KWh	1.680.087	1.682.000	1.681.287	1.681.287	1.684.787		



T U J U A N  
P E N A N G A N A N  
P E R U B A H A N I K L I M

13



## I. PENDAHULUAN

Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi namun juga memberikan pengaruh terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Aktivitas manusia dalam mencapai kesejahteraan memicu terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca yang merupakan penyebab pemanasan global. Kejadian cuaca ekstrim hingga bencana akibat iklim (bencana hidrometeorologi) merupakan akibat dari pemanasan global atau perubahan iklim. Secara nasional Indonesia memiliki komitmen tinggi dalam menangani perubahan iklim dengan mengadopsi Paris Agreement melalui kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) karena tidak ada satu pun negara di dunia yang tidak mengalami dampak dramatis secara langsung dari perubahan iklim. Buangan gas rumah kaca terus meningkat, dan saat ini levelnya berada pada 50 persen lebih tinggi dibandingkan pada tahun 1990. Lebih jauh lagi, pemanasan global mengakibatkan perubahan berkepanjangan pada sistem iklim kita, dan konsekuensi yang terjadi tidak akan bisa diubah kecuali kita melakukan tindakan.

## II. STATUS CAPAIAN

### A. Pencapaian Indikator SDGs yang mengalami kemajuan

#### 1. Jumlah satuan pendidikan/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup

Satuan pendidikan/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup di Kabupaten Sikka tahun 2023 sebanyak 26 Kelompok Pelestari Sumber daya Alam.

Tabel 3.13. 1  
Jumlah satuan pendidikan/komunitas masyarakat peduli

Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim						
Indikator	Sat.	Baseline (2021)	2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah satuan pendidikan/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Kel.	26		26		26

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab.Sikka, 2023

## III. TANTANGAN

Secara umum, bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Sikka adalah kelompok bencana hidrometeorologi berupa banjir, puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang pasang (abrasi). Bencana hidrometeorologi cenderung mengalami peningkatan dan lebih banyak terjadi jika dibandingkan dengan bencana geologi. Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana seminimal mungkin. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu kajian risiko bencana. Informasi risiko bencana tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar dalam perumusan berbagai upaya penanggulangan bencana

#### IV. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Guna menghindari resiko dari bencana maka pemerintah terus melaksanakan upaya-upaya dengan menjaga lingkungan sekitar, memperhatikan resiko membangun di area-area rentan bencana, pengelolaan sampah, penanaman mangrove maupun Pembangunan turap atau tanggul serta memperkenalkan sekolah aman bencana sejak dini. Program Sekolah dan Komunitas Peduli Lingkungan Hidup merupakan program nasional yang bertujuan untuk mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran upaya pelestarian lingkungan hidup serta penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Gerakan cinta lingkungan diggerakkan oleh kelompok-kelompok kaum milenia yang tergabung dalam Youth Voice Now Sikka maupun kelompok-kelompok pencinta lingkungan secara perorangan.

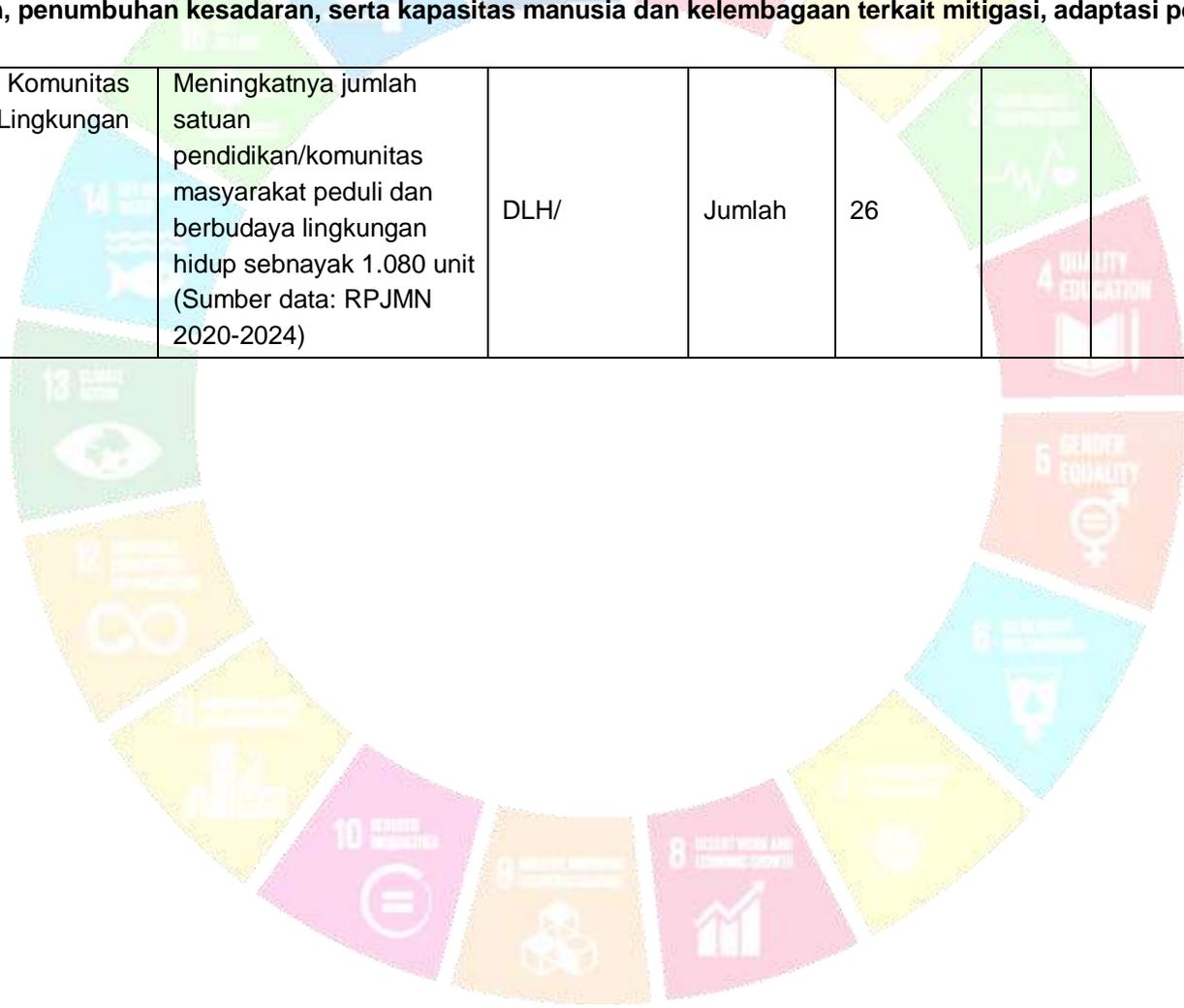
#### V. KEBIJAKAN KE DEPAN

Guna menghindari risiko, maka masyarakat harus dedukasi terkait tingkat kebencanaan yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Pengenalan terkait pengurangan tingkat resiko bencana mulai diperkenalkan kepada lembaga Pendidikan secara bertahap dari satuan PAUD hingga ke level sekolah yang lebih tinggi. Demikian pun halnya dengan pengurangan resiko bencana melalui kelompok-kelompok Masyarakat yang peduli lingkungan.



Tujuan 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampak

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	SUMBER DATA	SATUAN	2021	2022		2023		STATUS CAPAIAN	KET
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
<b>Sasaran 13.3: Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.</b>												
13.3.1	Jumlah Komunitas Peduli Lingkungan	Jumlah Komunitas Peduli Lingkungan	Meningkatnya jumlah satuan pendidikan/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup sebanyak 1.080 unit (Sumber data: RPJMN 2020-2024)	DLH/	Jumlah	26		26		26		



**TUJUAN  
EKOSISTEM  
LAUTAN**

**14**



**Menjaga Ekosistem Lautan**

## I. Pendahuluan

Laut memiliki peran penting dalam siklus hidup manusia. Eksploitasi terhadap sumber daya kelautan tanpa memperhatikan daya dukung dan pelestarian akan berdampak pada berkurangnya ekosistem kelautan. Upaya pencegahan Pembuangan sampah ke laut, maupun eksploitasi yang tidak bertanggung jawab dapat dilakukan melalui sosialisasi maupun diseminasi. Tujuan 14 yakni melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan, dengan target melestarikan wilayah pesisir, menghentikan penangkapan ikan secara ilegal, dan memberikan perlindungan untuk nelayan. Pencapaian target tujuan 14 Kabupaten Sikka Tengah difokuskan pada: (1) Peningkatan luas Kawasan konservasi perairan; (2) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha perairan dan perikanan; serta (3) Peningkatan perlindungan terhadap nelayan. Posisi Kabupaten Sikka Sebagai wilayah kepulauan dengan sebagian wilayahnya adalah lautan, potensi lestari perikanan tangkap diperkirakan mencapai 25.000 ton/tahun. Potensi ini dikelola oleh 5.085 RTP, yang terdiri dari nelayan penuh sebanyak 1.985 Rumah Tangga Perikanan (RTP), nelayan sambilan utama sebanyak 892 RTP, nelayan sambilan tambahan sebanyak 406 RTP, dan buruh nelayan sebanyak 1.802 RT.

## II. Status Capaian

### A. Pencapaian Indikator SDGs yang perlu mendapat perhatian Khusus

#### 1. Jumlah Luas Kawasan Konservasi Perairan

Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan (Permen-KP Nomor 14/Permen-KP/2016 tentang Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan). Sedangkan jumlah kawasan konservasi perairan adalah luas keseluruhan kawasan konservasi perairan teritorial pada periode waktu tertentu. Kabupaten Sikka memiliki kawasan konservasi yaitu Kawasan Konservasi Perairan Teluk Maumere (TWAL). TWAL terdiri atas 10 pulau besar dan kecil yang sebagian berpenghuni, yaitu Pulau Besar, Pulau Koja, Pulau Pemana, Pulau Kambing (Pemana Kecil), Pulau Sukun, Pulau Parumaan, Pulau Dambila, Pulau Pangabatang, Pulau Babi, dan Pulau Kondo. Secara administratif, kawasan ini termasuk dalam empat wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Waigete, Kecamatan Talibura, Kecamatan Alok, dan Kecamatan Alok Timur.

Tabel 3.14. 1

Jumlah Luas Kawasan Konservasi Perairan

Tujuan 14. Ekosistem Lautan						
Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Jumlah luas kawasan konservasi perairan	Hektare	71.956,74	NA	71.956,74	NA	71.956,74

Sumber : BBKSDA Wilayah Sikka, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah luas kawasam konservasi perairan di Kabupaten Sikka kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2023 tidak

mengalami perubahan yaitu 71.956,74 hektare. Hal ini berdampak positif bagi pemenuhan dukungan untuk pencapaian tujuan 14 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Namun, perlu diketahui bahwa Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Kawasan Konservasi di perairan Wilayah Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan bahwa semua pengawasan berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## 2. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha

Kepatuhan [compliance] usaha perikanan adalah kesesuaian kegiatan usaha perikanan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum, yaitu usaha penangkapan ikan, usaha pengolahan hasil perikanan, usaha pembudidayaan ikan, dan usaha distribusi hasil perikanan. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha di Kabupaten Sikka sebesar 0 %. Hal ini dikarenakan tidak terjadi illegal fishing dalam tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2021 hingga tahun 2023.

Tabel 3.14. 2

Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha

Tujuan 14. Ekosistem Lautan						
Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Persentase kepatuhan pelaku usaha ( <i>illegal fishing</i> )	%	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2023

## III. Tantangan

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan 14 Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) yaitu “Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan” , Pemerintah kabupaten/kota khususnya Kabupaten Sikka dihadapkan dengan tantangan yaitu semua kewenangan pengelolaan sumber daya yang ada di laut beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Sikka mengalami keterbatasan tugas dan fungsi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di laut. Tantangan lainnya adalah Terumbu Karang yang belum sepenuhnya pulih pasca gempa 1992 maupun illegal fishing, pencemaran akibat pembuangan sampah ke laut, perubahan iklim, dan overfishing. Seperti kebanyakan wilayah laut di seluruh dunia, laut Indonesia juga menghadapi dampak perubahan iklim. Pemanasan global telah menyebabkan kenaikan suhu air laut, asam laut, dan peningkatan tingkat keasaman. Hal ini berdampak negatif terhadap ekosistem laut, termasuk terumbu karang yang rentan terhadap pemutihan. Selain itu dampak aktivitas antropogenik, seperti pembuangan limbah industri, limbah domestik, dan penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab, telah menyebabkan pencemaran laut di beberapa daerah di Indonesia. Pencemaran ini dapat merusak ekosistem laut dan mempengaruhi kesehatan manusia yang bergantung pada sumber daya laut.

#### IV. Inovasi Dan Praktik Baik

##### A. Inovasi Daerah

Pemerintah Kabupaten Sikka belum memiliki inovasi secara khusus terhadap pengelolaan dan pelestarian Sumber Daya Kelautan.

##### B. Praktik Baik

Pemerintah Kabupaten Sikka tetap melakukan pengembangan pola usaha kemitraan baik kepada pelaku usaha di bidang penangkapan, pembudidayaan dan pengelolaan serta pemasaran ikan. Salah satunya melalui program Dinas Perikanan Kabupaten Sikka yaitu pembuatan abon ikan sebagai bentuk intervensi penanggulangan stunting di Kabupaten Sikka. Hasil Pengelolaan ikan berupa abon tersebut dibagikan sebagai makanan tambahan bagi anak-anak stunting. Hal ini merupakan best practise yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam mendukung pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Arah kebijakan yang diambil untuk mendukung tercapainya tujuan 14 TPB yaitu berupaya melakukan penguatan dan pemberdayaan nelayan serta pembudidaya kecil, mendorong peluang inovasi daerah terhadap pembangunan dan pelestarian Sumber Daya Laut serta peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan dan tercapainya ekosistem laut yang berkelanjutan.

#### V. KEBIJAKAN KEDEPAN

Guna menghindari risiko terjadinya degradasi fungsi kelautan maka Masyarakat harus diedukasi terkait pentingnya pelestarian ekosistem kelautan, pencegahan terjadinya over fishing maupun illegal fishing terutama kepada generasi muda.

**Tujuan 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan**

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	SUMBER DATA	SATUAN	2021	2022		2023		STATUS CAPAIAN	KET
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
<b>Sasaran 14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi</b>												
14.1.1	Volume sampah yang terbuang ke laut	Volume sampah yang terbuang ke laut	Tercapainya persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut dari baseline sebesar 60%.	DLH		NA	NA	NA	NA	NA	(-)	
<b>Sasaran 14.3 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang lebih dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologis.</b>												
14.3.1	proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batas biologis yang aman ≤100%	proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batas biologis yang aman ≤100%	Terjaganya proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batas biologis yang aman ≤100% (proporsi (0%) = produksi perikanan tangkap laut/JTB).	Dinas Perikanan	%	NA	NA	NA	NA	NA	(-)	
<b>Sasaran 14.4 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsistensi dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.</b>												
14.4.1	Jumlah luas kawasan konservasi perairan	Jumlah luas kawasan konservasi perairan	Meningkatnya jumlah luas kawasan konservasi laut/perairan seluas 26,9 juta ha. Tahun dasar 2020:24,11 juta ha (Sumber data: Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021;RPJMN 2020-2024)	BKSDA	Ha	71.956,74	NA	71.956,74	NA	71.956,74		TWAL Gugus Pulau Teluk Maumere
<b>Sasaran 14.5 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.</b>												
14.5.1*	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Terkendalnya Illegal, Unreported, Underegulated (IUU) fishing dan kegiatan di laut yang merusak ditandai dengan persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan sebesar 98%. Tahun dasar 2020:94,76% (Sumber data: Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan)	DKP	%	0		0		0	(-)	
<b>Target 14.6 Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fisher) terhadap sumber daya laut dan pasar.</b>												
14.6.1.(a)			Meningkatnya akses pendanaan untuk kelautan dan perikanan skala kecil kepada pelaku usaha	KKP	lokasi	NA	NA	NA	NA	NA	(-)	

# T U J U A N EKOSISTEM DARATAN

15



Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

## I. PENDAHULUAN

Penggundulan hutan, degradasi lahan dapat merupakan ancaman terhadap ekosistem daratan. Oleh karena itu, perlu dijaga pelestarian, dengan pemanfaatan berkelanjutan terhadap ekosistem daratan utamanya hutan, lahan dan keanekaragaman hayati yang terkandung didalamnya.

Tujuan 15 adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dengan target pelestarian, restorasi dan pemanfaatan ekosistem daratan yang berkelanjutan. Pencapaian target tujuan 15 Kabupaten Sikka difokuskan pada: (1) Pemantauan terhadap tutupan Kawasan hutan dan lahan; (2) Pemulihan Kawasan konservasi; serta (3) Peningkatan kesatuan pengelolaan hutan.

## II. STATUS CAPAIAN

### A. Pencapaian Indikator SDGs yang perlu mendapat perhatian Khusus

#### 1. Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan

Tutupan hutan (forest coverage) adalah Penutupan lahan oleh vegetasi dengan komposisi dan kerapatan tertentu, sehingga tercipta fungsi hutan sebagai satu ekosistem hutan. Perubahan tutupan hutan dipicu oleh kegiatan manusia dalam memanfaatkan lahan sehingga menyebabkan hilangnya tutupan hutan.

Tabel 3.15. 1

Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan

Tujuan 15. Ekosistem Daratan						
Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	%	75,52	-	75,52	-	75,52

Sumber : KPH Kabupaten Sikka, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat proporsi luas tutupan hutan pada tahun 2021 sebesar 75,52% kemudian sabil di angka yang sama hingga tahun 2022 dan tahun 2023. Luas kawasan hutan secara keseluruhan di Kabupaten Sikka sebesar 38.442,43 hektare dibandingkan dengan luas hutan lindung sebesar 19.854 hektare. Hal ini dikarenakan usaha untuk pelestarian kawasan hutan juga terus diupayakan antara lain dengan melakukan reboisasi dan gerakan peghijauan dan penanaman kembali.

#### 2. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya

Luas kawasan konservasi yang terdegradasi adalah besaran kawasan konservasi yang mengalami penurunan atau kemunduran atau tidak produktif. Hal ini disebabkan karena terjadinya pembakaran lahan gambut, konflik lahan, dan illegal logging yang terjadi.

Tabel 3.15. 2

Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya

Tujuan 15. Ekosistem Daratan						
Indikator	Satuan	Baseline	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		2021	2022	2022	2023	2023
Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Ha	16	15	20	12	15

Sumber : BKSDA Wilayah Kabupaten Sikka, 2023

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya sebesar 15 hektare pada tahun 2023. Upaya pemulihan dan perbaikan ekosistem kawasan terdegradasi tetap dilakukan untuk menurunkan angka luas kawasan konservasi yang terdegradasi.

### 3. Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH terbagi dalam tiga kategori yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Tabel 3.15. 3

Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan

Tujuan 15. Ekosistem Daratan				
Indikator	Satuan	Baseline 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	KPH	47	47	47

Sumber : KPH Wilayah Kabupaten Sikka, 2023

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) memiliki jumlah yang sama dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Hal ini disesuaikan dengan luas wilayah pengelolaan hutan yang ada.

### 4. Proporsi luas lahan kritis dan sangat kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan di Kabupaten Sikka

Lahan kritis adalah lahan yang sudah tidak mampu lagi berfungsi untuk menjaga tata air, sumberdaya tanah, serta biodiversitas yang hidup di atas lahan tersebut. Terjadinya lahan kritis disebabkan oleh adanya proses degradasi lapisan tanah oleh proses erosi tanah yang berkepanjangan.

Tabel 3.15. 4

Data lahan kritis pada wilayah KPHL Sikka

Kelas Lahan Kritis	Luas di HL		Luas di HP		Jumlah	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Sangat Kritis	0,06	0,00154	-	-	0,06	0,00154
Kritis	24.448,66	0,62985	910,62	2,342	23359,28	2,97

Sumber : KPH Wilayah Kabupaten Sikka

Tabel 3.15. 5  
Proporsi luas lahan kritis dan sangat kritis yang direhabilitasi

Tujuan 15. Ekosistem Daratan		
Indikator	Satuan	Realisasi 2023
Proporsi luas lahan kritis dan sangat kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan di Kabupaten Sikka	%	13,76

Sumber : KPH Wilayah Kabupaten Sikka

Dari tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa jumlah lahan kritis dan sangat kritis di Kabupaten Sikka yang direhabilitasi pada Tahun 2023 sebesar 13,76%. Hal ini berdampak pada perbaikan luas lahan yang ada menjadi lahan potensial kembali.

### III. TANTANGAN

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan 15 Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) yaitu “Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati”, Pemerintah kabupaten/kota khususnya Kabupaten Sikka dihadapkan dengan tantangan yaitu masih adanya konflik tenurial, status hukum kawasan hutan masih berbenturan dengan hak ulayat atau tanah suku, masih terjadi jual beli tanah dalam kawasan hutan. Terkait penggunaan kawasan hutan, perambahan kawasan hutan untuk lahan pertanian dan pemukiman serta sarana dan prasarana umum lainnya relatif tinggi yang berarti bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kehutanan tidak sesuai prosedur yang berlaku dan Kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar kawasan hutan masih sangat rendah. Selain itu, pemerintah kabupaten memiliki keterbatasan wewenang dikarenakan pengelolaan serta pelestarian hutan adalah wewenang pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### IV. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Pemerintah Kabupaten Sikka tetap melakukan pengembangan dan pelestarian terhadap ekosistem daratan. Salah satu upaya yang dilakukan melalui kerjasama lintas sektor di Kabupaten Sikka untuk mendukung tercapainya tujuan 15 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu ekosistem daratan.

### V. KEBIJAKAN KEDEPAN

Arah kebijakan yang diambil untuk mendukung tercapainya tujuan 15 TPB yaitu berupaya melakukan pelestarian dan pengembangan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan serta mendorong peluang inovasi daerah terhadap pembangunan dan pelestarian ekosistem darat serta peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan dan tercapainya ekosistem daratan yang berkelanjutan.

**Tujuan 15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestaari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.**

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs Kabupaten Sikka	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	SUMBER DATA	SATUAN	2021	2022		2023		STATUS CAPAIAN	KET
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
Sasaran 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basa, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional												
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkatnya luas tutupan hutan secara nasional mencapai 420.000 ha per tahun. Tahun dasar 2020: 366.000 ha (Sumber data: RPJMN 2020-2024)	KPH Sikka	%	75,52		75,52		75,52		
Sasaran 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan restorasi secara global.												
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Meningkatnya jumlah Kesaatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang termasuk dalam kategori maju. Tahun dasar 2020: 10 unit (Sumber data: RPJMN 2020-2024)	BKSDA	Hektar	16	15	20	12	15		Ekosistem Bakau
Sasaran 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.												
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Proporsi luas lahan kritis dan sangat kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan di Kabupaten Sikka	Tercapainya luas lahan hutan dan lahan yang direhabilitasi sebesar 20.000 hektar. Tahun dasar 2020: 56.000 hektar (Sumber data: RPJMN 2020-2024)	KPH Sikka	%	13,76		13,76		13,76		

# TUJUAN

16

## PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH



**Menguatkan Masyarakat yang inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan**

## I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum dan hak asasi manusia, Perdamaian, kelembagaan yang tangguh telah menjadi pra kondisi untuk penciptaan rasa aman, adil, inklusif dan berkelanjutan. Upaya menghindari konflik maupun kasus-kasus kekerasan menjadi anasir penting dalam menjaga stabilitas daerah.

Tujuan 16 pada dasarnya merupakan sebuah sudut pandang dalam membangun perdamaian, menciptakan keadilan yang merata untuk seluruh pihak, serta mengembangkan kelembagaan yang tangguh. Hal tersebut merupakan sebuah dasar upaya untuk mempercepat kemajuan dari Tujuan TPB/SDGs lainnya serta untuk meningkatkan pencapaian keseluruhan Tujuan dari prinsip utama TPB/SDGs yaitu “no one left behind”. Tanpa adanya perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh maka akan sulit mencapai Tujuan lainnya dalam TPB/SDGs, sehingga Tujuan 16 seringkali disebut dengan istilah tujuan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan tujuan lainnya dalam TPB/SDGs (enabler goals)

## II. STATUS CAPAIAN

### A. Pencapaian Indikator SDGs yang Mengalami Kemajuan

#### 1. Persentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam hal memberikan kebebasan berpendapat dan kesamaan memperoleh keadilan, maka pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pada suatu lembaga dapat menjadi sebuah ukuran. Pada masa bakti 2019-2024 dari 11 fraksi, 4 fraksi diantaranya fraksi Golkar terdapat 1 anggota perempuan, fraksi Hanura terdapat 1 anggota perempuan, fraksi Perindo terdapat 2 anggota perempuan, serta fraksi Demokrat Sejahtera terdapat 1 anggota perempuan.

Tabel 3.16. 1  
Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Sikka Masa

No	Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	PDIP	5	-	5
2.	Partai Golkar	3	1	4
3.	Gerindra	3	-	3
4.	Perindo	1	2	3
5.	PAN	3	-	3
6.	Hanura	3	1	4
7.	PKB	4	-	4
8.	Nasdem	4	-	4
9.	PKPI	2	-	2
10.	Demokrat	1	1	2
11.	PKS	1	-	1

Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Sikka, 2023

Di Kabupaten Sikka, persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka pada periode 2019-2024 baru mencapai 14,28% atau total 5 anggota perempuan dari 35 anggota DPRD Kabupaten Sikka. Hal ini menunjukkan peningkatan dalam hal memberikan kebebasan berpendapat dan kesamaan memperoleh keadilan.

Tabel 3.16. 2  
Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Sikka

Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh		
Indikator	Satuan	(2019-2024)
Presentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	%	14,28

Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Sikka, 2023

## 2. Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan.

Perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan merupakan implementasi negara hadir dalam melindungi segenap warga negara termasuk perempuan dan anak. Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan di Kabupaten Sikka mengalami penurunan dari 6% tahun 2020 menjadi 4,83% di tahun 2021. Kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 sebesar 4,22% menjadi 0,61%.

Tabel 3.16. 3  
Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan

Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh						
Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	%	4,83	-	0,61	-	0,12

Sumber: RPJPD Kabupaten Sikka 2025-2045, 2023

## 3. Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan pada Satu Tahun Terakhir.

Tabel 3.16. 4  
Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir

Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh						
Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kasus	5	PM	3	PM	0

Sumber: Polres Sikka, 2023

Data menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada tahun 2022 sebanyak 3 kasus dari tahun 2021. Kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0 kasus pembunuhan. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan tingkat keamanan di masyarakat. Keamanan dari kekerasan adalah salah satu prasyarat bagi individu untuk merasakan hidup yang aman dan aktif, sehingga dapat membangun sosial dan ekonomi yang bebas dari ancaman.

## III. TANTANGAN

Tantangan dalam mengatasi kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan yaitu :

1. masih adanya gap antara meningkatnya jumlah korban dan keluarga korban

yang telah mampu membuka suara dengan ketersediaan lembaga yang menangani,

2. adanya gap antara kualitas kekerasan yang semakin beragam dengan kualitas penanganan; dan
3. adanya gap antara keluasan cakupan wilayah dengan sistem penanganan dengan efektif, cepat dan sinergis.

Disamping itu, Melihat angka kita perlu terus mendorong penuntasan kekerasan terhadap anak meskipun penurunan dari data kurun waktu 3 tahun terakhir prevalensi kekerasan terhadap anak ini merupakan berita yang baik, namun patut menjadi perhatian bahwa angkanya masih cukup tinggi dan memprihatinkan.

Selain itu dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah dan keamanan situasi wilayah, tantangan yang dihadapi yaitu Ancaman terorisme, intoleransi, kebebasan berdemokrasi dan ketahanan nasional yang masih membutuhkan upaya peningkatan pencegahan dan penanganan secara komprehensif dan terpadu.

#### **IV. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK**

##### **1. “Ngopi Panas”**

Ngobrol Perkara Kamtibmas untuk mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung dilakukan oleh Polres Sikka. inovasi ini bisa menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan Kepolisian dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sikka sehingga mengurangi semua tindak kejahatan.

2. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM dapat menjadi salah satu sarana untuk menangani kejahatan kekerasan terhadap anak.

#### **V. KEBIJAKAN KEDEPAN**

Kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Sikka dalam rangka mencapai Tujuan 16 antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services), membangun pemerintahan yang terbuka (open government); meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan; serta mewujudkan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik.

**Tujuan 16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.**

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABIUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	SUMBER DATA	SATUAN	2021	2022		2023		STATUS CAPAIAN	KET
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TAR-GET	REALISASI		
<b>Sasaran 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun</b>												
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Meningkatnya proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian menjadi >60%. Tahun dasar 2019:53,32% (Sumber data: Surevei Sosial Ekonomi Nasional Modul Hansos, Badan Pusat Statistik)	Polres	Kasus	5		3		0		
<b>Sasaran 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksplotasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.</b>												
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurunnya prevalensi anak usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Tahun dasar 2018: 61,7% untuk anak laki-laki dan 62% untuk anak perempuan (Sumber data: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	DP2KBP3A	%	4,83		0,61		0,12		

**TUJUAN**



**KEMITRAAN  
UNTUK MENCAPAI  
TUJUAN**



**Menguatkan Sarana  
Pelaksanaan dan  
Merevitalisasi Kemitraan  
Global untuk Pembangunan  
Berkelanjutan**



## I. PENDAHULUAN

Peningkatan kerja sama lintas sektor, lintas pihak dan lintas program dapat mempercepat upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Penguatan dapat dilakukan dengan dengan pemanfaatansumber daya, keuangan, kelembagaan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan.

Tujuan 17 adalah menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dengan target untuk memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, dukungan pengembangan kapasitas data statistik.

## II. STATUS CAPAIAN

### A. Pencapaian Indikator SDGs yang Perlu mendapat Kemajuan

#### 1. Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proposisi Terhadap PDRB Menurut Sumbernya dan Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDRB.

Pendapatan daerah Kabupaten Sikka kurun waktu Tahun 2021-2023 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan kontribusi terbesar pada komponen PAD. Selama kurun waktu tersebut, Dana Perimbangan menempati porsi terbesar terhadap Pendapatan Daerah. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun sebelumnya Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 naik menjadi 115.790.415.208 atau sebesar 85%. Komponen Pajak Daerah tahun 2023 naik menjadi 35.847.445.100 dari tahun sebelumnya. Penerimaan Retribusi Daerah mengalami naik menjadi 16.100.605.548 dari penerimaan tahun sebelumnya dikarenakan giat kegiatan di bidang pariwisata. Penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah juga mengalami penurunan menjadi 19.532.181.437 dari penerimaan pada tahun sebelumnya.

Tabel 3.17. 1  
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2023

No	Uraian	REALISASI ( 000.000. )		
		2021	2022	2023
<b>1.</b>	<b>PAD</b>	<b>90.816.111.413,-</b>	<b>96.165.854.550,58,-</b>	<b>115.790.415.208</b>
1.1	Pajak Daerah	19.494.028.872,90	21.715.997.250,-	35.847.445.100
1.2	Retribusi Daerah	7.837.377.672,-	8.256.039.482,00	16.100.605.548
1,3	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	2.694.036.222,-	1.707.467.340,00	3.479.066.260
1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah	60.790.668.645,62	64.486.350.478,58	19.532.181.437
<b>2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>799.486.453.591,-</b>	<b>765.335.557.337,-</b>	<b>900.155.636.000</b>
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Hasil Pajak	14.788.653.458,-	19.537.143.465,-	
2.2	Dana Alokasi Umum	579.691.529.600,-	921.476.448.337	
2.3	Dana Alokasi Khusus	205.006.270.533,-		
<b>3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>30.724.580.000,-</b>	<b>42.275.991.207,-</b>	<b>19.532.181.437</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah ( 1 + 2 + 3 )</b>	<b>921.027.145.004,-</b>	<b>903.777.403.094,58</b>	<b>136.222.752.281</b>

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten Sikka, 2023

Sumber PAD yang mengalami kenaikan pada Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022 dan tahun 2021 adalah pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan yang sah.

Tabel 3.17. 2

Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi Terhadap PDRB Menurut Sumbernya

Tujuan 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan						
Indikator	Satuan	Baseline (2021)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi Terhadap PDRB Menurut Sumbernya	%	95,11%	100%	95%	100%	95,11
Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDRB.	%	106,62%	100%	106%	100%	70%

Sumber: Bappenda Kabupaten Sikka, 2023

### III. TANTANGAN

Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Pajak Daerah :

1. Belum semua regulasi yang berkenaan dengan Pajak Daerah dilakukan penyesuaian;
2. Belum maksimalnya penggalian dan pemungutan potensi sumber-sumber PAD;
3. Masih kurangnya sinergitas antara OPD yang berkaitan dengan pengelolaan Pajak Daerah;
4. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM;
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana kerja;
6. Tuntutan kualitas pelayanan pajak yang cepat, mudah, dan memuaskan;
7. Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak;
8. Sanksi atas pelanggaran belum bisa diterapkan secara penuh sehingga menjadi celah bagi wajib pajak untuk menghindari pajak.

### IV. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Layanan “Si P@P@ On” atau sistem pelayanan pajak berbasis online.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sikka bekerjasama dengan Bank NTT, meluncurkan layanan baru bernama Si P@P@ On atau sistem pelayanan pajak berbasis online. Sistem layanan pajak berbasis online ini bertujuan untuk memudahkan para wajib pajak. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile Banking Bank NTT.

### V. KEBIJAKAN KEDEPAN

Kebijakan yang diambil dalam upaya peningkatan Pendapatan dalam hal ini Pajak Daerah yaitu dengan melakukan intentesifikasi dengan cara :

1. Melakukan penagihan pajak secara aktif dengan menggunakan mobil Bank NTT pada titik-titik yang sudah ditentukan.
2. Melakukan edukasi dan pendekatan persuasif kepada wajib pajak yang menunggak.

Tujuan 17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABIUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	SUMBER DATA	SAT	2021	2022		2023		STATUS CAPAIAN	KET
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
<b>Sasaran 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.</b>												
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya	Meningkatnya rasio pendapatan negara menjadi 11,4 - 12,0 persen PDB (Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal/KEM-PPKF 2023). Tahun dasar 2020: 10,68% PDB (Sumber data: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2020 Audited)	Bapenda	%	95,11%		95%		95%		
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	Meningkatnya rasio perpajakan terhadap PDB menjadi 8,41-8,87% (Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal/KEM-PPKF 2022). Tahun dasar 2020: 8,33% PDB (Sumber data: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2020 Audited)	Bapenda	%	106,62%		106%		100%		

## BAB IV

### PENUTUP

#### A KESIMPULAN

Implementasi konsep pembangunan berkelanjutan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dari dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Untuk mencapai hal ini, diperlukan peran aktif dari semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dalam penjelasan berbagai perundang-undangan juga telah digunakan pertimbangan berkelanjutan, yang semakin menunjukkan pengaruh pemahaman pembangunan berkelanjutan dalam setiap proses pembangunan. Artinya secara substansial maupun teknis administratif, target yang terkandung dalam 17 tujuan dalam TPB perlu diimplementasikan melalui berbagai pendekatan yang melibatkan multisektor dan multi pihak melalui program dan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi.

#### B TINDAK LANJUT

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah dilakukan pada bagian-bagian sebelumnya, maka rencana tindak lanjut dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. **Tanpa Kemiskinan**, Perlu kerja sama lintas sector dalam mengakhiri kemiskinan ekstrim, termasuk kemiskinan absolut (kurang dari \$1,25 per hari) melalui penguatan kapasitas dan layanan untuk mengurangi beban hidup, meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan dengan berbagai penyediaan fasilitas.
2. **Tanpa Kelaparan**, Perlu mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan, gizi seimbang, dan stunting pada anak melalui penguatan skor pola pangan harapan (PPH) baik baik pola pangan ketersediaan maupun pola pangan konsumsi.
3. **Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera**, Perlu Mengakhiri kematian yang dapat dicegah dengan kematian anak, mengurangi kematian ibu mengurangi angka kematian akibat penyakit penduduk berumur kurang dari 70 tahun, dengan peningkatan pelayanan kesehatan yang terjangkau.
4. **Pendidikan Berkualitas**, Perlu memastikan semua anak di bawah usia 5 tahun dapat mengembangkan potensi mereka melalui akses ke program dan kebijakan pengembangan anak usia dini yang berkualitas dengan mengembangkan layanan yang holistik dan integratif, serta peningkatan partisipasi sekolah tanpa diskriminatif berdasarkan jenis kelamin.
5. **Kesetaraan Gender**, Perlu upaya sinergi dengan para pihak dalam mencegah dan menghilangkan kekerasan terhadap individu, khususnya perempuan dan anak , memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan serta memantau dan mengakhiri diskriminasi dan kesenjangan dalam pelayanan publik, penegakan hukum, akses terhadap keadilan dan partisipasi dalam kehidupan berpolitik dan ekonomi berbasis gender melalui berbagai pendekatan yang non diskriminasi serta mencapai kesehatan

seksual dan reproduksi dengan semua hak-haknya, dan mensosialisasikan program penurunan kelahiran dengan cara yang efisien dan sukarela.

6. **Air Bersih dan Sanitasi Layak**, Perlu memastikan akses universal terhadap sumber daya air dan sanitasi untuk semua di berbagai tempat, menjaga kualitas air yang aman dan penggunaan air yang efisien.
7. **Energi Bersih dan Terjangkau**, Perlu Menjamin energi bersih untuk semua, dan meningkatkan efisiensi energi dengan menyusun langkah-langkah persiapan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi baru terbarukan.
8. **Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**, Perlu memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mendorong terciptanya pekerjaan yang layak dengan tingkat pendapatan yang lebih baik untuk semua masyarakat.
9. **Industri, Inovasi dan Infrastruktur**, Perlu menjamin akses universal ke jasa infrastruktur jalan dan komunikasi dengan meningkatkan pertumbuhan kualitas dan jumlah infrastruktur jalan dan komunikasi yang menjangkau sampai pedesaan, memperkuat penelitian untuk adopsi teknologi baru serta menciptakan lapangan kerja di sektor industri yang secara signifikan akan berpengaruh terhadap kontribusi sektor industri terhadap PDRB.
10. **Berkurangnya Kesenjangan**, Perlu mengurangi hingga setengahnya proporsi rumah tangga yang pendapatannya kurang dari setengah rata-rata pendapatan nasional dengan menciptakan lapangan kerja baik formal, informal maupun non formal.
11. **Kota dan Pemukiman Berkelanjutan**, Perlu meningkatkan standar hidup di pemukiman kumuh perkotaan melalui program “**Kotaku**” guna memastikan akses universal yang aman dan layak ke lingkungan dan layanan dasar perkotaan termasuk perumahan, sanitasi, pengelolaan limbah dan transportasi yang rendah karbon.
12. **Konsumsi dan Produksi Yang bertanggungjawab**. Perlu menjamin kerugian makanan yang rendah terutama pangan yang terbuang dalam rantai nilai setelah panen, menjamin pemerintahan dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan yang berkelanjutan, terpadu dan transparan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan pencapaian SDGs.
13. **Penanganan Perubahan Iklim**, Perlu mengurangi gas karbon dalam sistem energi, menjamin energi bersih untuk semua, dan meningkatkan efisiensi energi, mengurangi emisi gas rumah kaca yang tidak berhubungan dengan energi melalui praktik perbaikan tata kelola bidang pertanian, kehutanan, pengelolaan sampah dan industri maupun penyusunan Indeks Resiko Bencana.
14. **Ekosistem Lautan**, Perlu menjamin ekosistem kelautan yang aman, dan membutuhkan individu, perusahaan, dan pemerintah serta pemberian insentif dan desinsentif akibat polusi dan penggunaan jasa ekosistem laut.
15. **Ekosistem Daratan**, Perlu Menata dan mengendalikan upaya konversi hutan dan lahan basah menjadi lahan pertanian, menjaga dan melestarikan hutan secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.

16. **Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.** Perlu memberikan jaminan dalam mengatasi tantangan struktural termasuk kekerasan dan konflik melalui sinergi antar Lembaga serta memastikan tidak ada diskriminasi dan kesenjangan dalam pelayanan publik, menegakan hukum, akses terhadap keadilan, dan partisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi atas etnis, agama, kecacatan, asal negara, dan status sosial. Memberikan pemahaman secara terus menerus kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa pelaksanaan pembangunan harus berorientasi kepada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
17. **Kemitraan untuk Mencapai Tujuan,** Perlu membenahan regulasi atau peraturan-peraturan yang mendorong keberlanjutan serta penguatan sarana dan sarana dalam mendukung pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Melakukan kembali sosialisasi dan diseminasi kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan sebuah “Gerakan Bersama”.



